



## **BUPATI SAMBAS**

### **PERATURAN BUPATI SAMBAS**

**Nomor : 14 Tahun 2016**

**Tanggal : 31 Mei 2016**

---

# **RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2017**

---



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SAMBAS**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Tahun 2017 merupakan tahun pertama dari implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sambas 2017-2021, karena masa berlaku RPJMD Kabupaten Sambas tahun 2011-2016 berakhir pada tahun 2016 dan belum adanya RPJMD untuk masa kerja berikutnya maka RKPD Kabupaten Sambas tahun 2017 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Sambas tahun 2005- 2025. Penggunaan RPJPD tersebut dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada di Permendagri No. 54 Tahun 2010 pasal 287 ayat 2 yang menyatakan "Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah kabupaten/kota, penyusunan RKPD berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD kabupaten/kota dan mengacu pada RPJMD provinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten/kota dengan pembangunan daerah provinsi".

Selain itu, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017 disusun sebagai bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana setiap daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) jangka waktu 5 tahun dan rencana pembangunan jangka pendek 1 tahun yang tertuang dalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah).

Sebagai dokumen resmi perencanaan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Lebih lanjut dapat menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional, memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah.

Proses penyusunan RKPD ini dilaksanakan melalui melalui berbagai tahapan termasuk Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten. RKPD ini memuat informasi rencana pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 seperti arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah, serta program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Penyusunan RKPD juga memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya, serta diintegrasikan dengan prioritas pembangunan pemerintah pusat maupun provinsi.



## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33) ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3337) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 4) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 9) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2010 Nomor 2) ;

### **1.3. Hubungan antar Dokumen**

RKPD Kabupaten Sambas tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan teknis dengan jangka waktu satu tahun, yang disusun berdasarkan Permendagri No.54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sejatinya RKPD merupakan penjabaran tahunan RPJMD yang berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Sambas No. 3 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sambas 2005- 2025 dan Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2015 tentang RTRW Kabupaten Sambas tahun 2015-2035. RKPD 2017 ini



seharusnya merupakan perencanaan teknis dari RPJMD 2017-2021. Namun pada kenyataannya, RKPD 2017 ini menjadi perencanaan yang bersifat teknis yang berasal dari gagasan yang juga akan dikembangkan kedalam RPJMD 2017-2021 nantinya. Hal ini disebabkan waktu penyusunan keduanya yang hampir bersamaan namun didahului oleh RKPD 2017.

RKPD Kabupaten Sambas tahun 2017 ini juga diselaraskan dan mensinergikan perencanaan pembangunan dengan dokumen RKPD provinsi dan RKP melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Sinergitas yang dimaksud terutama dalam hal penetapan prioritas pembangunan daerah yang relevan dengan provinsi maupun pusat. Hal ini merupakan perwujudan keterpaduan dan kesatuan perencanaan pembangunan daerah dan pusat, dengan tetap memperhatikan kondisi, potensi serta dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Dalam sistem perencanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, RKPD merupakan satu kesatuan yang utuh dari manajemen pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan. Hubungan antara RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

(1) RKPD Kabupaten Sambas dan RKPD Provinsi Kalimantan Barat

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sambas diserasikan dengan RKPD Provinsi Kalimantan Barat melalui sinkronisasi/penyelarasan dalam pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

(2) RKPD Kabupaten Sambas dan RPJMD Kabupaten Sambas

RKPD merupakan penjabaran pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2017-2021 yang disusun ke dalam sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Sambas yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD. RKPD merupakan pokok bahasan utama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Sambas yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten.

(3) RKPD Kabupaten Sambas dan RENJA SKPD

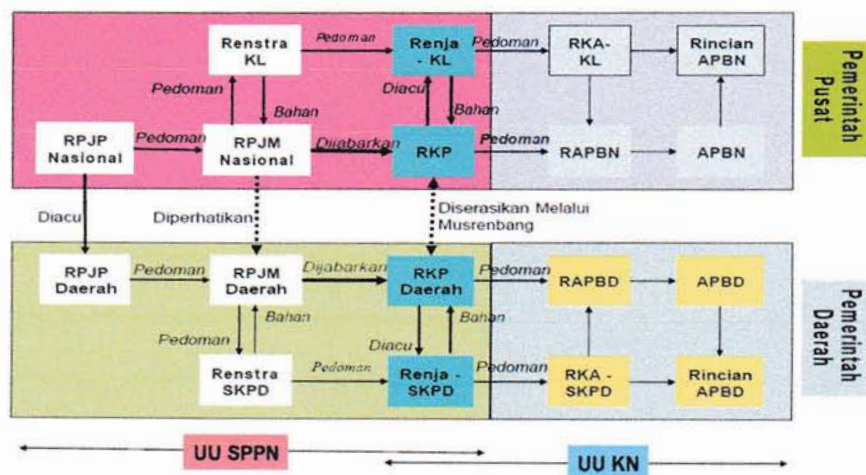
Rancangan Awal RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Renja SKPD merupakan Bahan Penyusunan RKPD, yang disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sambas.

(4) RKP Kabupaten Sambas dan APBD Kabupaten Sambas

RPKD Kabupaten Sambas sebagai dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Sambas yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD merupakan Pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sambas.

Gambaran tentang hubungan antara RKP dengan dokumen perencanaan lainnya sebagai kesatuan sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar berikut ini:



Gambar 1.1 Hubungan RKP dan Dokumen Perencanaan Lainnya

**1.4. Sistematika Dokumen RKP**

Rancangan Awal RKP Kabupaten Sambas Tahun 2017 dibagi menjadi 4 (empat) Bab dan beberapa Sub Bab sebagai berikut :

**BAB I** Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan antar Dokumen
- 1.4. Sistematika Dokumen RKP
- 1.5. Maksud dan Tujuan

**BAB II** Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKP Tahun 2014 dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

- 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
  - 1. Aspek Geografi dan Demografi
  - 2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
  - 3. Aspek Pelayanan Umum
  - 4. Aspek Daya Saing Daerah



- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD
- 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

**BAB III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah**

- 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
  - 3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2015 dan Perkiraan Tahun 2017
  - 3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah tahun 2017 dan Tahun 2018

**BAB IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
- 4.2. Prioritas Pembangunan
- 4.3. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

**1.5. Maksud dan Tujuan**

RKPD Kabupaten Sambas Tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang bersifat operasional, disusun dengan tujuan untuk menguraikan lebih lanjut secara rinci kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017. Selanjutnya, RKPD menjadi acuan bagi daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang kemudian akan dituangkan lebih lanjut dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Selanjutnya RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 dalam Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 26 ayat 2 serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 dalam Pasal 17 ayat 2.

## BAB II

### EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2015 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

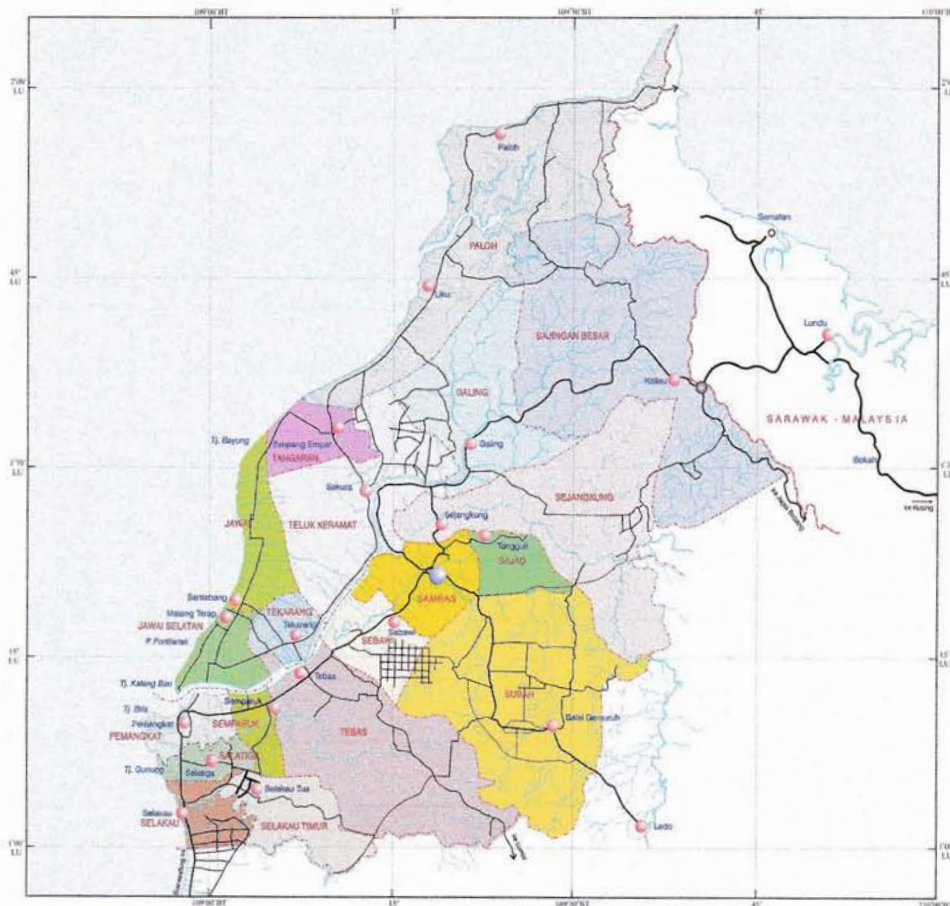
#### 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

##### 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

##### 2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Kabupaten Sambas terdiri dari 19 Kecamatan dengan letak yang sangat strategis berada pada bagian paling utara Provinsi Kalimantan Barat. Pada sebelah utara, Kabupaten ini berbatasan dengan Serawak (Malaysia Timur) dan laut Natuna. Pada sebelah selatan berbatasan dengan Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Bengkayang dan Serawak di sebelah timur serta Laut Natuna disebelah barat.

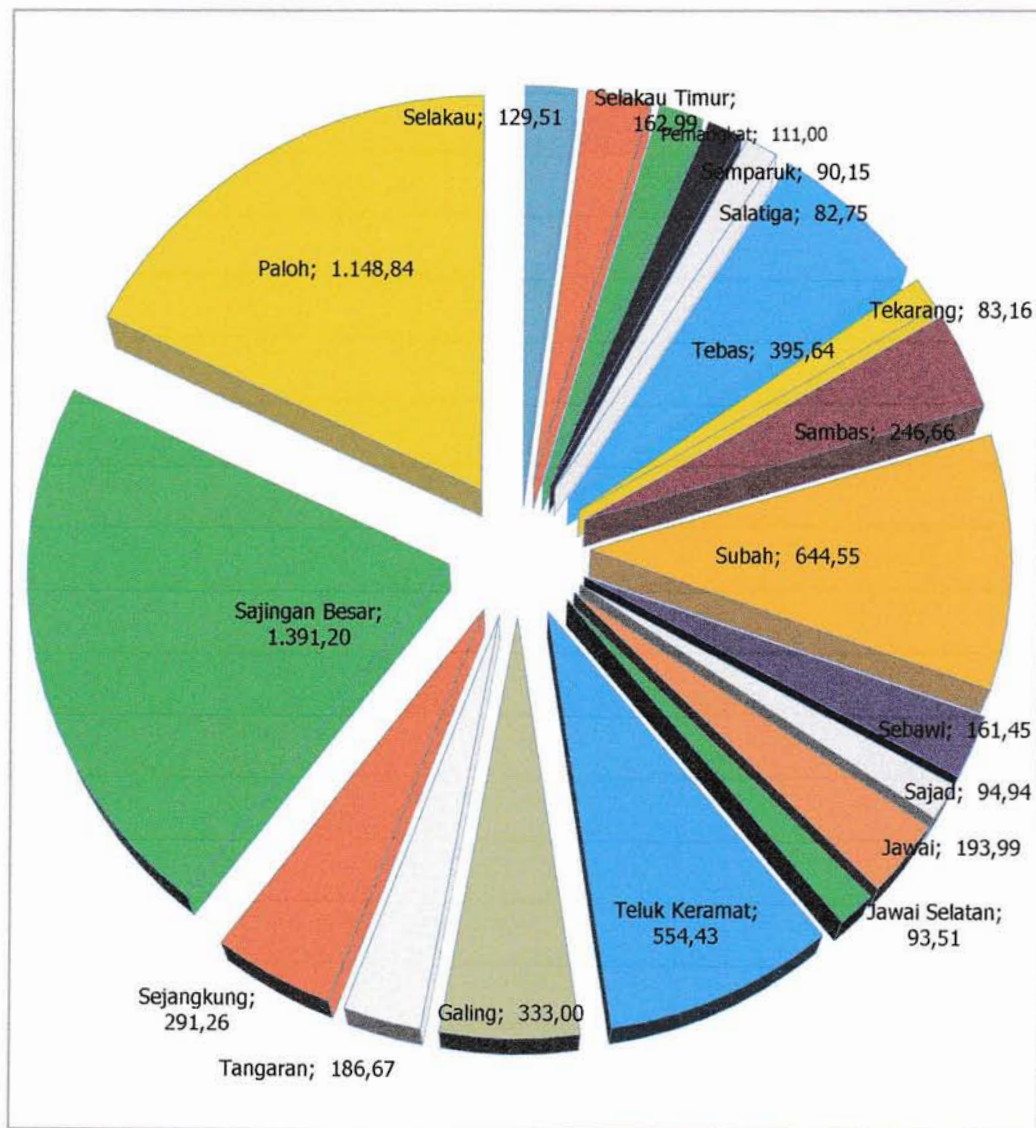
Gambar II.2.1  
Peta Kabupaten Sambas





Bila digambarkan dengan koordinat, Kabupaten Sambas berada pada 0°57'29,8" Lintang Utara serta 2°04'53,1" Lintang Utara dan 108°54',17,0" Bujur Timur serta 109°45',56" Bujur Timur. Dengan luas daratan adalah 6.395,70 Km<sup>2</sup> atau sekitar 4,36 persen dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas memiliki panjang pantai ±198,76 km; perbatasan negara ±97 km; dan perairan laut seluas 1.467,84 Km<sup>2</sup>. Kecamatan terluas di Kabupaten ini adalah Kecamatan Sajingan Besar dengan luas 1.391,20 Km<sup>2</sup> atau 21,75 persen sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Salatiga dengan luas sebesar 82,75 Km<sup>2</sup> atau 1,29 persen dari luas wilayah Kabupaten Sambas.

Grafik II.2.1  
Luas Wilayah Kabupaten Sambas Menurut Kecamatan (Km<sup>2</sup>)





Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Sambas Tahun 2015

Grafik II.2.2  
Banyaknya Desa dan Dusun Di Kabupaten Sambas

Selain itu, Kabupaten Sambas sebanyak memiliki 6 pulau yang tersebar pada 3 kecamatan yaitu Jawai Selatan, Paloh dan Sambas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II.2.1  
Pulau-Pulau Di Wilayah Kabupaten Sambas

No	Kecamatan / Nama Pulau	Koordinat Geografis		Keterangan
		Lintang	Bujur	
1	Jawai Selatan :			
	1. Pulau Belacan	01°11'43" LU	108°58'06" BT	TBP, Batuan Cadas, Pohon, terdapat mercusuar dibangun 2008, luas 900 m <sup>2</sup> .
	2. Pulau Pikhah	01°12'22" LU	108°57'22" BT	TBP, Batuan Cadas, Pohon Bakau dan Kelapa. Keliling sekitar 200 m dimiliki oleh masyarakat, potensi pariwisata.
	3. Pulau Pontianak	01°16'10" LU	108°58'59" BT	TBP, Batuan Cadas, Pohon Mangga dan Kelapa. Keliling sekitar 5.200 m dimiliki oleh masyarakat. Dibawah laut terdapat kerang langka namanya kerang putting beliung (di Indonesia hanya terdapat di Sambas dan Bali), potensi pariwisata.
2	Paloh :			
	1. Pulau TUA	01°43'29" LU	109°15'24" BT	TBP, Pohon Kelapa dan Cemara, pada bula tertentu tempat penyu bertelur



				(april-juni), potensi pariwisata.
2.	Pulau Selimpai	01°49'19" LU	109°20'6" BT	Pohon Kelapa dan Cemara, penghuni sekitar 20 KK, tempat pengkaran penyu, sebagai obyek pariwisata, luas 10 ha.
3	Sambas :			
1.	Pulau Bungin	01°23'24" LU	109°14'36" BT	TBP, pantai Bakau terdapat daratan ditengahnya.

Ket : TBP = Tidak berpenghuni.

Sumber : Bappeda Kabupaten Sambas

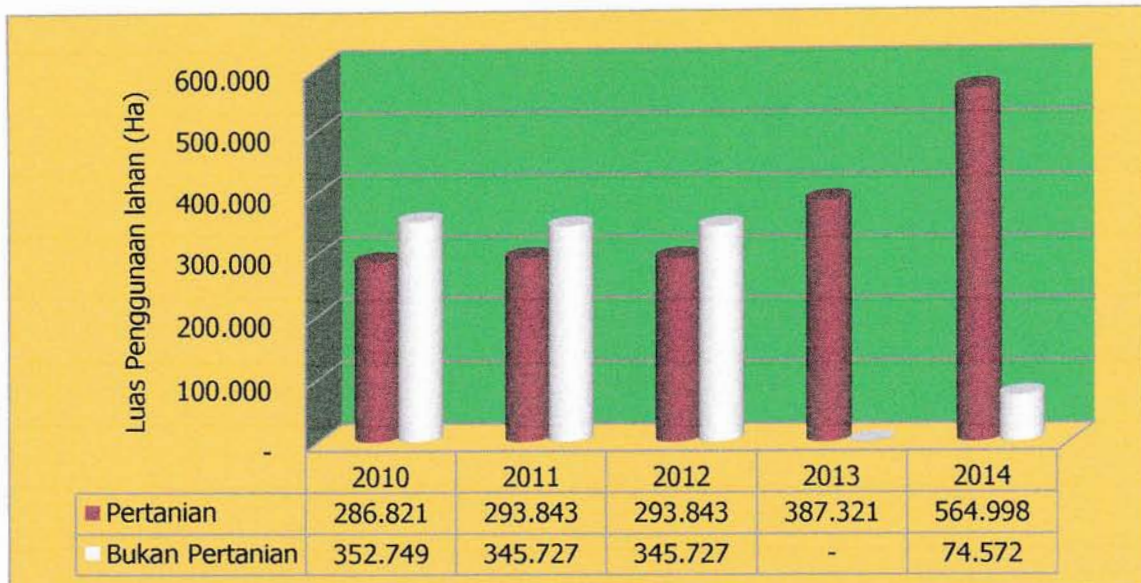
Sebagian besar wilayah Kabupaten Sambas merupakan wilayah relatif datar (kelerengan 0 % - 15 %) dengan luas 468.196 hektar atau 67,59 %, dan luas wilayah dengan kelerengan 15 % - 40 % adalah 160.396 hektar atau 25,08 %, sedangkan kelas lereng > 40 % seluas 46.832 hektar atau 7,3 %. Ketinggian wilayah berbeda berdasarkan kecamatan. Ketinggian 0 - 7m dpl terdapat: Kecamatan Sejangkung, Sambas, Tebas, Selakau, Jawai, Paloh dan Teluk Keramat. Ketinggian 8-25 m dpl terdapat : Kecamatan Sejangkung, Sambas, Tebas, Selakau, Pemangkat dan Teluk Keramat. Ketinggian 26-100m dpl Kecamatan Sejangkung, Sambas, Tebas, Selakau, Pemangkat, Teluk Keramat dan Paloh.

Dilihat dari tekstur tanahnya, maka sebagian besar daerah Kabupaten Sambas terdiri dari tanah aluvial yang meliputi areal sebesar 230,63 ribu hektar atau sekitar 36,06 persen dari luas daerah yang 0,64 juta hektar dan selanjutnya tanah podsolid merah kuning sekitar 157,32 ribu hektar atau 24,60 persen yang terhampar hampir di seluruh kecamatan.

Keadaan Cuaca Kabupaten Sambas Pada tahun 2014 berdasarkan data dari stasiun meteorologi Paloh Kabupaten Sambas, suhu udara rata-rata berkisar antara 21,7<sup>0</sup>C sampai 34,6<sup>0</sup>C. Suhu udara maksimum terjadi pada bulan Juli yaitu sebesar 34,6<sup>0</sup>C, sedangkan suhu minimum terjadi pada bulan Februari sebesar 21,7<sup>0</sup>C.

Jumlah hari hujan tertinggi terjadi di Kecamatan Sejangkung mencapai 196 hari hujan atau rata-rata 16 hari hujan per bulan. Rata-rata bulanan hari hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember di Kecamatan Sejangkung, Paloh, Salatiga, Selakau dan Tekarang yaitu mencapai 16,16,14,13 dan 13 hari hujan.

Curah hujan di suatu tempat antara lain dipengaruhi oleh keadaan iklim, keadaan topografi dan perputaran/pertemuan arus udara. Oleh karena itu jumlah curah hujan beragam menurut bulan dan letak stasiun pengamat. Jumlah curah hujan tertinggi pada tahun 2014 di Kabupaten Sambas mencapai 2.580 milimeter atau rata-rata 215,00 milimeter per bulan yang terjadi di Kecamatan Sambas, sedangkan curah hujan terendah terjadi di Kecamatan Teluk Keramat dengan rata-rata 111,05 milimeter per bulan.



Sumber : Buku Tabel Pokok Kabupaten Sambas 2015  
 Data Lahan Bukan Pertanian Tahun 2013 tidak tersedia dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Sambas

Grafik II.2.3  
 Luas Penggunaan Lahan Pertanian dan Bukan Pertanian  
 di Kabupaten Sambas Tahun 2010– 2014

Lahan Pertanian terdiri dari 2 yaitu lahan pertanian sawah dan lahan pertanian bukan sawah. Dari sisi penggunaan lahan, sampai dengan tahun 2014, lahan pertanian di Kabupaten Sambas seluas 564.998 ha terdiri dari lahan sawah seluas 68.644 ha dan lahan bukan sawah seluas 496.354 ha. Sedangkan lahan bukan pertanian seluas 74.572 ha.

Lahan pertanian sawah terluas berada di Kecamatan Teluk Keramat yaitu 6.911 ha, diikuti Kecamatan Tebas 6.110 ha, Kecamatan Jawai 5.524 ha, Kecamatan Selakau 4.643 ha, dan terkecil di Kecamatan Sajad seluas 1.454 ha, sedangkan lahan pertanian bukan sawah terluas berada di Kecamatan Sajingan Besar yaitu 135.899 Ha, diikuti Kecamatan Paloh seluas 107.802 ha, Kecamatan Subah seluas 47.506 Ha, Kecamatan Teluk Keramat seluas 38.802 Ha dan terkecil Kecamatan Semparuk yaitu 2.051 ha.

Tabel II.2.2  
 Luas Lahan Pertanian dan Bukan Pertanian Menurut Kecamatan  
 Di Kabupaten Sambas Tahun 2014 (Ha)

Kecamatan	Luas Lahan Pertanian		Luas Lahan Bukan Pertanian	Jumlah
	Sawah	Bukan Sawah		
	4.643	5.383	2.925	12.951
	2.835	10.438	3.026	16.299
	2.071	5.526	3.503	11.100
	3.930	2.051	3.034	9.015
	3.244	2.280	2.751	8.275
	6.110	30.844	2.610	39.564
	2.177	4.599	1.540	8.316



Kecamatan	Luas Lahan Pertanian		Luas Lahan Bukan Pertanian	Jumlah
	Sawah	Bukan Sawah		
	3.450	17.946	3.270	24.666
	2.425	47.506	14.524	64.455
	1.840	11.102	3.203	16.145
	1.454	7.797	243	9.494
	5.524	13.415	460	19.399
	3.777	5.353	221	9.351
	6.911	38.802	9.730	55.443
	3.626	17.989	11.685	33.300
	4.395	10.274	3.998	18.667
	4.256	21.348	3.522	29.126
	1.579	135.899	1.642	139.120
	4.397	107.802	2.685	114.884
	<b>68.644</b>	<b>496.354</b>	<b>74.572</b>	<b>639.570</b>

Sumber : Buku Tabel Pokok Kabupaten Sambas 2015

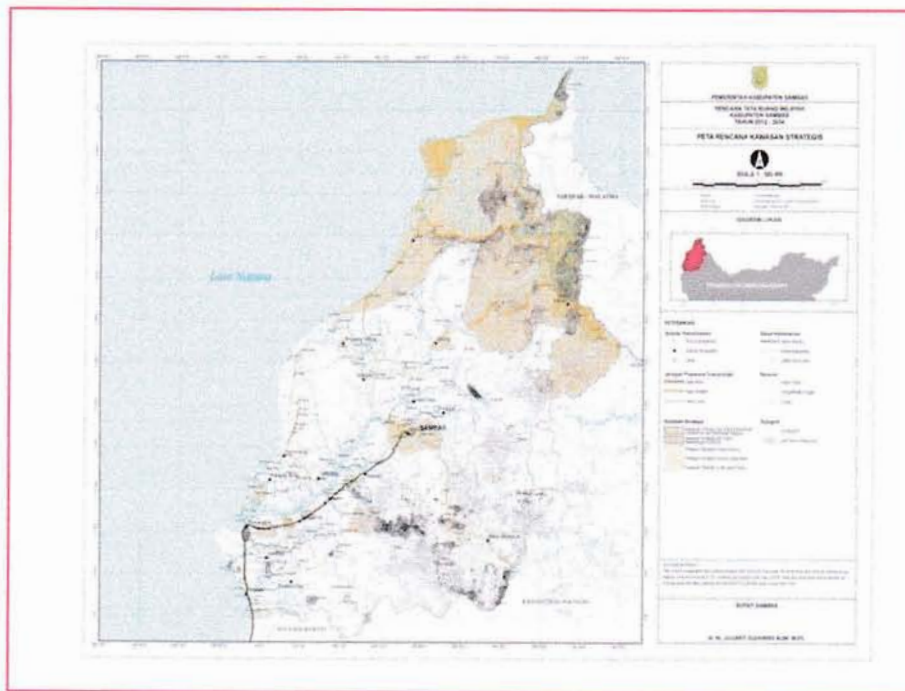
### 2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Didalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sambas Tahun 2012 - 2032, dijelaskan bahwa berdasarkan kriteria kawasan strategis dan potensi wilayah, maka ada beberapa kawasan strategis yakni:

1. Dari sudut kepentingan ekonomi kabupaten yang layak ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Sambas, yaitu:
  - a. Kawasan Perbatasan Negara yang meliputi Kecamatan Paloh dan Sajingan Besar;
  - b. Kawasan Perkotaan Sambas;
  - c. Kawasan Usaha Agribisnis Terpadu (KUAT) yang meliputi Kecamatan Tebas dan Kecamatan Galing;
  - d. Kawasan Minapolitan budidaya di Kecamatan Jawai Selatan dengan hinterland Kecamatan Pemangkat dan Kecamatan Jawai; dan
  - e. Kawasan Minapolitan penangkapan di Kecamatan Pemangkat dengan hinterland Kecamatan Selakau;
2. Dari sudut kepentingan sosial budaya yang layak ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Sambas yaitu :
  - a. Kawasan *Waterfront City* dan Komplek Istana Kesultanan Sambas (Istana Alwatzikoebillah, Masjid Jami', dan Makam Raja-raja Kesultanan Sambas); dan
  - b. Kawasan Wisata meliputi: Pantai Sinam di Kecamatan Pemangkat, Pantai Putri Serayi di Kecamatan Jawai Selatan, Danau Sebedang di Kecamatan Sebawi, Pantai Temajuk di Kecamatan Paloh, dan Riam Merasap di Kecamatan Sajingan Besar.

3. Dari kriteria kawasan strategis dan potensi wilayah, maka ada beberapa kawasan strategis pendayagunaan sumber daya alam/teknologi tinggi yang layak ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Sambas, yaitu:
  - a. Kawasan Industri Semparuk (KIS);
  - b. Terminal khusus dan kawasan industri Tanjung Api di Kecamatan Paloh.
  - c. Kota Terpadu Mandiri (KTM) Subah dengan hinterland terletak di Kecamatan Sajad dan Kecamatan Sejangkung.
  - d. Kota Terpadu Mandiri (KTM) Gerbang Mas Perkasa Sebunga dengan hinterland di Kecamatan Paloh, Galing, dan Sejangkung.
4. Dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yang layak ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Sambas, yaitu:
  - a. Kawasan Kebun Raya Sambas di Kecamatan Subah;
  - b. Kawasan ekosistem Tanjung Belimbing di Kecamatan Paloh; dan
  - c. Kawasan ekosistem Gunung Bentarang di Kecamatan Sajingan Besar.

Gambar II.2.2  
Peta Rencana Kawasan Strategis



Sumber : Lampiran Raperda Kab. Sambas Tahun 2012 Tentang RTRW Kab. Sambas 2012-2032

### 2.1.1.3 Demografi

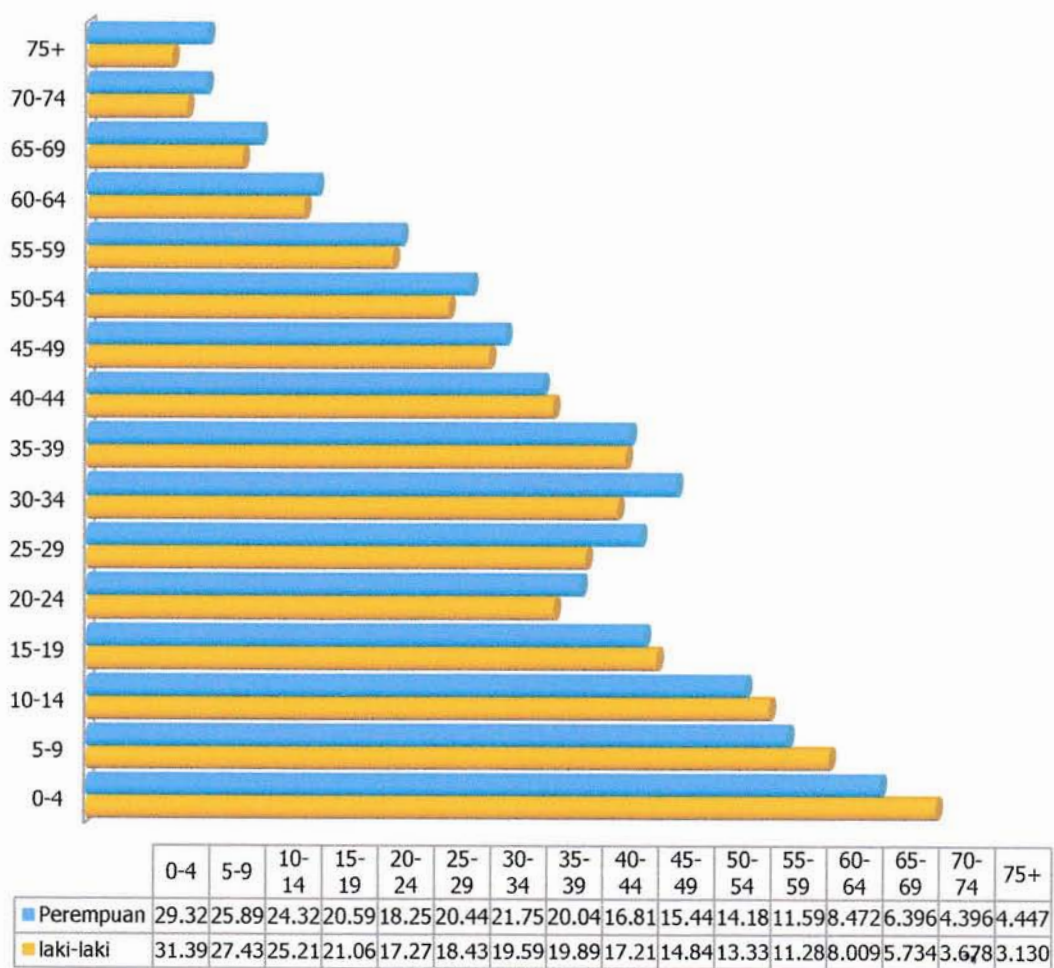
Berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk Sementara Provinsi Kalimantan Barat, penduduk Kabupaten Sambas pada tahun 2014 berjumlah sekitar 519.887 jiwa dengan kepadatan penduduk sekitar 81 jiwa per kilometer persegi atau 2.825 jiwa per desa. Penyebaran penduduk di Kabupaten Sambas tidak merata antar kecamatan yang satu dengan yang lainnya. Kecamatan Pemangkat merupakan kecamatan dengan tingkat



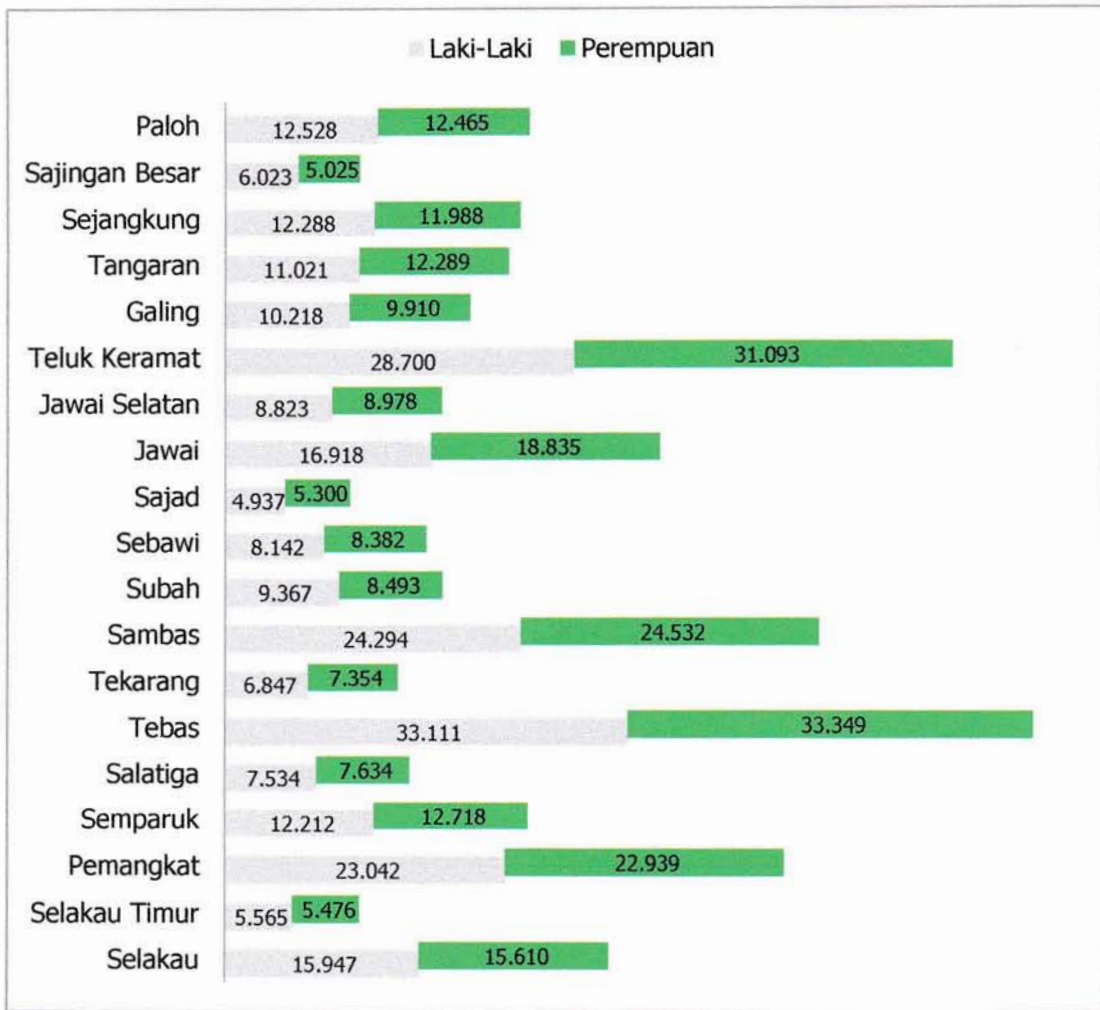
kepadatan penduduk tertinggi yaitu 414 jiwa/km<sup>2</sup>. Sebaliknya Sajingan Besar dengan kepadatan penduduk terkecil hanya dihuni 8 jiwa/km<sup>2</sup>. Penduduk laki-laki diperkirakan berjumlah 257.517 jiwa, sedangkan penduduk perempuan sekitar 262.370 jiwa.

Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin dengan rincian kelompok umur 0-4 tahun sebanyak 60.714 orang (urutan pertama terbesar), kelompok umur 5-9 tahun sebanyak 53.327 orang (urutan kedua terbesar), kelompok umur 10-14 sebanyak 49.537 orang (urutan ketiga terbesar).

Grafik II.2.4  
Penduduk Kabupaten Sambas Menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2014



Sumber : Buku Tabel Pokok Kabupaten Sambas Tahun 2015



Sumber : Buku Tabel Pokok Kabupaten Sambas Tahun 2015

Grafik II.2.5

Penduduk Kabupaten Sambas Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2014

Laju pertumbuhan penduduk Kab. Sambas sebesar 1,26 persen. Laju pertumbuhan penduduk Kecamatan Sajingan Besar adalah yang tertinggi dibandingkan kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Sambas yakni sebesar 2,86 persen. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk yang terendah adalah Kecamatan Jawai Selatan yaitu sebesar 0,19 persen.

Tabel II.2.3  
Kepadatan Penduduk Dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Kepadatan Penduduk		Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
			Per Km <sup>2</sup>	Per Desa	
Selakau	31.557	129,51	244	3.506	1,19
Selakau Timur	11.041	162,99	68	2.760	1,96
Pemangkat	45.981	111	414	9.196	0,76
Semparuk	24.930	90,15	277	4.986	1,18



Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah	Kepadatan Penduduk		Laju Pertumbuhan Penduduk
	(Jiwa)	(Km <sup>2</sup> )	Per Km2	Per Desa	(%)
Salatiga	15.168	82,75	183	3.034	0,82
Tebas	66.460	395,64	168	2.890	1,08
Tekarang	14.201	83,16	171	2.029	1,63
Sambas	48.826	246,66	198	2.713	2,03
Subah	17.860	644,55	28	1.624	0,46
Sebawi	16.524	161,45	102	2.361	1,42
Sajad	10.237	94,94	108	2.559	0,73
Jawai	35.753	193,99	184	3.250	0,49
Jawai Selatan	17.801	93,51	190	1.978	0,19
Teluk Keramat	59.793	554,43	108	2.491	0,46
Galing	20.128	333	60	2.013	0,59
Tangaran	23.310	186,67	125	3.330	2,84
Sejangkung	24.276	291,26	83	2.023	2,08
Sajingan Besar	11.048	1.391,20	8	2.210	2,86
Paloh	24.993	1.148,84	22	3.124	1,11
<b>2014</b>	<b>519.887</b>	<b>6.395,70</b>	<b>81</b>	<b>2.825</b>	<b>1,26</b>

Sumber : Buku Tabel Pokok Kabupaten Sambas Tahun 2015

Menurut data BPS Kabupaten Sambas, Angkatan Kerja penduduk yang berumur 15 tahun keatas berjumlah 273.076 orang, terdiri dari yang bekerja berjumlah 262.979 orang dan pengangguran terbuka berjumlah 10.097 orang sedangkan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bukan angkatan kerja berjumlah 83.611 orang.

Tabel II.2.4  
Penduduk Kabupaten Sambas Berumur 15 tahun Keatas  
Berdasarkan Jenis Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin  
Tahun 2014

No.	Jenis Kegiatan	Jenis Kelamin		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
<b>Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas</b>		<b>173.547</b>	<b>183.140</b>	<b>356.687</b>
1.	Angkatan Kerja	148.549	124.527	273.076
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	85,6	68	76,56
	Bekerja	141.337	121.642	262.979
	Pengangguran Terbuka	7.212	2.885	10.097
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,85	2,32	3,7
2.	Bukan Angkatan Kerja	24.998	58.613	83.611
	Sekolah	13.915	13.369	27.284
	Mengurus Rumah Tangga	1.922	38.352	40.274
	Lainnya	9.161	6.892	16.053

Sumber : Buku Tabel Pokok Kabupaten Sambas Tahun 2015

Tahun 2014 Lapangan Usaha Pertanian/Perkebunan menyerap tenaga kerja yang sebanyak 7.592 orang. Lapangan Usaha ke dua yang menyerap tenaga kerja terbanyak yaitu dari sektor bangunan sebanyak 1.394 orang. Lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja paling sedikit adalah Jasa Angkutan yang hanya menyerap 3 orang pekerja.

Tabel II.2.6  
Jumlah Tenaga Kerja Dipekerjakan Pada Perusahaan  
Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sambas

No.	Lapangan Usaha	Jumlah Perusahaan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Pertanian/Perkebunan	23	5.343	2.249	7.592
2.	Pertambangan	1	41	2	43
3.	Industri	60	559	82	641
4.	Listrik	2	65	9	74
5.	Bangunan	38	1.394	-	1.394
6.	Perdagangan	60	220	71	291
7.	Angkutan	1	3	-	3
8.	Jasa Perusahaan	15	216	55	271
9.	Jasa Sosial Perorangan	31	120	62	182
	<b>2014</b>	<b>231</b>	<b>7.961</b>	<b>2.530</b>	<b>10.491</b>
	<b>2013</b>	<b>185</b>	<b>6.180</b>	<b>1.914</b>	<b>8.094</b>
	<b>2012</b>	<b>159</b>	<b>5.133</b>	<b>1.628</b>	<b>6.761</b>
	<b>2011</b>	<b>159</b>	<b>5.088</b>	<b>1.623</b>	<b>6.711</b>
	<b>2010</b>	<b>154</b>	<b>1.259</b>	<b>1.702</b>	<b>2.869</b>

Sumber : Buku Tabel Pokok Kabupaten Sambas Tahun 2015

Masalah ketenagakerjaan tidak berhenti pada penciptaan lapangan pekerjaan namun juga menjaga agar tenaga kerja terlindungi hak-haknya. Pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi ancaman bagi para pekerja. Kasus PHK dalam tiga tahun terakhir berbeda setiap tahunnya begitu juga jumlah tenaga kerja yang di PHK. Selain masalah PHK, para tenaga kerja juga masih menghadapi minimnya upah yang diterima. Namun demikian rata-rata upah minimum kabupaten masih dibawah rata-rata kebutuhan hidup minimum.

Rasio rata-rata penghasilan pekerja terhadap UMR tahun 2015 sebesar Rp. 1.750.000,- bertambah Rp. 200.000,- dari tahun 2014.

Tabel II.2.7  
Ketenagakerjaan di Kabupaten Sambas

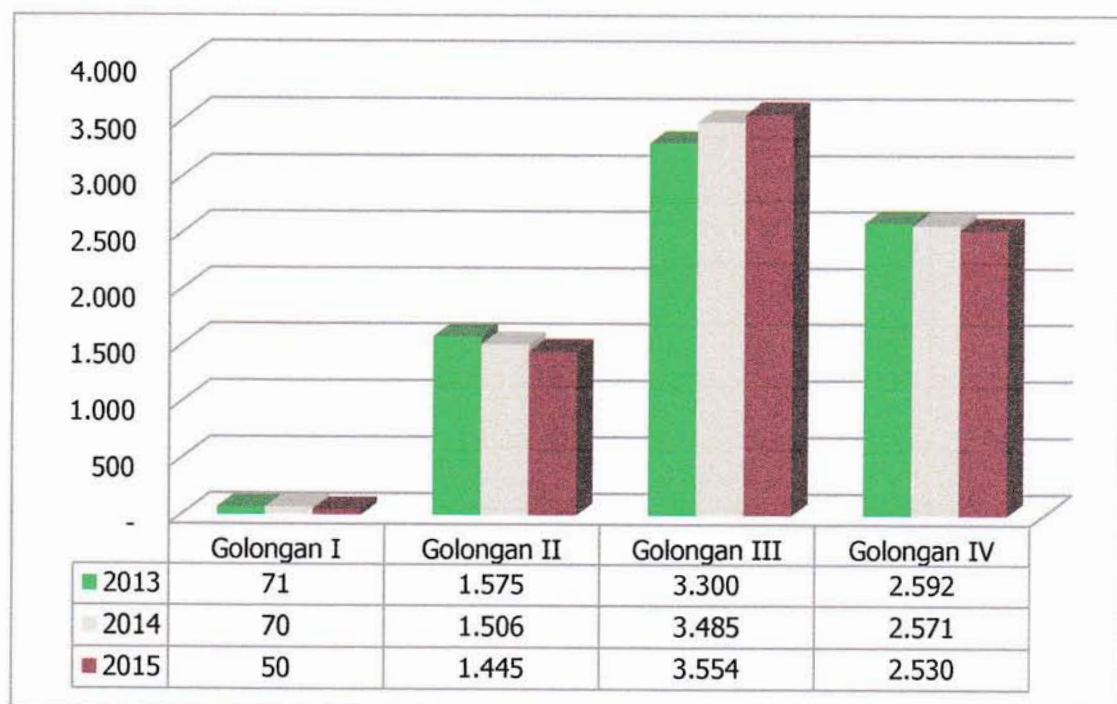
Jenis Data		2012	2013	2014	2015	Satuan
1.	- Rata-rata upah minimum Regional	945.000	1.122.500	1.450.000	1.650.000	Rupiah
	- Rata-rata kebutuhan hidup minimum	1.216.132	1.279.738	1.659.000	1.876.941	Rupiah
2.	PHK					
	- Kasus PHK	2	5	8	6	Kasus



Jenis Data		2012	2013	2014	2015	Satuan
	- Orang Terkena PHK	2	14	8	4	Orang
3.	Rasio Rata-rata Penghasilan Pekerja Terhadap UMR	1.000.000	1.200.000	1.550.000	1.750.000	Rupiah
4.	Angka Rata-rata Jam Kerja	7	7	7	7	Jam
5.	Angka Partisipasi Pekerja Peserta Astek	75	75	75	75	%
6.	Angka Partisipasi Perusahaan Peserta Astek	60	60	65	65	%
7.	Angka Partisipasi Jamsostek	75	75	75	75	%
8.	Angka Partisipasi Perusahaan Peserta Jamsostek	60	60	30	30	%
9.	Balai Pelatihan Ketenagakerjaan	1	1	1	1	Unit
10.	Pusat Informasi Ketenagakerjaan	1	1	2	3	Unit

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sambas (Juni, 2015)

Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan aparatur pemerintah yang bertugas sebagai abdi masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Keberadaan PNS sebagai SDM dalam pemerintahan menjadi pilar pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu diperlukan PNS yang berkualitas agar pembangunan dapat berjalan baik. Adapun jumlah PNS di Kabupaten Sambas tahun 2015 sebanyak 7.579 orang dengan komposisi sebagai berikut :



Sumber : BKD Kab. Sambas (Juni, 2015)

Grafik II.2.5  
Jumlah PNS Berdasarkan Kualifikasi Golongan

Adapun jumlah PNS Laki-laki di Kabupaten Sambas pada tahun 2015 sebanyak 4.146 orang dengan tingkat pendidikan terbanyak adalah Sarjana (S1) dan PNS Perempuan sebanyak 3.433 orang dengan tingkat pendidikan terbanyak adalah Sarjana (S1) .

Tabel II.2.8  
Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sambas berdasarkan Jenis Kelamin, Pendidikan dan Golongan

Golongan Ruang/Tingkat Pendidikan	Tahun			
	2014		2015	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
Golongan Ruang				
Golongan I	62	8	44	6
Golongan II	816	690	795	650
Golongan III	1.832	1.653	1.861	1.693
Golongan IV	1.472	1.099	1.446	1.084
<b>Jumlah</b>	<b>4.182</b>	<b>3.450</b>	<b>4.146</b>	<b>3.433</b>
Tingkat Pendidikan				
SD	69	6	69	6
SLTP	99	10	76	10
SLTA	1.406	901	1.353	846
D1	69	109	71	109
D2	754	670	732	650
D3	286	389	286	395
D4	41	19	43	21
S1	1.334	1.312	1.379	1.355
S2	124	34	137	41
<b>Jumlah</b>	<b>4.182</b>	<b>3.450</b>	<b>4.146</b>	<b>3.433</b>

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Sambas (Juni, 2015)

Pendidikan menjadi perhatian pemerintah sebagai upaya untuk menjadi bangsa yang maju. Demikian juga Pemerintah Kabupaten Sambas senantiasa terus berupaya meningkatkan pendidikan di masyarakat.

Tabel II.2.9  
Jumlah Sekolah, Jumlah Siswa/Mahasiswa, Jumlah Guru/Dosen Negeri Dan Swasta

NO	SEKOLAH	Jumlah Sekolah (Unit)				Jumlah Siswa/Mahasiswa (orang)				Jumlah Guru/Dosen (orang)			
		TAHUN				TAHUN				TAHUN			
		2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014
1.	PAUD	260	266	298	383	7.626	21.666	3.111	14.734	596	688	1.375	1.012
2.	TK	69	58	68	71	3.077	2.413	2.543	3.266	239	177	219	278
3.	SLB	1	1	1	1	33	35	-	72435	7	7	7	
4.	SD	403	403	407	406	72.429	72.429	72.354	23.171	4.724	4.152	4.575	4.715
5.	SLTP	101	111	110	113	21.012	21.739	22.82	9028	1.250	1.551	1.711	1.571
6.	SLTA	26	29	29	29	7.426	8.420	9.091	5.217	423	417	693	605
7.	SMK	20	20	21	22	4.281	4.474	4.818		215	399	436	360
8.	Perguruan Tinggi	1	1	1		131	136	-		56		-	
9.	Lembaga Pendidikan Keterampilan	19	14	-		570		-		28		-	
Perguruan Agama :													
1.	RA	4	5	5	5	164	403	359	328	24		32	32
2.	MI	45	44	3	47	6.011	6.383	6.385	6.662	591	614	533	597
3.	MTs	22	21	16	23	2.395	2.412	2.637	3.188	334	334	334	364
4.	MA	7	3	7	7	561	701	701	739	130	134	134	107



5.	Perguruan Tinggi Agama Islam (IAIN/STAIN/ UNIV)	1	1	1	1	809				60			1
6.	Perguruan Tinggi Agama Kristen/ Teologi	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Sambas

## 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

### 2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

#### A. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sambas

##### A.1. PDRB Atas Harga Konstan (ADHK) 2010

Pada tahun 2014 Nilai PDRB Kabupaten Sambas ADHK mengalami peningkatan dibanding tahun 2013. Pada tahun 2013 Nilai PDRB Kabupaten Sambas ADHK tercatat 10.168.111 juta rupiah, sedangkan pada tahun 2014 meningkat menjadi 10.2719.066,90 juta rupiah.

Tabel II.2.10  
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sambas  
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha  
(Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013*)	2014**)
<b>A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan</b>	<b>3.101.807,10</b>	<b>3.260.544,60</b>	<b>3.397.711,90</b>	<b>3.612.102,50</b>	<b>3.733.388,20</b>
1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	2.625.061,70	2.769.643,50	2.873.449,80	3.070.083,00	3.152.528,80
a. Tanaman Pangan	594.832,00	581.841,00	582.603,80	666.130,40	634.345,00
b. Tanaman Hortikultura	647.857,40	702.044,70	724.151,90	740.095,30	795.225,00
c. Tanaman Perkebunan	1.170.636,20	1.253.916,40	1.319.825,20	1.407.929,20	1.447.294,80
d. Peternakan	191.416,50	209.449,10	222.678,50	228.559,40	246.328,90
e. Jasa Pertanian dan Perburuan	20.319,60	22.392,30	24.190,40	27.368,80	29.335,00
2. Kehutanan dan Penebangan Kayu	77.974,80	76.927,20	77.884,40	75.450,10	68.787,80
3. Perikanan	398.770,60	413.973,90	446.377,70	466.569,40	512.071,50
<b>B. Pertambangan dan Penggalian</b>	<b>67.654,60</b>	<b>78.331,80</b>	<b>88.701,10</b>	<b>98.059,80</b>	<b>111.872,10</b>
1. Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	-	-	-	-	-
2. Pertambangan Batubara dan Lignit	-	-	-	-	-
3. Pertambangan Bijih Logam	1.207,60	1.249,30	1.278,10	1.290,80	1.212,00
4. Pertambangan dan Penggalian Lainnya	66.447,00	77.082,40	87.423,00	96.769,00	110.660,10
<b>C. Industri Pengolahan</b>	<b>1.147.221,80</b>	<b>1.200.123,90</b>	<b>1.256.693,10</b>	<b>1.314.963,30</b>	<b>1.375.410,60</b>
1. Industri Batubara dan Pengilangan Migas	-	-	-	-	-
2. Industri Makanan dan Minuman	834.099,80	879.428,60	930.684,70	984.877,90	1.052.866,20
3. Industri Pengolahan Tembakau	-	-	-	-	-
4. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	8.637,30	9.565,80	10.216,80	10.818,90	11.730,20
5. Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	-	-	-	-	-
6. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	46.072,30	46.745,10	45.616,30	43.987,50	40.580,10
7. Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	528	562,8	602,8	617,6	619,8
8. Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	112,5	124,3	119,7	124,9	131,4
9. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	171.296,10	170.134,50	172.388,50	172.017,90	163.485,50
10. Industri Barang Galian bukan Logam	9.729,90	10.053,20	9.661,80	9.843,00	10.002,50
11. Industri Logam Dasar	301,9	265,5	272,7	277,3	260



	12. Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	21.349,20	24.763,00	26.272,90	28.336,30	29.476,40
	13. Industri Mesin dan Perlengkapan	2.780,30	2.908,80	2.843,50	2.922,80	3.076,10
	14. Industri Alat Angkutan	9.823,40	9.936,50	10.381,50	11.535,00	12.779,30
	15. Industri Furnitur	37.403,90	40.208,70	41.958,90	43.908,40	44.610,00
	16. Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	5.087,10	5.427,10	5.673,10	5.695,70	5.793,00
<b>D.</b>	<b>Pengadaan Listrik dan Gas</b>	<b>3.841,50</b>	<b>4.008,00</b>	<b>4.266,40</b>	<b>4.394,70</b>	<b>4.817,10</b>
	1. Ketenagalistrikan	1.531,80	1.566,10	1.713,60	1.700,00	1.972,30
	2. Pengadaan Gas dan Produksi Es	2.309,70	2.441,90	2.552,90	2.694,70	2.844,80
<b>E.</b>	<b>Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang</b>	<b>5.511,00</b>	<b>6.032,80</b>	<b>6.204,90</b>	<b>6.227,90</b>	<b>6.581,90</b>
<b>F.</b>	<b>Konstruksi</b>	<b>500.373,30</b>	<b>557.256,80</b>	<b>624.190,10</b>	<b>705.698,00</b>	<b>798.274,30</b>
<b>G.</b>	<b>Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor</b>	<b>1.512.240,60</b>	<b>1.644.468,30</b>	<b>1.725.099,30</b>	<b>1.837.321,00</b>	<b>1.911.636,10</b>
	1. Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	389.291,30	414.394,50	426.263,80	472.419,60	490.376,70
	2. Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	1.122.949,30	1.230.073,90	1.298.835,50	1.364.901,30	1.421.259,40
<b>H.</b>	<b>Transportasi dan Pergudangan</b>	<b>215.192,50</b>	<b>229.179,10</b>	<b>244.397,40</b>	<b>255.453,80</b>	<b>268.593,30</b>
	1. Angkutan Rel	-	-	-	-	-
	2. Angkutan Darat	141.085,70	149.567,90	159.407,40	168.142,50	177.210,40
	3. Angkutan Laut	19.256,60	20.029,70	21.116,30	21.589,20	22.194,90
	4. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	34.714,60	38.262,90	41.441,60	42.379,40	45.094,70
	5. Angkutan Udara	-	-	-	-	-
	6. Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir	20.135,60	21.318,50	22.432,10	23.342,70	24.093,40
<b>I.</b>	<b>Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum</b>	<b>168.956,70</b>	<b>177.109,10</b>	<b>191.437,00</b>	<b>200.242,70</b>	<b>212.526,40</b>
	1. Penyediaan Akomodasi	19.006,20	20.563,20	22.216,70	23.639,30	25.126,90
	2. Penyediaan Makan Minum	149.950,40	156.545,90	169.220,30	176.603,30	187.399,50
<b>J.</b>	<b>Informasi dan Komunikasi</b>	<b>331.453,90</b>	<b>359.544,90</b>	<b>398.184,30</b>	<b>431.912,80</b>	<b>472.073,30</b>
<b>K.</b>	<b>Jasa Keuangan dan Asuransi</b>	<b>171.297,50</b>	<b>179.941,70</b>	<b>212.089,40</b>	<b>242.899,40</b>	<b>277.602,50</b>
	1. Jasa Perantara Keuangan	82.803,70	87.222,20	112.153,80	137.174,20	163.377,00
	2. Asuransi dan Dana Pensiun	40.795,40	42.249,00	46.128,90	49.931,00	54.049,20
	3. Jasa Keuangan Lainnya	33.831,50	35.919,80	38.059,90	39.250,60	42.658,40
	4. Jasa Penunjang Keuangan	13.867,00	14.550,70	15.746,80	16.543,50	17.518,00
<b>L.</b>	<b>Real Estat</b>	<b>288.226,90</b>	<b>308.978,10</b>	<b>332.340,10</b>	<b>350.316,60</b>	<b>373.636,80</b>
<b>M,N</b>	<b>Jasa Perusahaan</b>	<b>33.867,40</b>	<b>36.106,50</b>	<b>38.280,80</b>	<b>40.568,80</b>	<b>42.484,10</b>
<b>O.</b>	<b>Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib</b>	<b>421.513,10</b>	<b>379.287,80</b>	<b>401.865,70</b>	<b>384.679,80</b>	<b>411.004,30</b>
<b>P.</b>	<b>Jasa Pendidikan</b>	<b>391.252,50</b>	<b>417.229,40</b>	<b>439.444,70</b>	<b>462.612,70</b>	<b>488.348,10</b>
<b>Q</b>	<b>Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial</b>	<b>108.760,40</b>	<b>113.579,60</b>	<b>122.282,60</b>	<b>126.065,20</b>	<b>132.357,80</b>
<b>R,S,T,U</b>	<b>Jasa lainnya</b>	<b>86.577,50</b>	<b>90.818,10</b>	<b>93.267,60</b>	<b>94.592,20</b>	<b>98.459,80</b>
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>8.555.748,20</b>	<b>9.042.540,60</b>	<b>9.576.456,30</b>	<b>10.168.111,00</b>	<b>10.719.066,90</b>

Sumber : Buku Tabel Pokok kabupaten Sambas tahun 2015  
Keterangan : \*) angka sementara \*\*) angka sangat sementara

Struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Sambas masih didominasi lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yaitu sebesar 34,83%. Meskipun peranannya cukup besar, namun selama lima tahun terakhir terus mengalami penurunan. Selain lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, sumbangan terbesar PDRB atas dasar harga konstan tahun 2014 dihasilkan oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 17,83%, kemudian diikuti dengan usaha Industri Pengolahan sebesar 12,83%. Sementara peranan



lapangan usaha lainnya masih dibawah 10 persen.

Tabel II.2.11  
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sambas  
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha

Lapangan Usaha		2010	2011	2012	2013*)	2014**)
<b>A.</b>	<b>Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan</b>	<b>36,25</b>	<b>36,06</b>	<b>35,48</b>	<b>35,52</b>	<b>34,83</b>
	1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	30,68	30,63	30,01	30,19	29,41
	a. Tanaman Pangan	6,95	6,43	6,08	6,55	5,92
	b. Tanaman Hortikultura	7,57	7,76	7,56	7,28	7,42
	c. Tanaman Perkebunan	13,68	13,87	13,78	13,85	13,50
	d. Peternakan	2,24	2,32	2,33	2,25	2,30
	e. Jasa Pertanian dan Perburuan	0,24	0,25	0,25	0,27	0,27
	2. Kehutanan dan Penebangan Kayu	0,91	0,85	0,81	0,74	0,64
	3. Perikanan	4,66	4,58	4,66	4,59	4,78
<b>B.</b>	<b>Pertambangan dan Pengalihan</b>	<b>0,79</b>	<b>0,87</b>	<b>0,93</b>	<b>0,96</b>	<b>1,04</b>
	1. Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	-	-	-	-	-
	2. Pertambangan Batubara dan Lignit	-	-	-	-	-
	3. Pertambangan Bijih Logam	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	4. Pertambangan dan Penggalan Lainnya	0,78	0,85	0,91	0,95	1,03
<b>C.</b>	<b>Industri Pengolahan</b>	<b>13,41</b>	<b>13,27</b>	<b>13,12</b>	<b>12,93</b>	<b>12,83</b>
	1. Industri Batubara dan Pengilangan Migas	-	-	-	-	-
	2. Industri Makanan dan Minuman	9,75	9,73	9,72	9,69	9,82
	3. Industri Pengolahan Tembakau	-	-	-	-	-
	4. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11
	5. Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	-	-	-	-	-
	6. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	0,54	0,52	0,48	0,43	0,38
	7. Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	8. Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	2,00	1,88	1,80	1,69	1,53
	10. Industri Barang Galian bukan Logam	0,11	0,11	0,10	0,10	0,09
	11. Industri Logam Dasar	0,00	0,00	0	0	0
	12. Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	0,25	0,27	0,27	0,28	0,27
	13. Industri Mesin dan Perlengkapan	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	14. Industri Alat Angkutan	0,11	0,11	0,11	0,11	0,12
	15. Industri Furnitur	0,44	0,44	0,44	0,43	0,42
	16. Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05
<b>D.</b>	<b>Pengadaan Listrik dan Gas</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>
	1. Ketenagalistrikan	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	2. Pengadaan Gas dan Produksi Es	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
<b>E.</b>	<b>Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang</b>	<b>0,06</b>	<b>0,07</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>
<b>F.</b>	<b>Konstruksi</b>	<b>5,85</b>	<b>6,16</b>	<b>6,52</b>	<b>6,94</b>	<b>7,45</b>
<b>G.</b>	<b>Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor</b>	<b>17,68</b>	<b>18,19</b>	<b>18,01</b>	<b>18,07</b>	<b>17,83</b>
	1. Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	4,55	4,58	4,45	4,65	4,57
	2. Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	13,13	13,60	13,56	13,42	13,26
<b>H.</b>	<b>Transportasi dan Pergudangan</b>	<b>2,52</b>	<b>2,53</b>	<b>2,55</b>	<b>2,51</b>	<b>2,51</b>
	1. Angkutan Rel	-	-	-	-	-
	2. Angkutan Darat	1,65	1,65	1,66	1,65	1,65
	3. Angkutan Laut	0,23	0,22	0,22	0,21	0,21
	4. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	0,41	0,42	0,43	0,42	0,42
	5. Angkutan Udara	-	-	-	-	-
	6. Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir	0,24	0,24	0,23	0,23	0,22
<b>I.</b>	<b>Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum</b>	<b>1,97</b>	<b>1,96</b>	<b>2,00</b>	<b>1,97</b>	<b>1,98</b>



	1. Penyediaan Akomodasi	0,22	0,23	<b>0,23</b>	0,23	0,23
	2. Penyediaan Makan Minum	1,75	1,73	1,77	1,74	1,75
<b>J.</b>	<b>Informasi dan Komunikasi</b>	<b>3,87</b>	<b>3,98</b>	4,16	<b>4,25</b>	<b>4,40</b>
<b>K.</b>	<b>Jasa Keuangan dan Asuransi</b>	<b>2,00</b>	<b>1,99</b>	<b>2,21</b>	<b>2,39</b>	<b>2,59</b>
	1. Jasa Perantara Keuangan	0,97	0,96	<b>1,17</b>	1,35	1,52
	2. Asuransi dan Dana Pensiun	0,48	0,47	0,48	0,49	0,50
	3. Jasa Keuangan Lainnya	0,40	0,40	0,40	0,39	0,40
	4. Jasa Penunjang Keuangan	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
<b>L.</b>	<b>Real Estat</b>	<b>3,37</b>	<b>3,42</b>	3,47	<b>3,45</b>	<b>3,49</b>
<b>M,N</b>	<b>Jasa Perusahaan</b>	<b>0,40</b>	<b>0,40</b>	<b>0,40</b>	<b>0,40</b>	<b>0,40</b>
<b>O.</b>	<b>Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib</b>	<b>4,93</b>	<b>4,19</b>	<b>4,20</b>	<b>3,78</b>	<b>3,83</b>
<b>P.</b>	<b>Jasa Pendidikan</b>	<b>4,57</b>	<b>4,61</b>	<b>4,59</b>	<b>4,55</b>	<b>4,56</b>
<b>Q</b>	<b>Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial</b>	<b>1,27</b>	<b>1,26</b>	<b>1,28</b>	<b>1,24</b>	<b>1,23</b>
<b>R,S,T,U</b>	<b>Jasa lainnya</b>	<b>1,01</b>	<b>1,00</b>	<b>0,97</b>	<b>0,93</b>	<b>0,92</b>
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Pada tahun 2015 PDRB Kabupaten Sambas Atas Dasar Harga Konstan diperkirakan mencapai 11.248.046,65 juta rupiah, sedangkan tahun 2016 dan tahun 2017 diperkirakan mencapai 11.793.267,44 juta rupiah dan 12.338.488,22 juta rupiah. Berdasarkan hasil proyeksi, kontribusi terbesar dalam PDRB masih berasal dari sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan juga sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

Tabel II.2.12  
Proyeksi Nilai dan Kontribusi Sektor PDRB Kabupaten Sambas  
Berdasarkan lapangan Usaha ADHK 2010 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	2015p)		2016p)		2017p)	
	Nilai (Juta Rupiah)	%	Nilai (Juta Rupiah)	%	Nilai (Juta Rupiah)	%
<b>A</b> Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.905.526,78	34,72	4.066.998,76	34,49	4.228.470,74	34,27
<b>B</b> Pertambangan dan Pengalihan	121.372,79	1,08	132.189,10	1,12	143.005,41	1,16
<b>C</b> Industri Pengolahan	1.430.247,45	12,72	1.487.369,14	12,61	1.544.490,83	12,52
<b>D</b> Pengadaan Listrik dan Gas	4.966,93	0,04	5.200,72	0,04	5.434,51	0,04
<b>E</b> Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.812,77	0,06	7.046,46	0,06	7.280,15	0,06
<b>F</b> Konstruksi	860.431,50	7,65	934.855,88	7,93	1.009.280,25	8,18
<b>G</b> Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.023.646,11	17,99	2.122.810,46	18,00	2.221.974,81	18,01
<b>H</b> Transportasi dan Pergudangan	282.486,20	2,51	295.793,86	2,51	309.101,52	2,51
<b>I</b> Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	223.136,27	1,98	234.163,58	1,99	245.190,89	1,99
<b>J</b> Informasi dan Komunikasi	504.715,85	4,49	540.076,52	4,58	575.437,19	4,66
<b>K</b> Jasa Keuangan dan Asuransi	299.436,40	2,66	326.993,16	2,77	354.549,92	2,87
<b>L</b> Real Estat	394.347,19	3,51	415.563,02	3,52	436.778,85	3,54
<b>M,N</b> Jasa Perusahaan	44.770,23	0,40	46.939,80	0,40	49.109,37	0,40
<b>O</b> Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	394.982,46	3,51	393.419,90	3,34	391.857,34	3,18
<b>P</b> Jasa Pendidikan	511.649,83	4,55	535.607,28	4,54	559.564,73	4,54
<b>Q</b> Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	138.513,24	1,23	144.481,28	1,23	150.449,32	1,22
<b>R,S,T,U</b> Jasa lainnya	101.004,65	0,90	103.758,52	0,88	106.512,39	0,86
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>11.248.046,65</b>	<b>100,00</b>	<b>11.793.267,44</b>	<b>100,00</b>	<b>12.338.488,22</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Bappeda Kabupaten Sambas, Februari 2016.  
Keterangan : p) proyeksi



## A.2. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

Pada tahun 2014 nilai PDRB Kabupaten Sambas Atas Dasar Harga Berlaku mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya mencapai 13.219.423,46 juta rupiah.

Tabel II.2.13  
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sambas  
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha  
(Juta Rupiah)

Lapangan Usaha		2010	2011	2012	2013*)	2014**)
<b>A.</b>	<b>Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan</b>	<b>3.101.807,10</b>	<b>3.483.254,70</b>	<b>3.717.338,40</b>	<b>4.069.988,00</b>	<b>4.410.059,30</b>
	1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	2.625.061,70	2.960.630,30	3.143.524,50	3.471.150,80	3.732.183,40
	a. Tanaman Pangan	594.832,00	638.016,30	703.526,80	814.632,00	860.891,20
	b. Tanaman Hortikultura	647.857,40	740.612,90	778.665,40	857.703,90	969.237,00
	c. Tanaman Perkebunan	1.170.636,20	1.334.954,00	1.394.206,40	1.510.552,80	1.574.040,90
	d. Peternakan	191.416,50	224.057,60	241.567,50	259.310,40	295.922,00
	e. Jasa Pertanian dan Perburuan	20.319,60	22.989,40	25.558,40	28.951,70	32.092,30
	2. Kehutanan dan Penebangan Kayu	77.974,80	81.917,80	87.527,50	89.260,80	84.940,70
	3. Perikanan	398.770,60	440.706,60	486.286,30	509.576,40	592.935,20
<b>B.</b>	<b>Pertambangan dan Penggalian</b>	<b>67.654,60</b>	<b>82.921,60</b>	<b>105.815,70</b>	<b>126.347,10</b>	<b>157.405,50</b>
	1. Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	-	-	-	-	-
	2. Pertambangan Batubara dan Lignit	-	-	-	-	-
	3. Pertambangan Bijih Logam	1.207,60	1.353,10	1.490,40	1.623,40	1.600,00
	4. Pertambangan dan Penggalian Lainnya	66.447,00	81.568,50	104.325,20	124.723,80	155.805,60
<b>C.</b>	<b>Industri Pengolahan</b>	<b>1.147.221,80</b>	<b>1.264.429,60</b>	<b>1.374.360,80</b>	<b>1.510.687,20</b>	<b>1.675.857,90</b>
	1. Industri Batubara dan Pengilangan Migas	-	-	-	-	-
	2. Industri Makanan dan Minuman	834.099,80	936.991,60	1.035.273,40	1.160.080,50	1.326.286,40
	3. Industri Pengolahan Tembakau	-	-	-	-	-
	4. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	8.637,30	10.114,40	11.116,40	12.205,70	13.794,70
	5. Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	-	-	-	-	-
	6. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	46.072,30	48.658,20	49.344,90	48.395,80	45.770,60
	7. Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	528,00	586,10	642,70	687,20	724,90
	8. Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	112,50	123,80	125,40	133,60	137,20
	9. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	171.296,10	177.552,40	180.903,40	182.113,60	173.790,10
	10. Industri Barang Galian bukan Logam	9.729,90	10.717,70	10.493,40	10.832,00	11.197,40
	11. Industri Logam Dasar	301,9	312,3	297,5	272,7	253,3
	12. Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	21.349,20	24.002,70	27.310,30	30.917,80	34.441,10
	13. Industri Mesin dan Perlengkapan	2.780,30	2.869,50	3.194,10	3.552,10	3.993,70
	14. Industri Alat Angkutan	9.823,40	10.355,90	10.487,40	12.251,40	14.264,30
	15. Industri Furnitur	37.403,90	36.537,60	39.098,30	43.043,40	44.798,40
	16. Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	5.087,10	5.607,30	6.073,70	6.201,50	6.406,00
<b>D.</b>	<b>Pengadaan Listrik dan Gas</b>	<b>3.841,50</b>	<b>3.863,30</b>	<b>4.200,70</b>	<b>4.478,20</b>	<b>5.150,80</b>
	1. Ketenagalistrikan	1.531,80	1.297,60	1.317,30	1.264,70	1.565,60
	2. Pengadaan Gas dan Produksi Es	2.309,70	2.565,70	2.883,50	3.213,40	3.585,20
<b>E.</b>	<b>Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang</b>	<b>5.511,00</b>	<b>6.239,40</b>	<b>6.592,00</b>	<b>6.648,20</b>	<b>7.269,50</b>
<b>F.</b>	<b>Konstruksi</b>	<b>500.373,30</b>	<b>599.860,80</b>	<b>714.603,10</b>	<b>868.977,50</b>	<b>1.057.570,10</b>



<b>G.</b>	<b>Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor</b>	<b>1.512.240,60</b>	<b>1.759.036,30</b>	<b>1.881.347,00</b>	<b>2.073.779,80</b>	<b>2.305.491,20</b>
1.	Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	389.291,30	443.066,90	482.258,00	561.622,90	616.502,60
2.	Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	1.122.949,30	1.315.969,50	1.399.089,00	1.512.156,90	1.688.988,60
<b>H.</b>	<b>Transportasi dan Pergudangan</b>	<b>215.192,50</b>	<b>240.818,60</b>	<b>269.379,80</b>	<b>304.392,90</b>	<b>340.263,00</b>
1.	Angkutan Rel	-	-	-	-	-
2.	Angkutan Darat	141085,7	157.862,00	176.069,10	200.485,10	224.360,20
3.	Angkutan Laut	19.256,60	20.637,00	23.793,70	26.258,70	28.725,00
4.	Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	34.714,60	39.857,90	44.239,40	49.257,50	55.766,50
5.	Angkutan Udara	-	-	-	-	-
6.	Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir	20.135,60	22.461,70	25.277,50	28.391,50	31.411,30
<b>I.</b>	<b>Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum</b>	<b>168.956,70</b>	<b>187.001,40</b>	<b>211.874,00</b>	<b>236.393,40</b>	<b>265.764,10</b>
1.	Penyediaan Akomodasi	19.006,20	21.492,10	23.893,30	26.345,70	28.606,60
2.	Penyediaan Makan Minum	149.950,40	165.509,30	187.980,70	210.047,70	237.157,40
<b>J.</b>	<b>Informasi dan Komunikasi</b>	<b>331.453,90</b>	<b>364.861,50</b>	<b>395.143,00</b>	<b>422.955,00</b>	<b>468.269,50</b>
<b>K.</b>	<b>Jasa Keuangan dan Asuransi</b>	<b>171.297,50</b>	<b>190.605,90</b>	<b>233.020,80</b>	<b>282.224,60</b>	<b>334.797,20</b>
1.	Jasa Perantara Keuangan	82.803,70	92.810,30	124.183,80	160.524,10	198.205,20
2.	Asuransi dan Dana Pensiun	40.795,40	44.259,80	49.178,50	54.499,40	60.440,00
3.	Jasa Keuangan Lainnya	33.831,50	37.684,70	41.698,80	47.279,90	54.251,20
4.	Jasa Penunjang Keuangan	13.867,00	15.851,00	17.959,60	19.921,20	21.900,80
<b>L.</b>	<b>Real Estat</b>	<b>288.226,90</b>	<b>321.960,10</b>	<b>367.099,20</b>	<b>414.231,50</b>	<b>459.870,30</b>
<b>M,N</b>	<b>Jasa Perusahaan</b>	<b>33.867,40</b>	<b>38.523,40</b>	<b>42.860,80</b>	<b>47.615,80</b>	<b>52.084,20</b>
<b>O.</b>	<b>Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib</b>	<b>421.513,10</b>	<b>403.437,00</b>	<b>524.829,50</b>	<b>611.432,30</b>	<b>730.936,80</b>
<b>P.</b>	<b>Jasa Pendidikan</b>	<b>391.252,50</b>	<b>446.051,50</b>	<b>502.271,60</b>	<b>572.689,20</b>	<b>650.497,70</b>
<b>Q</b>	<b>Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial</b>	<b>108.760,40</b>	<b>124.291,90</b>	<b>139.341,30</b>	<b>155.260,70</b>	<b>174.422,60</b>
<b>R,S,T,U</b>	<b>Jasa lainnya</b>	<b>86.577,50</b>	<b>96.582,50</b>	<b>101.543,50</b>	<b>111.011,60</b>	<b>123.713,60</b>
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>8.555.748,19</b>	<b>9.613.739,40</b>	<b>10.591.621,25</b>	<b>11.819.113,18</b>	<b>13.219.423,46</b>

Sumber : Buku Neraca Wilayah Kabupaten Sambas 2010-2014

Keterangan : \*) angka sementara \*\*) angka sangat sementara

Sebagai daerah agraris dengan jumlah penduduk bermata pencaharian pokok pertanian sudah sewajarnya dalam struktur perekonomian Kabupaten Sambas didominasi oleh sektor pertanian. Struktur perekonomian Kabupaten Sambas masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan nilai kontribusi sebesar 33,36%, diikuti dengan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 17,44% dan usaha Industri Pengolahan sebesar 12,68%. Sektor pertanian, Kehutanan dan Perikanan merupakan sektor yang paling besar memberikan sumbangan bagi pertumbuhan PDRB Kab Sambas dan selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 peranannya perlahan-lahan terus berkurang.

Tabel. II.2.14  
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sambas Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

Lapangan Usaha		2010	2011	2012	2013*)	2014**)
<b>A.</b>	<b>Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan</b>	<b>36,25</b>	<b>36,23</b>	<b>35,10</b>	<b>34,44</b>	<b>33,36</b>
1.	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	30,68	30,80	29,68	29,37	28,23
a.	Tanaman Pangan	6,95	6,64	6,64	6,89	6,51
b.	Tanaman Hortikultura	7,57	7,70	7,35	7,26	7,33
c.	Tanaman Perkebunan	13,68	13,89	13,16	12,78	11,91



	d. Peternakan	2,24	2,33	2,28	2,19	2,24
	e. Jasa Pertanian dan Perburuan	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
	2. Kehutanan dan Penebangan Kayu	0,91	0,85	0,83	0,76	0,64
	3. Perikanan	4,66	4,58	4,59	4,31	4,49
<b>B.</b>	<b>Pertambangan dan Penggalian</b>	<b>0,79</b>	<b>0,86</b>	<b>1,00</b>	<b>1,07</b>	<b>1,19</b>
	1. Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	-	-	-	-	-
	2. Pertambangan Batubara dan Lignit	-	-	-	-	-
	3. Pertambangan Bijih Logam	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	4. Pertambangan dan Penggalian Lainnya	0,78	0,85	0,98	1,06	1,18
<b>C.</b>	<b>Industri Pengolahan</b>	<b>13,41</b>	<b>13,15</b>	<b>12,98</b>	<b>12,78</b>	<b>12,68</b>
	1. Industri Batubara dan Pengilangan Migas	-	-	-	-	-
	2. Industri Makanan dan Minuman	9,75	9,75	9,77	9,82	10,03
	3. Industri Pengolahan Tembakau	-	-	-	-	-
	4. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	0,10	0,11	0,10	0,10	0,10
	5. Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	-	-	-	-	-
	6. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	0,54	0,51	0,47	0,41	0,35
	7. Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	8. Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	2,00	1,85	1,71	1,54	1,31
	10. Industri Barang Galian bukan Logam	0,11	0,11	0,10	0,09	0,08
	11. Industri Logam Dasar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12. Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	0,25	0,25	0,26	0,26	0,26
	13. Industri Mesin dan Perlengkapan	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	14. Industri Alat Angkutan	0,11	0,11	0,10	0,10	0,11
	15. Industri Furnitur	0,44	0,38	0,37	0,36	0,34
	16. Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05
<b>D.</b>	<b>Pengadaan Listrik dan Gas</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>
	1. Ketenagalistrikan	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
	2. Pengadaan Gas dan Produksi Es	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
<b>E.</b>	<b>Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	<b>0,05</b>
<b>F.</b>	<b>Konstruksi</b>	<b>5,85</b>	<b>6,24</b>	<b>6,75</b>	<b>7,35</b>	<b>8,00</b>
<b>G.</b>	<b>Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor</b>	<b>17,68</b>	<b>18,30</b>	<b>17,76</b>	<b>17,55</b>	<b>17,44</b>
	1. Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	4,55	4,61	4,55	4,75	4,66
	2. Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	13,13	13,69	13,21	12,79	12,78
<b>H.</b>	<b>Transportasi dan Pergudangan</b>	<b>2,52</b>	<b>2,50</b>	<b>2,54</b>	<b>2,58</b>	<b>2,57</b>
	1. Angkutan Rel	-	-	-	-	-
	2. Angkutan Darat	1,65	1,64	1,66	1,70	1,70
	3. Angkutan Laut	0,23	0,21	0,22	0,22	0,22
	4. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	0,41	0,41	0,42	0,42	0,42
	5. Angkutan Udara	-	-	-	-	-
	6. Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir	0,24	0,23	0,24	0,24	0,24
<b>I.</b>	<b>Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum</b>	<b>1,97</b>	<b>1,95</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,01</b>
	1. Penyediaan Akomodasi	0,22	0,22	0,23	0,22	0,22
	2. Penyediaan Makan Minum	1,75	1,72	1,77	1,78	1,79
<b>J.</b>	<b>Informasi dan Komunikasi</b>	<b>3,87</b>	<b>3,80</b>	<b>3,73</b>	<b>3,58</b>	<b>3,54</b>
<b>K.</b>	<b>Jasa Keuangan dan Asuransi</b>	<b>2,00</b>	<b>1,98</b>	<b>2,20</b>	<b>2,39</b>	<b>2,53</b>
	1. Jasa Perantara Keuangan	0,97	0,97	1,17	1,36	1,50
	2. Asuransi dan Dana Pensiun	0,48	0,46	0,46	0,46	0,46
	3. Jasa Keuangan Lainnya	0,40	0,39	0,39	0,40	0,41
	4. Jasa Penunjang Keuangan	0,16	0,16	0,17	0,17	0,17
<b>L.</b>	<b>Real Estat</b>	<b>3,37</b>	<b>3,35</b>	<b>3,47</b>	<b>3,50</b>	<b>3,48</b>
<b>M,N</b>	<b>Jasa Perusahaan</b>	<b>0,40</b>	<b>0,40</b>	<b>0,40</b>	<b>0,40</b>	<b>0,39</b>
<b>O.</b>	<b>Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib</b>	<b>4,93</b>	<b>4,20</b>	<b>4,96</b>	<b>5,17</b>	<b>5,53</b>
<b>P.</b>	<b>Jasa Pendidikan</b>	<b>4,57</b>	<b>4,64</b>	<b>4,74</b>	<b>4,85</b>	<b>4,92</b>



Q R,S,T,U	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,27	1,29	1,32	1,31	1,32
	Jasa lainnya	1,01	1,00	0,96	0,94	0,94
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Buku Neraca Wilayah Kabupaten Sambas 2010-2014  
Keterangan : \*) angka sementara \*\*) angka sangat sementara

Pada tahun 2015 PDRB Kabupaten Sambas Atas Dasar Harga Berlaku diperkirakan mencapai 14.215.113,74 juta rupiah, sedangkan tahun 2016 dan tahun 2017 diperkirakan mencapai 15.372.818,28 juta rupiah dan 16.526.090,62 juta rupiah. Angka ini terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan hasil proyeksi, kontribusi terbesar dalam PDRB masih berasal dari 3 industri Pengolahan.

Tabel II.2.15  
Proyeksi Nilai dan Kontribusi Sektor PDRB Kabupaten Sambas  
Berdasarkan lapangan Usaha ADHB (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	2015p)		2016p)		2017p)		
	Nilai (Juta Rupiah)	%	Nilai (Juta Rupiah)	%	Nilai (Juta Rupiah)	%	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.717.460,80	33,19	5.037.784,58	32,77	5.358.108,36	32,42
B	Pertambangan dan Penggalian	174.907,20	1,23	197.199,96	1,28	219.492,72	1,33
C	Industri Pengolahan	1.785.370,68	12,56	1.915.723,74	12,46	2.046.076,80	12,38
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5.276,92	0,04	5.600,26	0,04	5.923,60	0,04
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.629,76	0,05	8.022,34	0,05	8.414,92	0,05
F	Konstruksi	1.163.330,05	8,18	1.301.681,08	8,47	1.440.032,11	8,71
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.476.752,38	17,42	2.666.876,84	17,35	2.857.001,30	17,29
H	Transportasi dan Pergudangan	368.123,93	2,59	399.495,46	2,60	430.866,99	2,61
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	286.899,92	2,02	311.200,60	2,02	335.501,28	2,03
J	Informasi dan Komunikasi	490.053,99	3,45	529.226,46	3,44	562.398,93	3,40
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	367.974,58	2,59	409.836,38	2,67	451.698,18	2,73
L	Real Estat	500.945,06	3,52	544.500,88	3,54	588.056,70	3,56
M,N	Jasa Perusahaan	56.648,12	0,40	61.200,72	0,40	65.753,32	0,40
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	786.482,55	5,53	869.166,82	5,65	951.851,09	5,76
P	Jasa Pendidikan	706.090,53	4,97	770.603,24	5,01	835.115,95	5,05
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	189.103,34	1,33	205.332,66	1,34	221.561,98	1,34
R,S,T,U	Jasa lainnya	130.496,13	0,92	139.366,26	0,91	148.236,39	0,90
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>14.215.113,74</b>	<b>100,00</b>	<b>15.372.818,28</b>	<b>100,00</b>	<b>16.526.090,62</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Bappeda Kabupaten Sambas, Februari 2016.  
Ket: p) proyeksi

## B. Pertumbuhan Ekonomi

### B.1 Pertumbuhan Menurut Sektor

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari penyajian angka PDRB baik atas dasar harga konstan maupun harga berlaku. Biasanya di dalam menganalisis digunakan PDRB atas dasar harga konstan. Hal ini disebabkan pengaruh naik turunnya harga telah dihilangkan atau dengan kata lain pengaruh inflasi telah diabaikan. Semakin tinggi



kenaikan angka PDRB maka akan semakin tinggi pula pertumbuhan ekonominya demikian pula sebaliknya.

Perekonomian Sambas pada tahun 2014 mengalami perlambatan dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Sambas tahun 2014 mencapai 5,42 persen sedangkan di tahun 2013 sebesar 6,18 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi di tahun 2014 dicapai oleh lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 14,29 persen. Diikuti dengan lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 14,09 persen dan lapangan usaha Konstruksi sebesar 13,12 persen. Sedangkan seluruh lapangan usaha ekonomi lainnya mencatat pertumbuhan yang positif meskipun pertumbuhannya masih dibawah 10 persen.

Tabel II.2.16  
Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sambas Menurut Sektor ADHK 2010 (%)

Lapangan Usaha	2013*	2014**	2015p)	2016p)	2017p)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,31	3,36	4,61	4,13	3,97
B. Pertambangan dan Penggalian	10,55	14,09	8,49	8,91	8,18
C. Industri Pengolahan	4,64	4,60	3,99	3,99	3,84
D. Pengadaan Listrik dan Gas	3,01	9,61	3,11	4,71	4,50
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,37	5,69	3,51	3,43	3,32
F. Konstruksi	13,06	13,12	7,79	8,65	7,96
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,51	4,04	5,86	4,90	4,67
H. Transportasi dan Pergudangan	4,52	5,14	5,17	4,71	4,50
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,60	6,13	4,99	4,94	4,71
J. Informasi dan Komunikasi	8,47	9,30	6,91	7,01	6,55
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	14,53	14,29	7,87	9,20	8,43
L. Real Estat	5,41	6,66	5,54	5,38	5,11
M,N. Jasa Perusahaan	5,98	4,72	5,38	4,85	4,62
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-4,28	6,84	-3,90	-0,40	-0,40
P. Jasa Pendidikan	5,27	5,56	4,77	4,68	4,47
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,09	4,99	4,65	4,31	4,13
R,S,T,U. Jasa lainnya	1,42	4,09	2,58	2,73	2,65
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>6,18</b>	<b>5,42</b>	<b>4,93</b>	<b>4,85</b>	<b>4,62</b>

Sumber : Buku Neraca Wilayah Kabupaten Sambas 2010-2014  
Keterangan : \*) angka sementara \*\*)angka sangat sementara  
p) proyeksi Bappeda Kab Sambas, Februari 2016

Berdasarkan hasil proyeksi, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sambas pada tahun 2015, 2016 dan 2017 masing-masing sebesar 4,93%, 4,85% dan 4,62%.

Grafik II.2.5  
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sambas dan Provinsi Kalimantan Barat (%)  
Tahun 2010 – 2015

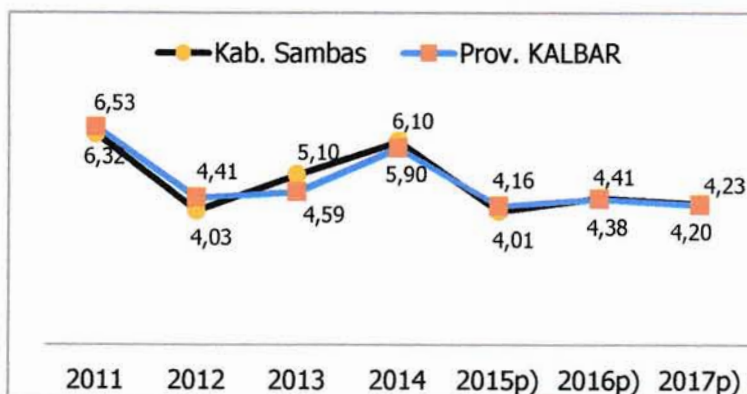


Sumber : Buku Neraca Wilayah Kabupaten Sambas 2010-2014  
Buku Kalimantan Barat Dalam Angka 2015  
p) proyeksi Bappeda Kab Sambas, Februari 2016

### C. Laju Inflasi.

Inflasi menjadi salah satu indikator untuk melihat stabilitas ekonomi suatu daerah, karena dapat menggambarkan naik turunnya harga. Keadaan ekonomi yang makin stabil ditunjukkan oleh perkembangan laju inflasi yang kecil. Suatu daerah dikatakan memiliki stabilitas ekonomi yang lebih stabil jika tingkat inflasinya lebih rendah dibandingkan daerah lain dalam suatu kurun waktu tertentu. Inflasi yang tinggi berarti terjadinya pelonjakan harga yang tajam. Hal ini bisa menunjukkan penurunan daya beli masyarakat. Laju inflasi yang menggambarkan besarnya perubahan harga yang terjadi pada produsen dapat ditunjukkan oleh indeks harga implisit PDRB. Laju inflasi Kabupaten Sambas tahun 2014 sebesar 6,10 persen, naik dibandingkan dengan tahun 2013 yaitu sebesar 5,10 persen. Sedangkan laju inflasi Kalbar pada tahun 2014 yaitu 5,90 persen. Laju inflasi Kabupaten Sambas tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 diperkirakan di bawah 5 persen.

Grafik II.2.6  
Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Sambas Dan Provinsi Kalimantan Barat  
Tahun 2011 -2017<sup>p)</sup>



Sumber : Buku Neraca Wilayah Kabupaten Sambas 2010-2014  
Keterangan : \*) angka sementara \*\*)angka sangat sementara  
p) proyeksi Bappeda Kab Sambas, Februari 2016



#### D. PDRB Perkapita

Tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah dapat diukur salah satunya dengan pendapatan regional per kapita dalam hal ini PDRB per kapita. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku pada tahun 2014 sebesar 25.427.493,78 juta rupiah dengan pertumbuhan sebesar 10,92 persen. Sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga konstan di tahun 2014 sebesar 20.618.070,72 juta rupiah dengan pertumbuhan sebesar 4,54 persen. PDRB per kapita baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 diperkirakan mengalami kenaikan. Pertumbuhan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 diperkirakan diatas 6,5 persen sedangkan pertumbuhan PDRB per kapita atas dasar harga konstan diperkirakan diatas 3,5 persen.

Secara keseluruhan perkembangan PDRB per kapita ADHB dan ADHK dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II.2.17  
Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Sambas Tahun 2010 – 2017<sup>p)</sup>

TAHUN	PDRB PER KAPITA HARGA BERLAKU		PDRB PER KAPITA HARGA KONSTAN 2010	
	NILAI (Juta Rp.)	PERTUMBUHAN (%)	NILAI (Jutaan RP)	PERTUMBUHAN (%)
2010	17.194.857,04	-	17.194.857,04	-
2011	19.131.971,99	11,27	17.995.248,92	4,65
2012	20.804.680,53	8,74	18.810.634,23	4,53
2013	22.924.317,26	10,19	19.722.038,21	4,85
2014	25.427.493,78	10,92	20.618.070,72	4,54
2015 p)	27.173.949,75	6,87	21.440.134,82	3,99
2016 p)	29.199.711,62	7,45	22.297.456,48	4,00
2017 p)	31.225.473,50	6,94	23.154.778,15	3,84

Sumber : Buku Neraca Wilayah Kab. Sambas 2010-2014

Keterangan :\*) angka sementara\*\*) angka sangat sementara

p) proyeksi Bappeda Kabupaten Sambas, Februari 2016.

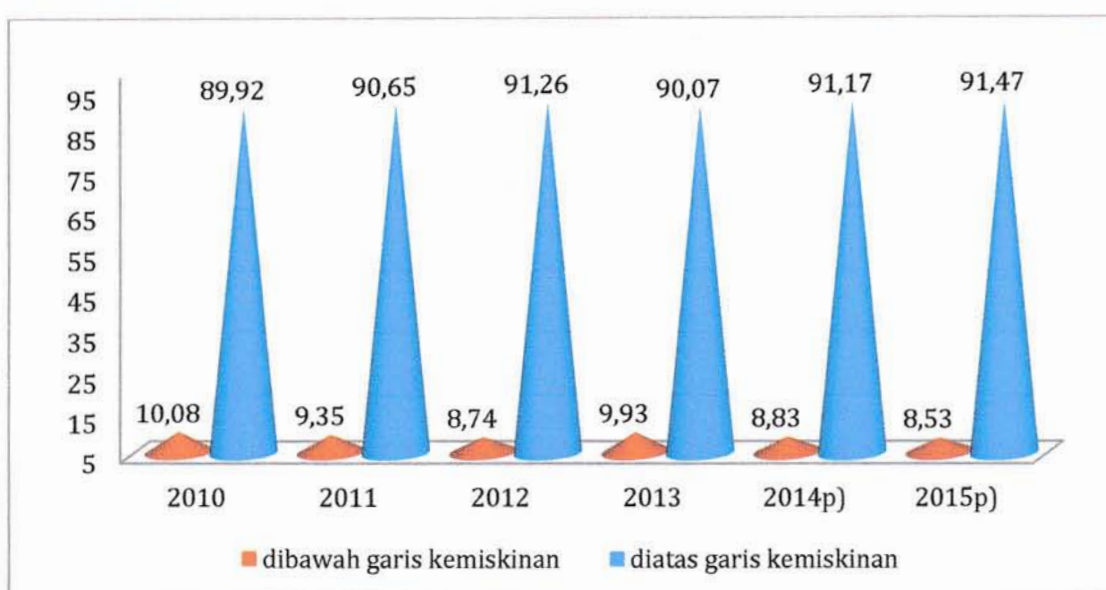
#### E. Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan

Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Sambas, pada tahun 2014 tercatat jumlah penduduk miskin 49.260 orang (9,46%), jumlah ini berkurang jika dibandingkan dengan tahun 2013 sebanyak 51.200 orang, namun masih tinggi jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin ditahun 2012 sebanyak 44.500 orang. Garis kemiskinan di Kabupaten Sambas sebesar Rp. 314.144 per kapita per bulan.

Tabel II.2.18  
Indikator Kemiskinan Di Kabupaten Sambas  
Tahun 2008– 2014

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	Indeks Kedalaman Kemiskinan P1	Indeks Keparahan Kemiskinan P2
2014	49.260	9,46	314.144		
2013	51.200	9,93	278.704	1,58	0,39
2012	44.500	8,74	266.047	1,12	0,22
2011	47.000	9,35	232.581	1,50	0,37
2010	50.000	10,08	203.325	1,43	0,30
2009	53.820	9,96	184.496	1,36	0,28
2008	61.520	11,51	163.773	2,19	0,67

Sumber : BPS Kab. Sambas



Sumber : BPS Kab. Sambas

Keterangan : p) proyeksi Bappeda Kab. Sambas, Januari 2015

Grafik II.2.7  
Persentase Penduduk di Bawah Dan Di Atas Garis Kemiskinan  
Kabupaten Sambas Tahun 2010 – 2015

Selama kurun waktu 2010 sampai 2015 persentase penduduk di atas garis kemiskinan meningkat, pada tahun 2010 sebanyak 89,92 %, ditahun 2015 diproyeksi menjadi 91,47%. Sementara itu, persentase penduduk di bawah garis kemiskinan mengalami penurunan dari tahun 2010 sebesar 10,08 % dari total penduduk Kabupaten Sambas diperkirakan menjadi 8,53% pada tahun 2015.

## F. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Pada tahun 2015 sampai dengan bulan Juni, jumlah perkara pidana yang dilaporkan sebanyak 146 kasus dan perkara pidana terselesaikan sebanyak 126 kasus, jumlah perkara perdata yang dilaporkan sebanyak 26 kasus dan perkara perdata terselesaikan 17 kasus, jumlah perkara lalu lintas yang dilaporkan sama dengan jumlah perkara lalu lintas yang



terselesaikan yaitu sebanyak 1.020 kasus.

Untuk lebih jelasnya Jumlah Kasus Pelanggaran Hukum, Keamanan Ketertiban Masyarakat dan Kelembagaan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel II.2.19  
Jumlah Kasus Pelanggaran Hukum, Jumlah Perkara Terselamatkan dan Keamanan Ketertiban Masyarakat Serta Kelembagaan

JENIS DATA	2013	2014	2015
<b>1. Perkara hukum</b>			
<b>Jumlah Perkara dilaporkan (Perkara)</b>			
- Pidana	232	78 (S)	146
- Perdata	21	10 (S)	26
- Politik dan HAM	-	-	-
- Lalu lintas	2.389	1.038 (S)	1.020
- Perlindungan Perempuan dan Anak	34	13 (S)	
<b>Jumlah Perkara Terselamatkan (Perkara)</b>			
- Pidana	240	48 (S)	126
- Perdata	20	10 (S)	17
- Politik dan HAM	-	-	-
- Lalu lintas	2.389	1.038 (S)	1.020
- Perlindungan Perempuan dan Anak	34	13 (S)	40
<b>Jumlah Perkara Tidak Terselamatkan (Perkara)</b>			
- Pidana	17	30 (S)	28
- Perdata	10	10 (S)	18
- Politik dan HAM	-	-	-
- Lalu lintas	-	-	0
- Perlindungan Perempuan dan Anak	26	7 (S)	1
<b>2. Jumlah Kasus Tanah Yang Diselesaikan</b>	7	-	0
<b>3. Kelembagaan (Buah)</b>			
- Jumlah Pengadilan Agama	1	1	1
- Jumlah Pengadilan Negeri	1	1	1
- Jumlah Pengadilan Tata Usaha Negara	-	-	-
- Jumlah Lembaga Masyarakat	1	1	1
- Jumlah Kejaksaan Negeri	1	1	2
<b>4. Jumlah Tindak Kriminal</b>			
- Jumlah Kasus Narkoba	9	5	8
- Jumlah Kasus Pembunuhan	-	1	0
- Jumlah Kasus Seksual	33	4	1
- Jumlah Kasus Penganiayaan	15	10	6
- Jumlah Kasus Pencurian	41	11	14
- Jumlah Kasus Penipuan	7	1	1
- Jumlah Kasus Pemalsuan Uang	2	-	0
<b>5. Jumlah Tindak Kriminal yang Tertangani</b>	240	48 (S)	165
<b>6. Aparat dan Sarana Keamanan</b>			
- Jumlah Aparat Keamanan (Polisi) (Orang)	735	735	735
- Jumlah Aparat Pamong Praja (Orang)	109	111	86
- Jumlah Aparat Linmas (Orang)	2.948	3.139	3.139
- Jumlah Pos Keamanan (Polisi) (Orang)	111	35	35
- Jumlah Polisi Hutan (Orang)	18	18	18
- Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran (Unit)	12	12	15

JENIS DATA	2013	2014	2015
- Jumlah Pos Pemadam Kebakaran (Unit)	12	12	13
- Jumlah Pos Siskamling (Unit)	190	225	225
- Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat	2.948	3.139	3.065
7. Jumlah Kejadian Kebakaran	27	7	10
8. Jenis Produk Hukum/Penegakan			
- Peraturan Daerah	8	8	4
- Peraturan Bupati	46	57	23
- Keputusan Bupati	644	989	534

Sumber : Kantor Kesbangpolinmas (Juni 2015)  
 Bagian Hukum dan Perundang-Undangan (Juni 2015)  
 Pengadilan Negeri Sambas (Juni 2015)

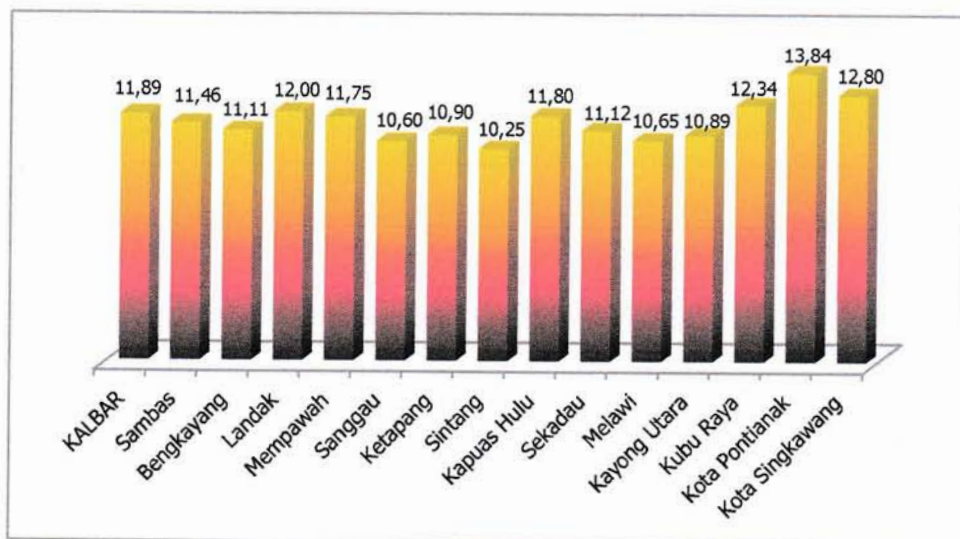
### 2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

#### A. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)

Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun keatas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

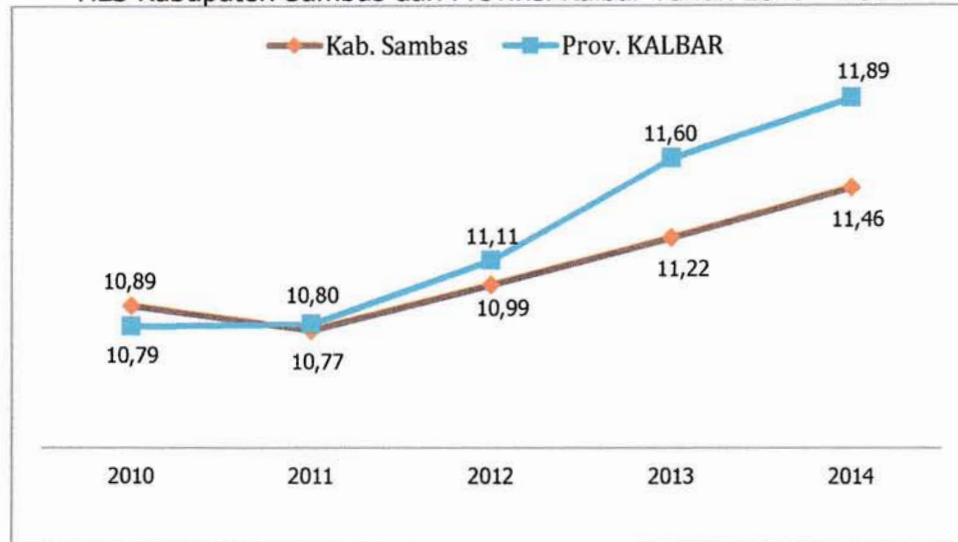
Angka Harapan Lama Sekolah Kab. Sambas tahun 2014 yaitu 11,46 tahun, angka ini masih rendah jika dibandingkan dengan Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Kalbar yaitu 11,89 tahun. Namun Angka Harapan Lama Sekolah Kab. Sambas lebih tinggi jika dibandingkan dengan Kab. Bengkayang, Kab. Sanggau, Kab. Ketapang, Kab. Sintang, Kab. Sekadau, Kab. Melawi dan Kab. Kayong Utara.

Grafik II.2.8  
 HLS Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalbar Tahun 2014





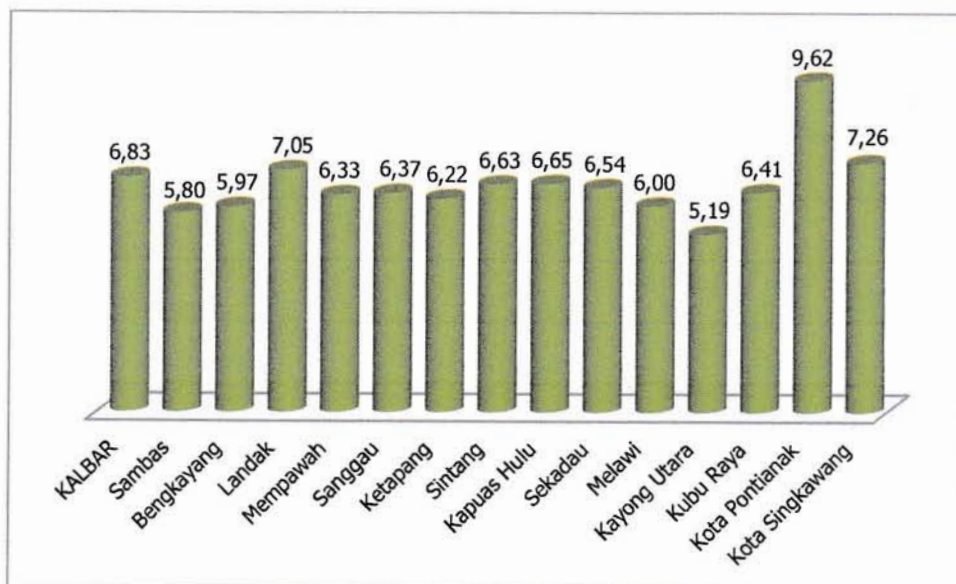
Grafik II.2.9  
HLS Kabupaten Sambas dan Provinsi Kalbar Tahun 2010 – 2014



### B. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

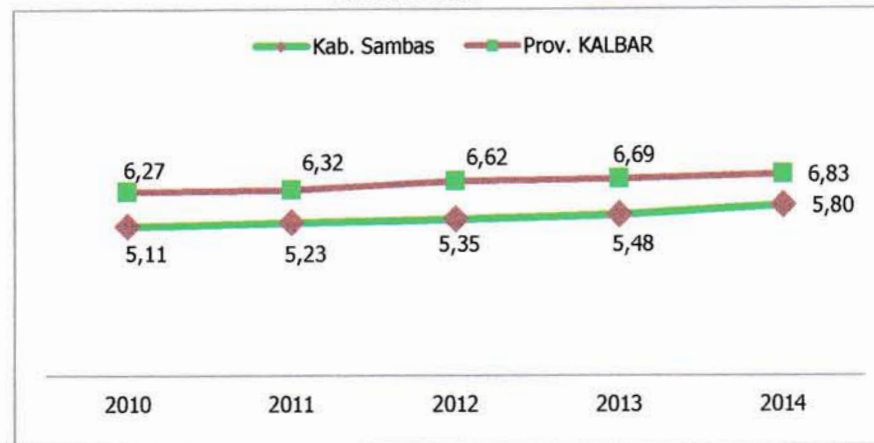
Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal, rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun keatas.

Di tahun 2014, rata-rata lama sekolah tertinggi berada di Kota Pontianak yaitu 9,62 tahun; diikuti Kota Singkawang 7,26 tahun; Kabupaten Landak 7,05 tahun dan Kabupaten Kapuas Hulu 6,65 tahun. Sementara angka terendah berada di Kabupaten Kayong Utara yaitu 5,19 tahun. Kabupaten Sambas menduduki urutan ke 13 dari 14 kab/kota di Provinsi Kalimantan Barat untuk rata-rata lama sekolah, hanya 5,80 tahun.



Grafik II.2.10

Rata-Rata Lama sekolah Menurut Kabupaten di Provinsi Kalbar Tahun 2014

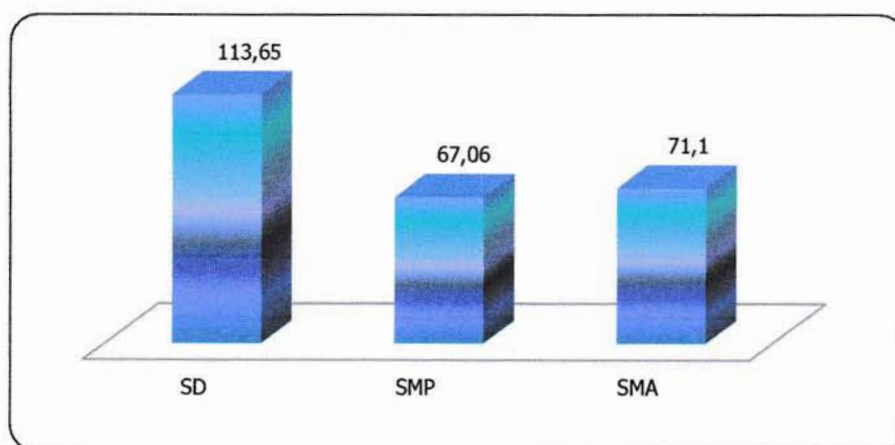


Grafik II.2.11  
Rata-Rata Lama sekolah Kabupaten Sambas dan Provinsi Kalbar Tahun 2014

Selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Sambas maupun penduduk Provinsi Kalimantan Barat mengalami peningkatan relatif lambat. Rata-rata lama sekolah Provinsi Kalimantan Barat ditahun 2014 sebesar 6,83 tahun naik dari tahun 2013 yang hanya 6,69 tahun. Begitu pula rata-rata lama sekolah untuk Kabupaten Sambas naik dari 5,48 tahun pada tahun 2013 menjadi 5,80 tahun di tahun 2014.

### C. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Salah satu indikator di bidang pendidikan adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) dimana indikator ini mengukur proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK memberikan gambaran secara umum tentang banyaknya anak yang sedang/telah menerima pendidikan pada jenjang tertentu. APK biasanya diterapkan untuk jenjang pendidikan SD, SLTP dan SLTA. Dengan kata lain APK memberikan gambaran daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.



Sumber : Buku Analisis Kependudukan Kab. Sambas 2014



Grafik II.2.12  
Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Sambas Tahun 2014

Pada tahun 2014, APK jenjang pendidikan SD di kabupaten Sambas sebesar 113,65. Artinya dari 100 penduduk usia 7 – 12 tahun (usia sekolah SD) sekitar 114 murid berstatus murid SD. Untuk tingkat SLTP, APK Kabupaten Sambas mencapai 67,06. Kondisi tersebut dapat diartikan dari 100 penduduk usia 13 – 15 tahun (usia sekolah SLTP) sekitar 68 orang yang berstatus murid SLTP. Pada tingkat pendidikan SLTA memiliki APK 71,10 yang berarti dari 100 penduduk usia 16 – 18 (usia sekolah SLTA) sekitar 71 orang berstatus murid SLTA.

**D. Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan (Ijazah Yang Dimiliki)**

Hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2014 menunjukkan sekitar 36,71 persen penduduk usia 10 tahun ke atas di Kabupaten Sambas yang tidak memiliki ijazah SD dan sekitar 27,82 persen memiliki ijazah SD/SDLB/MI. Penduduk perempuan usia 10 tahun ke atas di Kabupaten Sambas yang tidak memiliki ijazah SD yaitu sekitar 37,02 persen sedangkan penduduk laki-laki sekitar 36,43 persen yang tidak memiliki ijazah SD.

Hasil Susenas 2014 juga menunjukkan sekitar 18,52 persen penduduk usia 10 tahun ke atas di Kabupaten Sambas yang memiliki ijazah SMP/SMPLB/MTs. Sekitar 13,18 persen telah menamatkan atau memiliki ijazah SMA/SMALB/MA/SMK. Sedangkan penduduk usia 10 tahun ke atas di Kabupaten Sambas yang memiliki ijazah DI/II/III/S1/S2/S3 sebanyak 3,24 persen. Kesadaran masyarakat untuk mengikuti program paket A/B/C tampaknya masih sangat rendah sehingga jumlah penduduk yang memiliki ijazah paket A/B/C hanya dibawah 1 persen. Hal yang kiranya perlu mendapat perhatian adalah semakin tinggi jenjang atau tingkat pendidikan ternyata juga semakin sedikit jumlah penduduk yang mampu menamatkannya.

Tabel II.2.20  
Persentase Penduduk 10 Tahun Ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki di Kabupaten Sambas Tahun 2014

Jenis Kelamin	Tdk Punya Ijazah SD	SD/SD LB/MI	Paket A	SMP/S MPLB/ MTs	Paket B	SMA/SM ALB/MA/ SMK	Paket C	DI/II/III /S1/S2/ S3	Jumlah
Laki-laki	36,43	27,99	0,23	18,64	0,00	13,47	0,00	3,24	100,00
Perempuan	37,02	27,63	0,16	18,42	0,32	12,87	0,35	3,23	100,00
Total	36,71	27,82	0,20	18,52	0,16	13,18	0,17	3,24	100,00

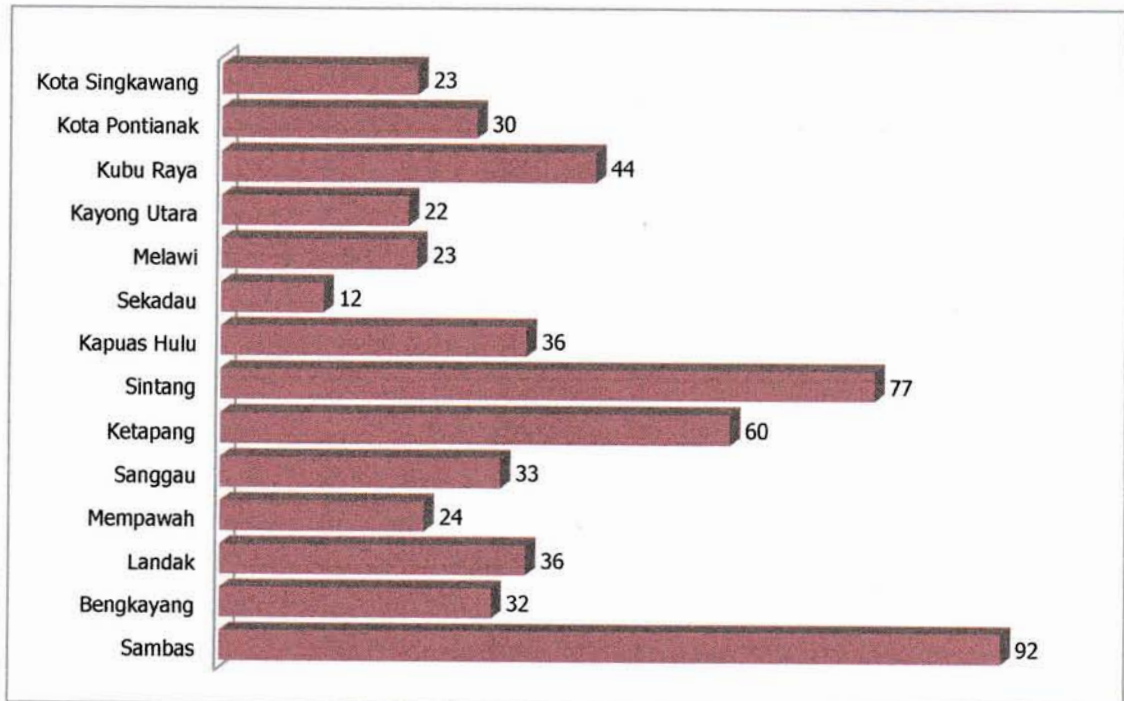
Sumber : Buku Analisis Kependudukan Kab. Sambas 2014 (Susenas, 2014)

### E. Angka Kematian Bayi

Tingkat mortalitas bayi disamping dipengaruhi oleh faktor intern seperti kondisi ibu hamil dan menyusui serta bayi, juga faktor ekstern. Penyebab faktor intern antara lain kekurangan gizi waktu ibu hamil akan cenderung melahirkan bayi yang *malnutrisi*, kelainan fisik, dan gangguan mental pada bayi. Persoalannya cenderung bertambah rumit apabila si-ibu juga menderita suatu penyakit kronis saat hamil misalnya beban mental akibat depresi berkepanjangan. Dampak buruk lain pada bayi juga ditentukan oleh faktor usia ibu yang terkadang mempengaruhi keselamatan bayi saat dilahirkan.

Mengenai faktor ekstern utamanya disebabkan oleh pertolongan saat proses persalinan yaitu mengenai cara, oleh siapa, proses persalinan ditangani. Masyarakat tradisional cenderung masih menggunakan peralatan sederhana, sehingga memungkinkan terjadinya infeksi (*tetanus*) pada bayi. Tetanus biasa terjadi pada saat pemotongan tali pusar (*placenta*), dan relatif banyak ditemukan di negara-negara berkembang. Guna menekan angka kematian bayi (AKB) akibat infeksi, maka pemerintah mensosialisasikan program pelatihan para dukun bayi tentang cara penanganan proses persalinan yang sesuai kaidah/ standar medis.

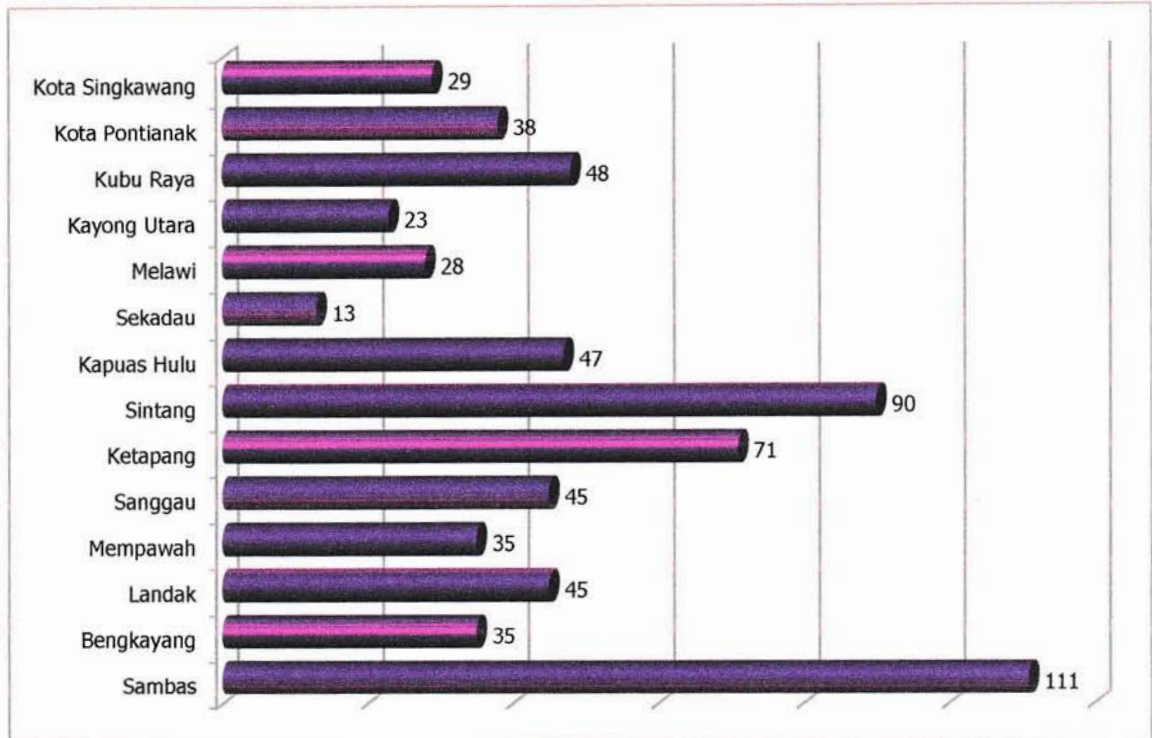
Grafik II.2.13  
Jumlah Kasus Kematian Neonatal Yang Terlaporkan  
di Prov Kalbar Tahun 2014



Sumber : Buku Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2014

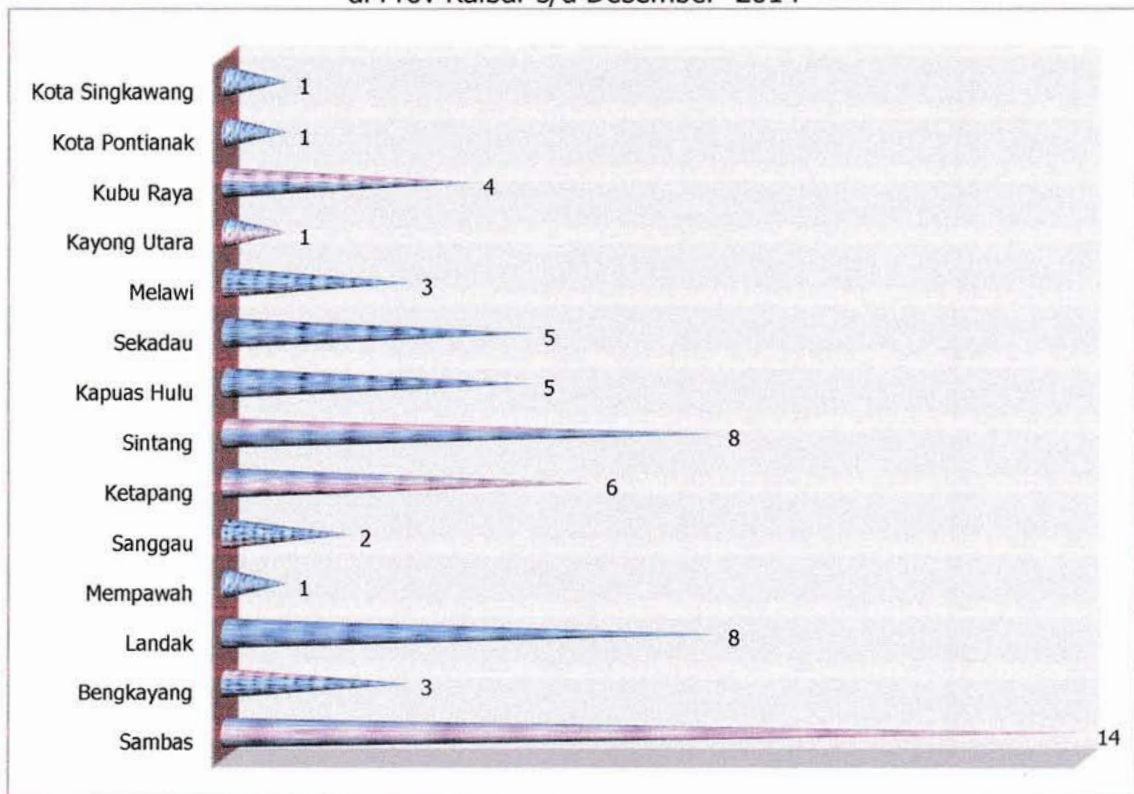


Grafik II.2.13  
Jumlah Kasus Kematian Neonatal Yang Terlaporkan  
di Prov Kalbar Tahun 2014



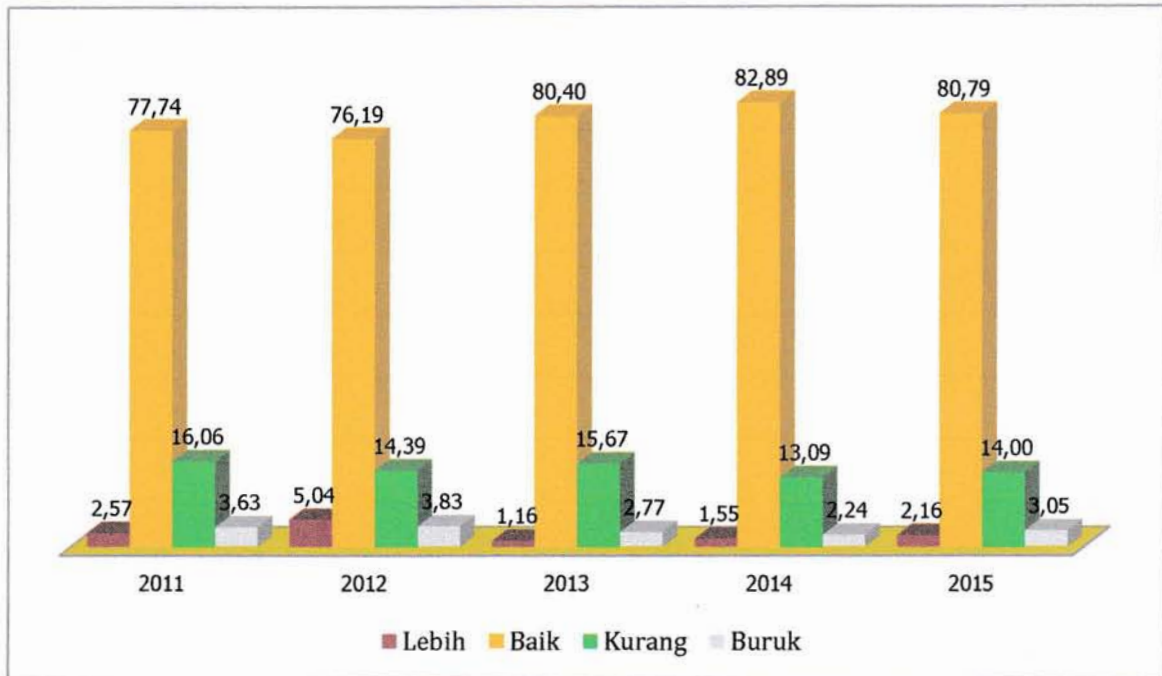
Sumber : Buku Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2014

Grafik II.2.14  
Kasus Kematian Bayi (29 hari – 11 Bln) Yang Terlaporkan  
di Prov Kalbar s/d Desember 2014



Sumber : Buku Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2014

Grafik II.2.15  
Kasus Kematian Anak Balita (12-59 Bln) Yang Terlaporkan  
di Prov Kalbar s/d Desember 2014



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Sambas

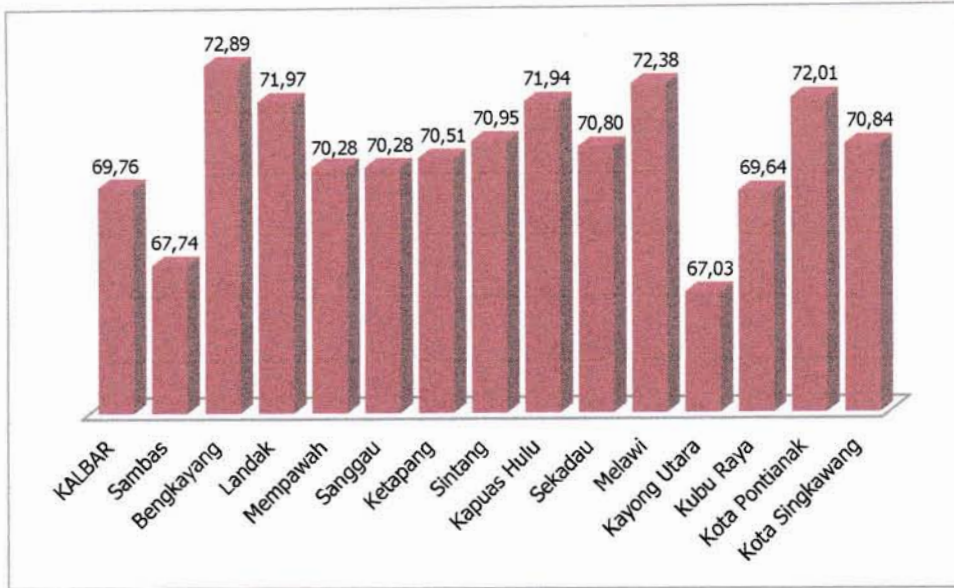
Grafik II.2.16  
Perkembangan Status Gizi Balita di Kabupaten Sambas  
2011 - 2015

#### F. Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH)

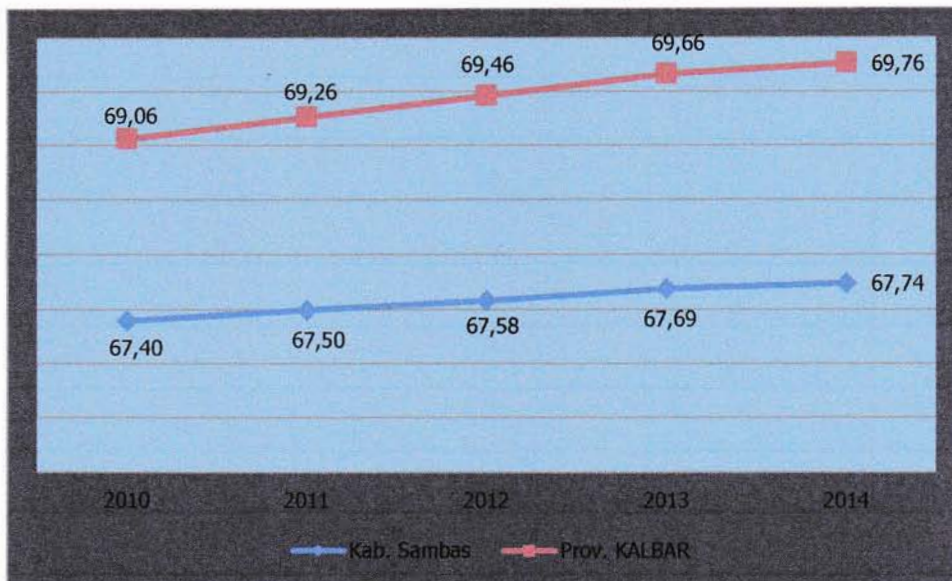
Angka Harapan Hidup saat Lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. AHH dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan.

Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Sambas tahun 2014 yaitu 67,74 tahun, meningkat di banding tahun sebelumnya yaitu 67,69 tahun. AHH tertinggi berada di Kabupaten Bengkayang yaitu 72,89 tahun dan AHH terendah berada di Kabupaten Kayong Utara yaitu 67,03 tahun.





Grafik II.2.17  
AHH (Tahun) Menurut Kabupaten Di Provinsi Kalbar  
Tahun 2014



Grafik II.2.18  
AHH Kab. Sambas dan Prov Kalbar  
Tahun 2010- 2014

### G. Partisipasi Angkatan Kerja

Salah satu sumber informasi yang menyajikan data ketenagakerjaan adalah Survey Angkatan kerja nasional (Sakernas). Berdasarkan Sakernas tahun 2014 penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Sambas yang bekerja adalah sebanyak 262.979 orang dari total penduduk usia 15 tahun ke atas.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah angkatan kerja (penduduk yang bekerja dan mencari pekerjaan) dibandingkan dengan penduduk usia 15 tahun ke atas atau persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Tinggi rendahnya

partisipasi angkatan kerja cenderung dipengaruhi oleh umur, jenis kelamin dan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan<sup>1</sup>. Berdasarkan usianya, TPAK penduduk usia muda biasanya rendah karena pada kelompok usia tersebut umumnya banyak yang menjalani proses pendidikan dan merasa belum memiliki kewajiban untuk mencari nafkah. TPAK kabupaten Sambas tahun 2014 sebesar 76,56 persen, artinya dari penduduk usia 15 tahun ke atas sekitar 77 persen diantaranya termasuk angkatan kerja.

Tahun 2014, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Sambas sekitar 3,70 persen dari total angkatan kerja. Untuk penduduk usia 15 tahun ke atas yang termasuk bukan angkatan kerja terdiri dari penduduk yang masih bersekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya seperti pensiunan dan jompo.

Tabel II.2.21  
Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas Menurut Kegiatan Terbanyak di Kabupaten Sambas Tahun 2012 - 2014

No	Kegiatan	2012	2013	2014
1.	Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas	336.040	333.453	356.687
	Angkatan Kerja	258.379	246.525	273.076
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	76,89	73,93	76,56
	Bekerja	250.333	239.044	262.979
	Pengangguran Terbuka	8.046	7.481	10.097
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,11	3,03	3,70
2.	Bukan Angkatan Kerja	77.661	86.928	83.611
	Sekolah	22.495	20.885	27.284
	Mengurus Rumah Tangga	42.325	42.639	40.274
	Lainnya	12.841	23.404	16.053

Sumber : Buku Tabel Pokok Kab Sambas (Sakernas 2012 - 2014)

### 2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Jumlah suku etnis dominan di Kabupaten Sambas tahun 2015 sebanyak 3 etnis. Jumlah situs bersejarah ada 26 buah. Jumlah organisasi kepemudaan sebanyak 192 organisasi, jumlah obyek wisata tahun 2015 sebanyak 47 buah.

Tabel II.2.19  
Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, dan Pariwisata

JENIS DATA	2014	2015	Satuan
<b>Kebudayaan :</b>			
- Jumlah suku etnis dominan	3	3	Etnis
- Jumlah bahasa daerah dominasi	3	3	Bahasa
- Jumlah situs bersejarah	26	26	Situs
- Jumlah Tokoh/pemangku adat	10	10	Orang
<b>Pemuda dan Olahraga :</b>			
- Organisasi Kepemudaan	192	192	Buah
- Jumlah Organisasi Olahraga	28	29	Buah
- Jumlah gelanggang olahraga	357	357	Buah
<b>Pariwisata :</b>			

<sup>1</sup> Hera Susanti, Moh. Ikhsan dan Widyanti, Indikator-indikator makro Ekonomi, LPUI 1995.



- Jumlah obyek wisata	47	47	Buah
- Jumlah hotel non bintang	29	29	Buah
- Jumlah kamar hotel/penginapan	550	550	Unit
- Tempat hiburan / rekreasi			
Bahari	22	22	Unit
Non Bahari	20	20	Unit
Budaya	5	5	Unit

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sambas (Juli 2015)

### 2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

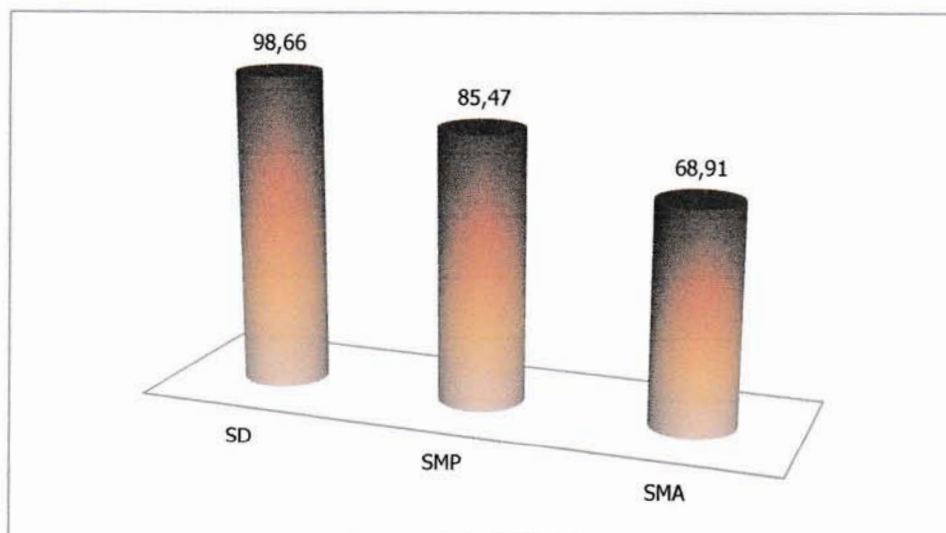
#### 2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

##### A. Urusan Pendidikan

##### A.1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

APS mengukur proporsi anak yang bersekolah pada suatu kelompok umur sekolah jenjang pendidikan tertentu. Indikator ini memberikan gambaran secara umum tentang banyaknya anak kelompok umur tertentu yang sedang bersekolah tanpa memperhatikan jenjang pendidikan yang sedang diikuti.

Berdasarkan data Susenas 2014, APS pada jenjang pendidikan SD di Kabupaten Sambas sebesar 98,66 % artinya dari total penduduk usia 7-12 tahun terdapat sekitar 99% yang masih bersekolah. APS pada jenjang pendidikan SMP sebesar 85,47 %, artinya dari total penduduk usia 13-15 tahun terdapat 85% yang masih sekolah. APS pada jenjang pendidikan SMA sebesar 68,91 %, artinya dari total penduduk usia 16-18 tahun terdapat 69% yang masih sekolah. Hal yang kiranya perlu mendapat perhatian adalah, semakin tinggi jenjang atau tingkat pendidikan, ternyata semakin sedikit jumlah partisipasi penduduk yang bersekolah.



Sumber : Susenas 2014

Grafik II.2.19  
Angka Partisipasi Sekolah Jenjang SD, SMP dan SMA  
Di Kabupaten Sambas Tahun 2014

APM menunjukkan proporsi anak sekolah pada suatu kelompok umur tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. APM selalu lebih rendah dibanding APK karena pembilangnya lebih kecil (sementara penyebutnya sama). APM membatasi usia murid sesuai dengan jenjang pendidikan sehingga angkanya lebih kecil karena beberapa factor diantaranya menunda saat mulai bersekolah, murid tidak naik kelas, berhenti/keluar dari sekolah untuk sementara waktu, dan lulus lebih awal.

Indikator ini juga menggambarkan kekonsistenan antara umur penduduk dengan pendidikan yang disarankan untuk usia yang bersangkutan. Menurut hasil Susenas tahun 2014, APM SD di Kabupaten Sambas sebesar 96,87 % yang berarti dari 100 penduduk usia 7-12 tahun sekitar 97 orang merupakan murid SD yang berusia 7-12 tahun (jenjang usia SD). APM untuk jenjang pendidikan SMP dan SMA masing-masing sebesar 57,13 % dan 58,08 %.



Sumber : Susenas 2014

Grafik II.2.20  
Perkembangan APM menurut Jenjang Pendidikan  
Di Kabupaten Sambas Tahun 2014

### 2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

Dalam hal penanaman modal yang dilakukan pihak swasta di Kabupaten Sambas khususnya terkait dengan investasi PMDN dan PMA, beberapa tahun sebelumnya upaya peningkatan investasi masih berhadapan dengan berbagai persoalan misalnya terbatasnya ketersediaan infrastruktur, belum optimalnya informasi penanaman modal daerah, dan terbatasnya profil investasi komoditi unggulan daerah. Implikasinya adalah bahwa secara keseluruhan realisasi investasi swasta di Kabupaten Sambas belum optimal sebagaimana yang diharapkan.

Pada tahun 2014 Total rencana investasi Kabupaten Sambas sebesar Rp. 12.125.276.976.283,- yang terdiri dari rencana investasi PMA sebesar Rp. 3.859.945.851.662,- dan PMDN sebesar Rp. 8.265.331.124.621,-. Adapun total



realisasi investasi sebesar Rp 4.366.088.710.567,- yang terdiri dari realisasi investasi PMA sebesar Rp. 1.279.747.383.479,- dan realisasi PMDN sebesar Rp. 3.086.341.327.088,-.

Tabel II.2.23  
 Nilai Rencana dan Realisasi Investasi PMA dan PMDN  
 Di Kabupaten Sambas Tahun 2015

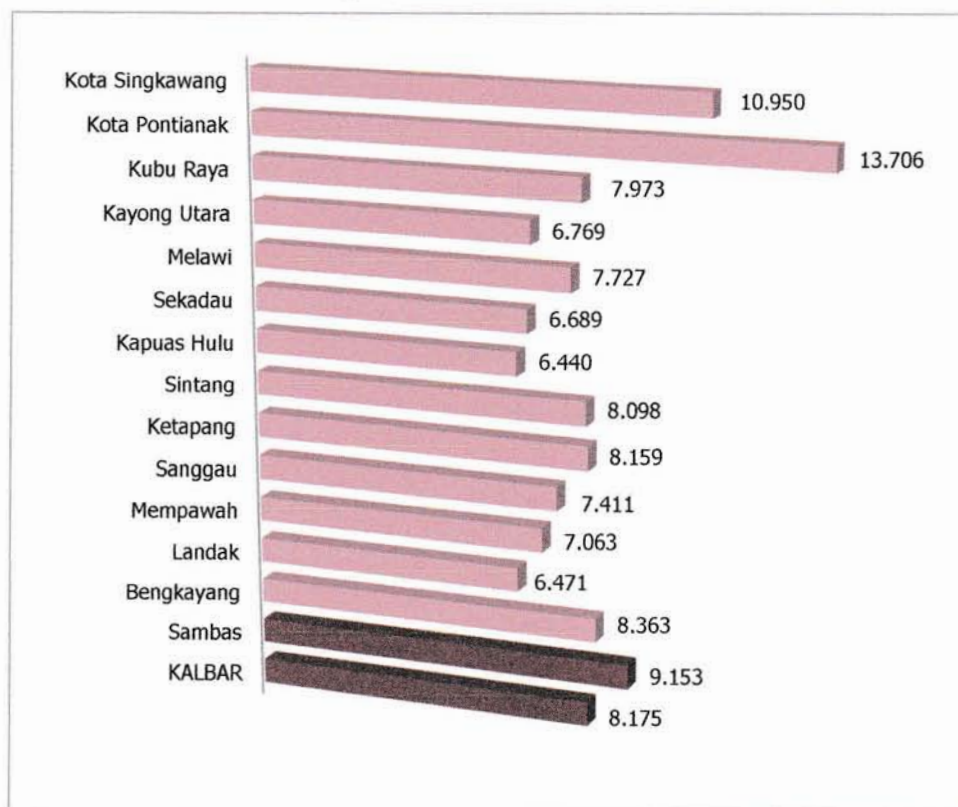
No	KLASIFIKASI	JUMLAH
<b>Rencana Investasi</b>		
1.	Penanaman Modal Asing (PMA)	Rp. 3.859.945.851.662,-
2.	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Rp. 8.265.331.124.621,-
	<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 12.125.276.976.283,-</b>
<b>Realisasi Investasi</b>		
1.	Penanaman Modal Asing (PMA)	Rp. 1.279.747.383.479,-
2.	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Rp. 3.086.341.327.088,-
	<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 4.366.088.710.567,-</b>

Sumber : BPMPT Kab. Sambas (Agustus, 2015)

## 2.1.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

### 2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

#### A. Pengeluaran Riil Per Kapita



Sumber : BPS Kab. Sambas

Grafik II.2.21  
 Pengeluaran Riil Per Kapita Yang Disesuaikan (PPP)  
 Menurut Kabupaten di Provinsi Kalbar Tahun 2014  
 (Ribu Rupiah)

Tahun 2014 pengeluaran riil per kapita Kabupaten Sambas sebesar 9.153 ribu rupiah naik dari tahun 2013 yaitu 9.083 ribu rupiah. Sedangkan pengeluaran riil per kapita Provinsi Kalimantan Barat tahun 2014 sebesar 8.175 rupiah. Dengan kata lain, pengeluaran per kapita masyarakat Kabupaten Sambas diatas pengeluaran per kapita Provinsi Kalbar.

Kemampuan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan atau sering disebut daya beli (PPP) Kabupaten Sambas menempati urutan ke 3 dari 14 kabupaten/kota. Pengeluaran per kapita tertinggi di tempati oleh Kota Pontianak (13.706 ribu rupiah), Urutan kedua ditempati Kota Singkawang (10.950 ribu rupiah.).

Angka pengeluaran perkapita riil yang disesuaikan Kabupaten Sambas semakin meningkat. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Sambas.

## B. Pengeluaran Konsumsi Pangan dan Non Pangan Per Kapita

Pengeluaran konsumsi masyarakat terdiri dari konsumsi makanan dan non makanan. Komposisi pola pengeluaran penduduk terhadap kebutuhan pokok (makan) dan kebutuhan non makanan dapat dijadikan salah satu indikator untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat. Perbandingan pengeluaran penduduk untuk konsumsi makan yang makin kecil terhadap seluruh pengeluaran menggambarkan tingkat kesejahteraan yang semakin baik.

Perbandingan pengeluaran konsumsi makanan dan non makanan dapat menunjukkan tingkat kemakmuran suatu rumah tangga, jika perbandingan pengeluaran konsumsi makanan dengan konsumsi non makanan semakin kecil maka kondisi rumah tangga semakin makmur.

Besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk bukan makanan terhadap seluruh pengeluaran merupakan salah satu cerminan kesejahteraan penduduk. Makin besar proporsi tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya. Sebaliknya, jika proporsi itu mengecil berarti refleksi tingkat kesejahteraan semakin menurun (*Hukum Engle*).

Tabel II.2.24  
Persentase Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Untuk Makanan  
Tahun 2014

No.	Komoditi	Pengeluaran Perkapita
1	Padi-padian	18,03
2	Umbi-umbian	0,48
3	Ikan	14,80
4	Daging	3,51
5	Telur dan susu	5,50
6	Sayur-sayuran	8,09



7	Kacang-kacangan	1,23
8	Buah-buahan	5,36
9	Minyak dan Lemak	3,43
10	Bahan Minuman	4,90
11	Bumbu-bumbuan	2,95
12	Konsumsi Lainnya	2,42
13	Makanan dan minuman jadi	16,97
14	Minuman mengandung Alkohol	0,07
15	Tembakau dan sirih	12,25
	<b>Total Makanan</b>	<b>58,09</b>

Sumber : Susenas 2014

Rata-rata pengeluaran perkapita untuk makanan di Kabupaten Sambas tahun 2014 sebesar 58,09%. Pengeluaran terbesar ada pada padi-padian yaitu 18,03%, diikuti komoditi makanan dan minuman jadi (16,97%); ikan (14,80%) dan tembakau dan sirih (12,25%). Komoditi lainnya masih memberikan kontribusi dibawah 10 %.

Tabel II.2.25  
Persentase Rata-rata pengeluaran Per Kapita Per Bulan Untuk Non Makanan Tahun 2014

No.	Komoditi	Pengeluaran Perkapita
1	Perumahan	42,94
2	Sabun Mandi, Cuci, Kosmetik	24,08
3	Biaya Pendidikan	4,80
4	Biaya Kesehatan	8,30
5	Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	8,20
6	Barang Tahan Lama	7,16
7	Pajak dan Asuransi	2,61
8	Keperluan Pesta dan Upacara	1,93
	<b>Total Non Makanan</b>	<b>41,91</b>

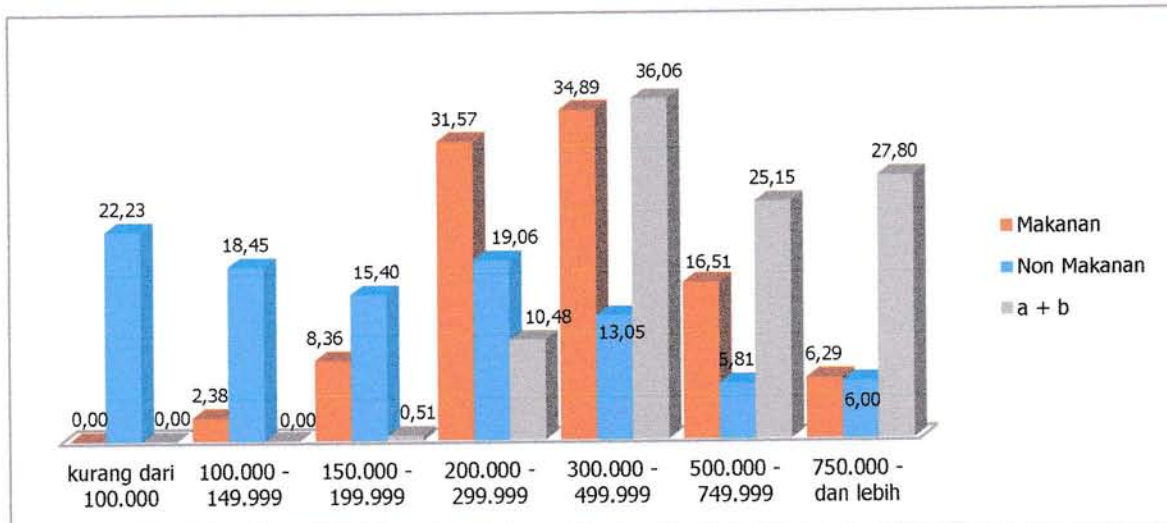
Sumber : Susenas 2014

Proporsi rata-rata pengeluaran perkapita untuk non makanan rumah tangga di Kabupaten Sambas tahun 2014 sebesar 41,91%. Pengeluaran terbesar pada komoditi perumahan sebesar 42,94%; diikuti dengan keperluan sabun mandi, cuci, kosmetik yaitu sebesar 24,08%. Komoditi lainnya masih memberikan kontribusi dibawah 10 %.

Di Kabupaten Sambas pengeluaran untuk makanan masih lebih besar dibanding pengeluaran non makanan. Ketika masyarakat mulai meningkat pendapatannya dan mulai maju maka pengeluaran terbesar nantinya akan bergeser pada pengeluaran barang tahan lama, pendidikan, dan kesehatan serta total pengeluaran non makanan akan lebih besar dari pengeluaran makanan.

Persentase pengeluaran rumah tangga tahun 2014 menurut golongan pengeluaran antara Rp. 300.000 – Rp. 499.999 adalah merupakan persentase pengeluaran terbesar

untuk makanan yaitu sebesar 34,89 %, kemudian diikuti golongan pengeluaran antara Rp. 200.000 – Rp. 299.999 yaitu sebesar 31,57 % dan golongan pengeluaran antara Rp. 500.000 – Rp. 749.999 yaitu sebesar 16,51 %. Persentase golongan pengeluaran lainnya masih dibawah 10%. Sementara persentase pengeluaran tertinggi untuk non makanan adalah golongan pengeluaran kurang dari Rp. 100.000 yaitu sebesar 22,23 % dan terendah adalah antara Rp. 500.000 – Rp. 749.999 sebesar 5,81 %.



Sumber : BPS Kab. Sambas (Susenas 2014)

Grafik II.2.22  
 Persentase Rumah Tangga Di Kabupaten Sambas  
 Menurut Golongan Pengeluaran Perkapita Per Bulan, 2014

Pada tahun 2013, persentase rumah tangga di Kabupaten Sambas menurut golongan pengeluaran antara Rp. 200.000 – Rp. 299.999 merupakan golongan pengeluaran tertinggi untuk makanan yaitu sebesar 36,22% diikuti dengan golongan pengeluaran antara Rp. 300.000 – Rp. 499.999 sebesar 29,60 % selanjutnya golongan pengeluaran antara Rp. 500.000 – Rp. 749.999 yaitu sebesar 14,01% dan golongan pengeluaran antara Rp. 150.000 – 199.999 sebesar 10,20%. Persentase golongan pengeluaran lainnya masih dibawah 10%. Pengeluaran untuk non makanan pada golongan pengeluaran kurang dari Rp. 100.000 merupakan terbesar yaitu 26,89%.



Sumber : BPS Kab. Sambas (Susenas 2013)

Grafik II.2.24  
 Persentase Rumah Tangga Di Kabupaten Sambas  
 Menurut Golongan Pengeluaran Perkapita Per Bulan, 2013



### 2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Gambaran umum kondisi wilayah/infrastruktur dapat dilihat dari Infrastruktur wilayah dan penataan wilayah.

#### A. Infrastruktur Wilayah

Jalan merupakan prasarana pengangkutan darat yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Dengan makin meningkatnya usaha pembangunan maka akan menuntut peningkatan pembangunan jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari suatu daerah ke daerah lain.

Kondisi jalan yang ada di Kabupaten Sambas secara umum masih perlu perhatian semua pihak baik pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten sendiri agar kondisi jalan tersebut mampu menjadi sarana transportasi dan penggerak roda ekonomi dan sosial.

Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Pengairan Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sambas tahun 2014, total panjang jalan Kabupaten Sambas berdasarkan status pengawasan yaitu sepanjang 1.807.404 Km, yang terdiri dari jalan nasional 94.502 Km (5,23 %), Jalan Propinsi 74.300 Km (4,11%), Jalan Kabupaten 696.633 Km (38,54 %), Jalan Desa 722.326 Km (39,96 %) dan Jalan Strategis Nasional 219.643 Km (12,15 %).

Dari Total panjang jalan Kabupaten yaitu 696.633 Km, dalam kondisi baik sepanjang 299.168 Km, kondisi sedang sepanjang 88.334 Km, kondisi rusak sepanjang 101.912 Km dan kondisi rusak berat sepanjang 207.219 Km. Panjang Jalan dengan kondisi baik di tahun 2014 meningkat dari 276.918 Km ditahun 2013 menjadi 299.168 Km ditahun 2014. Hal tersebut dikarenakan menurunnya jumlah jalan dengan kondisi baik, rusak dan rusak berat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.1  
Panjang Jalan Kabupaten Menurut Jenis Permukaan  
(Kilometer)

No.	Jenis Permukaan	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Aspal	315,633	315,633	319,279	321,579	321,869
2.	Kerikil	100,520	87,638	86,488	89,638	97,543
3.	Tanah	426,000	293,362	290,866	285,416	277,221
4.	Lainnya	-	-	-	-	-
Jumlah		842,153	696,633	696,633	696,633	696,633

Sumber : Dinas PU Bina Marga Pengairan Energi dan Sumber Daya Mineral Kab. Sambas

Tabel 6.2  
Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi Jalan  
(Kilometer )

No	Kondisi Jalan	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Baik	279,163	230.972	251.260	276,918	299,168
2.	Sedang	361,620	85.312	76.909	88,348	88,334
3.	Rusak	164,990	119.311	124.301	115,780	101,912
4.	Rusak Berat	36,380	261,038	244.163	215,587	207,219
Jumlah		842,153	696,633	696,633	696.633	696.633

Sumber : Dinas PU Bina Marga Pengairan Energi dan Sumber Daya Mineral Kab. Sambas

Tabel 6.3  
Panjang Jalan Menurut Status Pengawasan dan Jenis Permukaan Tahun 2014  
(Kilometer)

No.	Status Pengawasan	Jenis Permukaan				Jumlah
		Aspal	Kerikil	Tanah	Lainnya	
1.	Nasional	87,698	6,804	-	-	94,502
2.	Propinsi	74,300	-	-	-	74,300
3.	Kabupaten	321,579	89,638	285,416	-	696,633
4.	Desa	95,509	310,200	316,617	-	722,326
5.	Strategis Nasional	133,422	12,192	74,029	-	219,643
	2014	712,508	418,834	676,062	-	1.807,404
	2013	698,508	442,932	665,964	-	1.807,404
	2012	696.208	439.782	671.414	-	1.807.404
	2011	703,286	204,263	899,855	-	1.807,404
	2010	696,089	201,531	909,784	-	1.807,404

Sumber: Dinas PU Bina Marga Pengairan Energi dan Sumber Daya Mineral Kab. Sambas

Tabel 6.4  
Panjang Jalan Menurut Status Pengawasan dan Kondisi Jalan Tahun  
2014  
(Kilometer)

No.	Status Pengawasan	Kondisi Jalan				Jumlah
		Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat	
1.	Nasional	47,239	0,000	33,264	13,999	94,502
2.	Propinsi	55,900	7,000	11,400	0,000	74,300
3.	Kabupaten	299,168	88,334	101,912	207,219	696,633
4.	Desa	317,483	193,418	118,772	92,653	722,326
5.	Strategis Nasional	38,236	71,906	42,474	67,027	219,643
	2014	758,026	360,658	307,822	380,898	1.807,404
	2013	691,865	384,171	332,489	398,879	1.807,404
	2012	636,782	372,732	321,907	475,983	1.807,404
	2011	570,282	359,406	331,506	546,210	1.807,404
	2010	509,292	677,360	387,085	233,667	1.807,404

Sumber: Dinas PU Bina Marga Pengairan Energi dan Sumber Daya Mineral Kab.Sambas



Air bersih merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi penduduk baik untuk memasak/minum maupun mencuci/mandi. Bagi daerah Kabupaten Sambas, khususnya di daerah pedalaman secara tradisional penggunaan air bersih masih bersumber dari sungai/danau dan air hujan. Akan tetapi di sebagian kecamatan air bersih dikelola sebagai komoditas industri oleh PDAM. Untuk menyediakan sarana air bersih dan sehat, Perusahaan Daerah Air Minum terus berupaya meningkatkan peranannya. Banyaknya air minum yang terjual di Kabupaten Sambas sampai bulan Juli tahun 2015 sebesar 487.018 M3 dengan nilai penjualan sebesar Rp. 2.358.730.425.000.

Tabel II.2.25  
Jenis Pelanggan, Air Minum Yang Terjual dan Nilai Penjualan  
di Kabupaten Sambas

Jenis Pelanggan	2014		2015	
	Air Minum Yang Terjual (M3)	Nilai Penjualan (Rp.000)	Air Minum Yang Terjual (M3)	Nilai Penjualan (Rp.000)
<b>Golongan Sosial</b>				
1/A Sosial Umum	12.253	11.765.510	5.265	4.951.760
1/B Sosial Khusus	28.938	36.412.000	15.710	19.752.800
<b>Jumlah</b>	<b>41.191</b>	<b>48.177.510</b>	20.975	24.704.560
<b>Golongan Rumah Tangga</b>				
2/A Rumah Tangga	6.737	15.127.605	3.227	7.946.470
2/B Rumah Tangga	3.687	11.539.020	2.061	6.612.935
2/C Rumah Tangga	690.984	3.194.265.365	376.310	1.730.348.660
2/D Instansi Pemerintah	18.703	112.419.830	8.648	51.300.320
<b>Jumlah</b>	<b>720.111</b>	<b>3.333.351.820</b>	390.246	1.796.208.385
<b>Golongan Niaga</b>				
3/A Niaga Kecil	23.361	134.302.315	12.907	74.479.430
3/B Niaga Menengah	7.274	46.805.375	4.807	30.973.960
3/C Niaga Besar	77.515	646.219.390	43.814	364.202.920
<b>Jumlah</b>	<b>108.150</b>	<b>827.327.080</b>	61.528	469.656.310
<b>Industri</b>				
4/A Industri Kecil	9.122	82.797.690	12.997	51.887.265
4/B Industri Menengah	-	-	363	3.239.685
4/C Industri Besar	2.788	35.787.585	909	12.209.550
<b>Jumlah</b>	<b>11.910</b>	<b>118.585.275</b>	14.269	67.336.500
<b>Khusus</b>				
5/A Pelabuhan	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-	-	-
<b>Karyawan</b>	1.189	1.111.715	879	824.670
<b>Jumlah</b>	1.189	1.111.715	879	824.670
<b>TOTAL</b>	<b>882.551</b>	<b>4.328.553.400</b>	<b>487.018</b>	<b>2.358.730.425</b>

Sumber : PDAM Kabupaten Sambas (Juli, 2015)

Sumber utama kehidupan makhluk hidup adalah air. Tidak satupun makhluk hidup di muka bumi ini akan mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya tanpa air. Bagi manusia, air selain berpengaruh terhadap kesehatan seperti mandi/cuci dan masak/minum, juga turut mendukung kelestarian alam dan keindahan lingkungan misalnya pendukung dan pelengkap pertamanan kota.

Kebutuhan air bersih untuk masak/minum bagi penduduk Kabupaten Sambas sebagian besar bergantung pada sumber air hujan baik penduduk di perkotaan maupun pedesaan yaitu sekitar 82,52%. Selain air hujan, sumber air minum bagi penduduk Kabupaten Sambas juga berasal dari air sungai yaitu sekitar 4,76%. Masyarakat perkotaan cukup banyak yang mempergunakan air isi ulang (8,49 %) sebagai sumber air minum sedangkan masyarakat pedesaan hanya mempergunakan sekitar 1,65 % air isi ulang sebagai sumber air minum mereka.

Tabel II.2.25  
 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Berdasarkan Klasifikasi  
 Desa di Kabupaten Sambas Tahun 2014

No.	Sumber Air Minum	Perkotaan	Pedesaan	Perkotaan + Pedesaan
1	Air kemasan bermerk	5,77	0,81	1,62
2	Air isi ulang	8,49	1,65	2,76
3	Leding meteran	0,42	0,00	0,07
4	Leding eceran	2,74	0,00	0,45
5	Sumur bor/pompa	0,00	0,69	0,58
6	Sumur terlindung	0,00	2,99	2,50
7	Sumur tak terlindung	0,00	1,42	1,19
8	Mata air terlindung	1,21	1,15	1,16
9	Mata air tak terlindung	2,47	2,38	2,39
10	Air sungai	1,97	5,30	4,76
11	Air hujan	76,93	83,61	82,52
12	Lainnya	0,00	0,00	0,00

Sumber : Susenas 2014

Pola konsumsi air yang bergantung pada intensitas turunnya hujan akan dirasakan kesulitannya pada musim kemarau. Masyarakat terlihat mulai resah terhadap upaya pemenuhan kebutuhan air bersih. Jika dikaitkan dengan potensi sungai yang terbesar dan terpanjang di Indonesia, kelangkaan air bersih di Kabupaten Sambas semestinya kurang patut terjadi. Namun disadari, cukup besarnya biaya investasi dalam pengolahan air sungai menjadi air bersih karena wilayahnya adalah muara sungai (bukan hulu sungai), maka dalam hitungan hari tidak turun hujan sungai sudah terinstruksi air laut, sehingga kadar garam air baku PDAM melebihi batas toleransi pengolahan air yaitu di atas 600 ppm/m<sup>3</sup>.



Berbagai usaha telah dilakukan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan tenaga listrik, usaha-usaha tersebut tampak lebih nyata setelah dilaksanakannya program pembangunan listrik masuk desa.

Berdasarkan laporan Perusahaan Listrik Negara Wilayah V Ranting Sambas pada tahun 2014 total daya terpasang yang dibangkitkan dari lokasi pembangkit sebanyak 19.629 Kw dengan produksi sebesar 1.262.374 Kwh. Sedangkan jumlah pelanggan sebanyak 106.403.

Tabel II.2.26  
Besarnya Kapasitas dan Produksi Listrik PLN  
Menurut Lokasi Pembangkit Tahun 2014

No.	Lokasi	Terpasang (KW)	Daya Mampu (KW)	Beban Puncak (KW)	Produksi (KWH)
1.	Pemangkat	-	-	-	-
	- Tebas	-	-	-	-
	- Sentebang	1.440	1.135	887	96.202
2.	Sambas	18.189	14.330	15.844	1.166.172
	- Balai Gemuruh	-	-	-	-
	- Sejangkung	-	-	-	-
	- Sajingan Besar	...	...	...	...
3.	Sekura	-	-	-	-
	- Liku	...	...	...	...

Sumber : Buku Tabel Pokok Kab. Sambas 2015

Tabel II.2.26  
Banyaknya Pelanggan Listrik PLN  
Menurut Golongan Pelanggan Tahun 2014

No.	Lokasi	Rumah Tangga	Industri /Usaha	Badan Sosial	Pemerintah	Jumlah
1.	Pemangkat	49.807	2.639	1.034	340	53.820
	- Tebas	...	...	...	...	...
	- Sentebang	...	...	...	...	...
2.	Sambas	29.184	1.556	838	472	32.050
	- Balai Gemuruh	...	...	...	...	...
	- Sejangkung	...	...	...	...	...
	- Sajingan Besar	...	...	...	...	...
3.	Sekura	18.970	983	464	116	20.533
	- Liku	...	...	...	...	...

Sumber : Buku Tabel Pokok Kab. Sambas 2015

## B. Penataan Wilayah

Penataan wilayah Kabupaten Sambas diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sambas tahun 2012-2032. Salah satu bentuk penataan wilayah yang diatur dalam RTRW tersebut adalah perencanaan pemanfaatan lahan. Sesuai dengan RTRW Kabupaten Sambas tahun 2012-2032, rencana pemanfaatan lahan di Kabupaten Sambas terbagi ke dalam 2 (dua) kawasan lindung, yakni: hutan konservasi, sempadan, hutan lindung, ruang terbuka hijau dan perairan. Kawasan budidaya meliputi: kawasan budidaya berfungsi lindung (hutan produksi, tanaman tahunan/perkebunan, hutan rakyat); kawasan budidaya pertanian (pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, perikanan, peternakan) dan kawasan budidaya non pertanian (kawasan pariwisata, kawasan peruntukan industri, kawasan pemerintahan/fasum, kawasan permukiman, kawasan perdagangan/jasa, kawasan Hankam).

Seiring dengan pesatnya perkembangan pembangunan, terdapat konsekuensi yang tidak bisa dihindari dalam pemanfaatan/tata guna lahan, yaitu tingginya rasio perubahan alih fungsi lahan. Hal ini ditandai dengan timbulnya pusat-pusat kegiatan baru seperti: kawasan industri, perdagangan/jasa dan tumbuhnya kawasan-kawasan permukiman.

### 2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

#### A. Angka Kriminalitas

Data Kepolisian Resor Sambas mencatat bahwa periode 2014 terjadi peningkatan kejahatan/pelanggaran yang dilaporkan. Tahun 2014 jumlah kejahatan yang dilaporkan sebanyak 368 kasus bertambah 71 kasus dari tahun 2013 yaitu 297 kasus. Sedangkan jenis kejahatan yang diselesaikan di tahun 2014 sebanyak 261 kasus.

Tabel II.2.27

Banyaknya kejahatan / Pelanggaran Yang Dilaporkan  
Dan Diselesaikan POLRES Sambas  
Tahun 2013 -2014

No.	Jenis Kejahatan	2013		2014	
		Dilaporkan	Diselesaikan	Dilaporkan	Diselesaikan
1	2	3	4	5	6
1	Aniaya Ringan	-	-	49	41
2	Aniaya Berat	-	-	-	-
3	Bunuh Diri	1	1	4	4
4	Penemuan Mayat	6	6	2	1
5	Pencabulan	32	32	37	31
6	Perzinahan	3	3	5	4
7	Curbis (Pencurian Biasa)	46	17	42	24
8	Curat (Pencurian Berat)	32	4	13	10
9	Curanmor (Pencurian Kendaraan Bermotor)	89	4	48	9
10	Penipuan	-	-	20	21
11	Penggelapan	-	-	27	17



No.	Jenis Kejahatan	2013		2014	
		Dilaporkan	Diselesaikan	Dilaporkan	Diselesaikan
1	2	3	4	5	6
12	Kebakaran	27	27	18	9
13	Perjudian	15	15	14	20
14	Penyerobotan Tanah	6	6	1	1
15	Pengrusakan	-	-	12	10
16	Mati Tenggelam	-	-	1	1
17	Traficking/ People Smugling	-	-	6	5
18	Narkoba	9	9	-	-
19	Senjata api/Sanjam/Handak	-	-	3	4
20	Illegal Logging	7	6	4	3
21	Pemerasan	-	-	1	1
22	Pengeroyokan	13	10	15	10
23	Perbuatan Tdk Menyenangkan	-	-	1	-
24	Pemalsuan	-	-	3	2
25	Percobaan Pencurian	-	-	-	-
26	Penistaan Agama	-	-	-	-
27	Laporan Palsu	-	-	-	-
28	Perlindungan Konsumen	-	-	-	-
29	Laka Air	5	5	1	2
30	Laka Kerja	1	1	1	1
31	Minyak Bumi/Gas	-	-	2	1
32	SDA	-	-	1	-
33	Kejahatan Asal Usul Perkawinan	-	-	-	-
33	Kekerasan Dalam RT	-	-	14	10
34	Kesambar Petir	-	-	-	-
35	Penghinaan	-	-	-	-
36	Kecelakaan Kerja	1	1	-	-
37	PETI / Illegal Mining	-	-	1	1
38	Pencemaran Nama Baik	-	-	-	-
39	Pemerksaan	2	2	2	-
40	Orang Hilang	-	-	1	1
41	Melarikan Anak	-	-	3	3
42	Kekerasan Terhadap Anak	-	-	-	-
43	Pengancaman	-	-	-	-
44	Pengrusakan Lahan	-	-	-	-
45	Bencana Alam	-	-	-	-
46	Pembuangan Bayi	-	-	-	-
47	Penelantaran Anak	-	-	-	-
48	Pembakaran	2	2	1	2
49	Percobaan Pembunuhan	-	-	-	-
50	Pembunuhan	-	-	-	-
51	Penyeludupan	-	-	-	-
52	TP Kehutanan	-	-	-	-
53	Merugikan kekayaan Negara	-	-	1	2
54	Lain-lain (ITE)	-	-	14	10
	<b>JUMLAH</b>	<b>297</b>	<b>151</b>	<b>368</b>	<b>261</b>

Sumber: Tabel Pokok Kab. Sambas 2014, 2015

#### 2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

##### A. Kualitas Tenaga Kerja

Adapun jumlah penduduk Kabupaten Sambas yang berumur 15 tahun ke atas menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan tahun 2014 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel II.2.28  
Penduduk Kabupaten Sambas Berumur 15 Tahun Ke Atas  
Yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu  
Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan

No	Pendidikan	Tahun 2014		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Tidak/Belum Pernah Sekolah	6.158	10.146	16.304
2	Tidak/Belum Tamat SD	38.820	40.689	79.509
3	Sekolah Dasar/Ibtidaiyah	44.537	37.943	82.480
4	Paket A	0	348	348
5	SMP/Tsanawiyah	22.361	13.898	36.259
6	SMP Kejuruan	1.304	377	1.681
7	Paket B	1.176	977	2.153
8	SMA/Aliyah	15.159	7.792	22.951
9	SMK	6.475	3.962	10.437
10	Diploma I/II	692	750	1.442
11	Diploma III	923	1.655	2.578
12	Diploma IV/Universitas	3.732	3.105	6.837
<b>Jumlah</b>		<b>141.337</b>	<b>121.642</b>	<b>262.979</b>

Sumber : Buku Tabel Pokok Kab. Sambas 2015

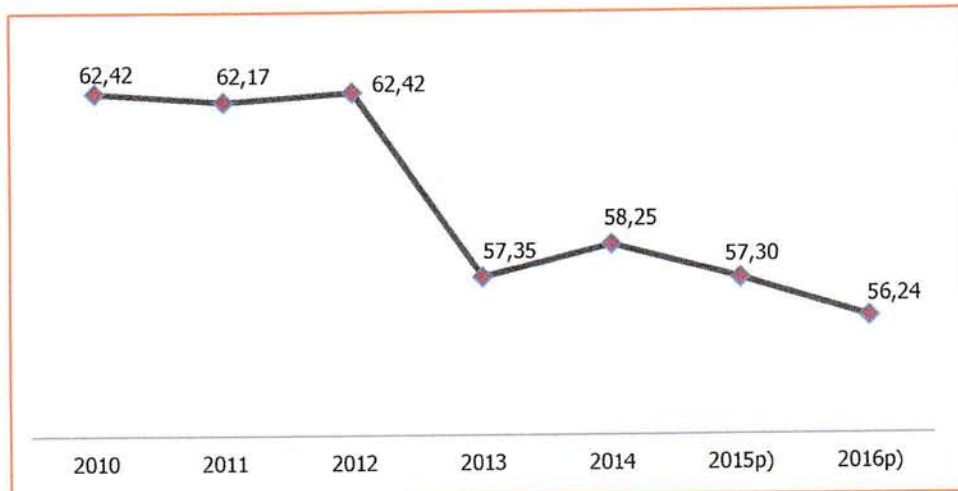
##### B. Tingkat Ketergantungan

Rasio ketergantungan (*Dependency Ratio*) merupakan rasio yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk yang belum dan tidak produktif (umur di bawah 15 tahun dan 65 tahun keatas) dengan banyaknya penduduk yang termasuk produktif secara ekonomi (15-64 tahun).

Rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Sambas tahun 2014 sebesar 58,25 persen berarti setiap 100 penduduk produktif menanggung sekitar 58 orang yang tidak produktif. Semakin tinggi rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif (15-64 tahun) untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif (0-14 tahun) dan yang sudah tidak produktif lagi (65 tahun lebih). Diprediksikan rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Sambas tahun 2015 dan 2016 masing-masing sebesar 57,30 persen dan 56,24 persen.



Gambar II.2.29  
Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten Sambas Tahun 2010 – 2015



Sumber : BPS Kab. Sambas

Keterangan : p) proyeksi Bappeda Kab Sambas

### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Pencapaian pembangunan yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Sambas tahun 2015 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sambas 2012-2016. Peran pemerintah daerah di era Otonomi Daerah dalam melaksanakan pembangunan semakin besar. Pelaksanaan pembangunan bukan hanya terkonsentrasi pada satu sektor atau satu bidang saja, tetapi saling terkait antara sektor dengan sector atau bidang lainnya. Selama empat tahun perjalanan RPJMD telah tergambar sejauh mana pencapaian sasaran pembangunan, upaya – upaya yang ditempuh, pencapaian yang telah didapat, kendala yang dihadapi serta upaya lanjutan yang akan ditempuh untuk mencapai sasaran sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan.

Demikian pula pada Tahun 2015, program prioritas pembangunan masih konsisten diarahkan dalam rangka meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sambas, yaitu melalui peningkatan infrastruktur dasar, pengembangan kesehatan dan KB, pengembangan pendidikan, reformasi birokrasi (tata kelola pemerintah), peningkatan kualitas kehidupan beragama. Dengan semakin meningkatnya kegiatan ekonomi masyarakat dan investasi, selama empat tahun perjalanan yang ditunjang oleh peningkatan pelayanan sektor publik oleh pemerintah, maka diharapkan akan dapat mengoptimalkan akses masyarakat terhadap kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, pemberdayaan perempuan, KB dan anak serta semakin meningkatkan kualitas ibadah dalam kehidupan beragama.

Tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi yang telah dicapai, akan terkait dengan pembangunan Sumber Daya Manusia termasuk didalamnya peningkatan kualitas kualitas hidup seperti peningkatan gizi, pembangunan infrastruktur, pengembangan

reformasi birokrasi termasuk memperikan pelayanan prima kepada masyarakat, pengembangan kelembagaan sosial ekonomi dan faktor-faktor lainnya.

Fokus program prioritas pembangunan pada tahun 2015 adalah untuk mempercepat Visi Sambas Berprestasi dan Sejahtera dari keseluruhan pencapaian Visi Daerah Kabupaten Sambas yaitu "Terwujudnya Sambas yang Mandiri, Berprestasi, Madani dan Sejahtera". Prioritas program pembangunan daerah Kabupaten Sambas itu kemudian dijabarkan kembali kedalam program-program yang dilaksanakan SKPD agar selaras dengan sasaran, strategi dan kebijakan daerah yang ditentukan dalam RKPD Kabupaten Sambas Tahun 2015, sebagai upaya untuk melakukan kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia guna mencapai hasil dan kinerja yang dapat diukur.

Penyajian evaluasi ini menampilkan capaian indikator kinerja daerah terhadap pelaksanaan program RKPD dan Realisasi RPJMD Tahun 2015, yang difokuskan pada pencapaian pelaksanaan program prioritas pembangunan Kabupaten Sambas guna mempercepat mewujudkan visi Sambas Berprestasi dan Sejahtera. Maka penyajian data akan dimulai dengan status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah Kabupaten Sambas berisi indikator-indikator makro pembangunan daerah dan penyelenggaraan urusan wajib / pilihan pemerintah daerah dari fokus prioritas program dimaksud yang dijabarkan sebagai berikut :

## **1. VISI SAMBAS BERPRESTASI**

Pencapaian pelaksanaan program prioritas pembangunan Kabupaten Sambas Pada tahun 2015 secara umum mengoptimalkan akses masyarakat terhadap kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, pemberdayaan perempuan, KB dan anak .

### **1) Pengembangan Pendidikan**

Aspek kesejahteraan masyarakat melalui urusan pendidikan terdiri dari beberapa indikator seperti: angka melek huruf (umur 15-44 th) tahun 2015 sebesar 99,59% mengalami peningkatan sebesar 0,71% dari tahun 2014 sebesar 98,88%. Akan tetapi angka ini belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD pada tahun berkenaan (persentase capaian 99,96%). Angka Partisipasi Kasar (APK ) tingkat SD/MI merupakan persentase angka yang menunjukkan jumlah siswa SD/MI/Paket A dibandingkan dengan jumlah penduduk usia sekolah 7-12 tahun, realisasi (APK) tingkat SD/MI 2015 sebesar 112,08% dari target 112,2% meningkat sebesar 0,12%. Capaian indikator kinerja dicapai dengan program kegiatan rehab dan penambahan RKB SD/MI di tahun 2015 yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Sambas baik dari APBD maupun DAK dan APBN, selain itu ada perhatian dan bantuan dari pemerintah Daerah berupa Program BOS Daerah. Angka Partisipasi



Kasar (APK ) tingkat SMP/Mts/Paket B merupakan persentase angka yang menunjukkan jumlah siswa SMP/Mts/Paket B dibandingkan dengan jumlah penduduk usia sekolah 13-15 tahun, realisasi (APK) tingkat SMP/Mts/Paket B tahun 2015 sebesar 97,67% dari target 99,26% meningkat sebesar 3,84% dibandingkan dengan realisasi tahun 2014, akan tetapi realisasi di tahun 2015 belum mencapai target yang di tetapkan (99,26 %). Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SMA/MA/SMK dan Paket C merupakan persentase angka yang menunjukkan jumlah siswa SMA/MA/SMK dan Paket C dibandingkan dengan jumlah penduduk usia sekolah 16-18 tahun, realisasi (APK) tingkat SMA/MA/SMK dan Paket C tahun 2015 sebesar 66,23% dari target 86,5% meningkat sebesar 0,6% dibandingkan dengan realisasi tahun 2014, akan tetapi realisasi di tahun 2015 belum mencapai target yang di tetapkan (86,5%). Pada indikator angka pendidikan yang ditamatkan, realisasi Angka Pendidikan yang ditamatkan Jenjang SD/MI tahun 2015 sebesar 14,12% dari target 7,4%, akan tetapi menurun sebesar 1,08% dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 (15,20%). Angka Pendidikan yang ditamatkan Jenjang SMP/Mts, realisasi Angka Pendidikan yang ditamatkan Jenjang SMP/Mts tahun 2015 sebesar 6,89% dari target 5,1% serta meningkat sebesar 1,82% dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 (5,07%). Realisasi Angka Pendidikan yang ditamatkan jenjang SMA/MA/SMK tahun 2015 sebesar 5,48% dari target 4,65% serta meningkat sebesar 2,33% dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 (3,15%). Realisasi (APM ) tingkat SD/MI/Paket A tahun 2015 sebesar 91,36% dari target 99,86% serta menurun sebesar 3,94% dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 (95,30%). Realisasi (APM) tingkat SMP/Mts/Paket B taun 2015 sebesar 72,25% dari target 96,95% akan tetapi meningkat sebesar 2,02% dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 (70,23%). Realisasi (APM) tingkat SMA/MA/SMK dan Paket C tahun 2015 sebesar 45,97% dari target 70,47% akan tetapi meningkat sebesar 4,98% dibandingkan dengan realisasi tahun 2014.

## **2) Pengembangan Kesehatan**

Aspek kesejahteraan masyarakat pada urusan kesehatan dijabarkan dengan 4 indikator kinerja meliputi : Angka Usia Harapan Hidup, Jumlah kasus kematian bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu, jumlah kasus kematian ibu dan persentase balita gizi buruk. Indikator jumlah kasus kematian bayi (berumur kurang 1 tahun) pada tahun 2015 sebesar 138 jiwa. Meningkat 27 kasus kematian dari tahun 2014 sebanyak 111 jiwa. Hal ini disebabkan oleh asfiksia, BBLR, infeksi, masalah laktasi, dan lain-lain (prematuur, anencephalus, suspeck sepsis, masalah hematologi, hydrocephalus, broncho pneomon, gangguan pernafasan, hipetermi, perdarahan tali pusat, kelainan jantung, hiperpireksia, gagal nafas, pneumonia dan penyakit menular). Bila dilihat trend lokasi terjadinya kematian bayi di 19

kecamatan, di tahun keempat pelaksanaan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas terjadi di seluruh wilayah Puskesmas.

Indikator kinerja lainnya adalah jumlah kasus kematian ibu. Jumlah kasus ini pada tahun 2015 meningkat menjadi 22 kasus dibandingkan pada tahun sebelumnya yang berjumlah 13 kasus. Kasus kematian ibu pada tahun 2015 ini belum dapat mencapai target RPJMD yang ditargetkan dapat menekan jumlah kasus kematian ibu sebanyak 11 kasus. Dengan hambatan yang menyebabkan masih tingginya kasus kematian ibu adalah hampir serupa dengan persoalan yang dialami oleh tingginya jumlah kasus kematian bayi yaitu diantaranya perdarahan, hipertensi dalam kehamilan, gangguan Sistem Peredaran darah, Gangguan Embolik dan penyebab lainnya. Bila dilihat trend lokasi terjadinya kematian ibu di 19 kecamatan, kejadian kematian ibu terjadi di Kecamatan Selakau, Kecamatan Selakau Timur, Kecamatan Pemangkat, Kecamatan Teluk Keramat, Kecamatan Tangaran, Kecamatan Semparuk, Kecamatan Sambas, Kecamatan Sejangkung, Kecamatan Sebawi, Kecamatan Tebas dan Kecamatan Tekarang. Pada tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sambas 2012-2016, terjadi peningkatan prevalensi gizi buruk dari 2,47% ditahun 2014 menjadi 3,05% di tahun 2015 (target 1%). Dari hasil prevalensi gizi buruk dilakukan penyaringan pengukuran berat badan di bagi tinggi badan dengan Z-score <-3 dan atau dengan penyakit penyerta ditemukan sebanyak 17 balita dan dilakukan perawatan di Pusat Pemulihan Gizi (PPG), dimana dari 17 kasus gizi buruk yang dirawat di Pusat Pemulihan Gizi (PPG), 17 balita berubah status gizinya menjadi baik.

### **3) Pembinaan Perempuan, KB dan Anak**

Dapat dilihat pada indikator persentase partisipasi perempuan di Lembaga Pemerintah, tahun 2015 sebesar 45,49 % meningkat sebesar 0,29% dari tahun 2014 sebesar 45,20% dan telah mencapai target indikator kinerja tahun berkenaan, dengan realisasi capaian sebesar 145,57%.

Rasio KDRT tahun 2015 sebesar 0,020 % konstan dari tahun 2014 juga sebesar 0,02%, akan tetapi lebih tinggi dari target indikator sebesar 111,11% (tidak tercapai, target tahun berkenaan sebesar 0,018%).

Penyelesaian pengaduan dan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, tahun 2015 sebesar 59,14 meningkat sebesar 11,16% dari tahun 2014 sebesar 47,98% dan telah mencapai target indikator kinerja tahun berkenaan, dengan realisasi capaian sebesar 114,35%. Akan tetapi pada tahun – tahun mendatang upaya preventif harus dioptimalkan utk meminimalisir tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.



#### **4) Pengembangan Kualitas Pemuda dan Olahraga**

Ditunjukkan dengan indikator jumlah organisasi pemuda, jumlah organisasi olahraga, jumlah kegiatan kepemudaan serta jumlah kegiatan olahraga.

Jumlah organisasi pemuda tahun 2015 masih sama dengan tahun 2014 sebanyak 192 organisasi, kemudian organisasi olahraga sebanyak 28 organisasi, sesuai dengan cabang olahraga secara nasional.

Jumlah kegiatan kepemudaan tahun 2015 sebanyak 12 kegiatan, menurun 2 kegiatan dari tahun 2014 sebesar 14 kegiatan, belum mencapai target indikator kinerja tahun berkenaan, dengan realisasi capaian sebesar 50%.

Jumlah kegiatan olahraga tahun 2015 sebanyak 8 kegiatan, menurun 4 kegiatan dari tahun 2014 sebesar 12 kegiatan, belum mencapai target indikator kinerja tahun berkenaan, dengan realisasi capaian sebesar 80%.

#### **5) Pengembangan Budaya dan Pariwisata**

Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya, tahun 2015 sebanyak 6 kegiatan, menurun 1 kegiatan dari tahun 2014 sebanyak 7 kegiatan, belum mencapai target indikator kinerja tahun berkenaan, dengan realisasi capaian sebesar 60%. Untuk di Tahun 2015 Festival yang dilaksanakan memakai dana APBD sebanyak 6 Kegiatan yaitu : Festival Budaya Bumi Khatulistiwa, Festival Budaya Daerah, Festival Lagu Khataman Al-Quran, Festival Budaya Nusantara Kawasan Perbatasan, Pementasan Seni dan Budaya, Lomba Sampan Tradisional, Selain itu masih ada festival yang dilaksanakan oleh masyarakat seperti Festival Drum Band. dll.

Kunjungan wisata tahun 2015 sebesar 50,39% menurun sebesar 5,10% dari tahun 2014 sebesar 55,49%, belum mencapai target indikator kinerja tahun berkenaan, dengan realisasi capaian sebesar 82,20%, tidak tercapainya target, hal ini disebabkan kurangnya event pariwisata yang dilaksanakan melalui pelaksanaan Promosi Pariwisata di dalam dan luar negeri dan juga kurangnya festival yang mampu meningkatkan kunjungan wisata.

## **2. VISI SAMBAS SEJAHTERA**

Pencapaian pelaksanaan Visi Sambas Sejahtera melalui program prioritas pembangunan Kabupaten Sambas Pada tahun 2015 secara umum dioptimalkan pada Program Aksi daerah yaitu Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama. Indikator kinerja daerah yang ada meliputi:

### **a. Peningkatan bantuan pembangunan atau perbaikan tempat ibadah**

Capaian Kinerja Peningkatan bantuan pembangunan atau perbaikan rumah ibadah, sampai dengan tahun 2014 sebanyak 1440 unit (98,3%), sampai tahun 2015 sebanyak 1490 unit rumah ibadah (101,7%), dari target kinerja tahun 2015 (85%) Rumah / tempat ibadah di Kabupaten Sambas, jumlah rumah / tempat ibadah yang

ada di Kabupaten Sambas sebanyak (1465) Unit. Pemberian bantuan pembangunan / rehab kepada rumah ibadah pada tahun 2015 diberikan pada 50 unit (Masjid / musolla) dengan demikian kinerja pada tahun 2015 melampaui target.

b. Peningkatan Jumlah dan Kualitas Penyuluh dan bimbingan keagamaan

Capaian Kinerja Peningkatan Jumlah dan Kualitas penyuluh dan Bimbingan keagamaan, Realisasi penyuluh atau bimbingan keagamaan diberikan bantuan / pembinaan sampai dengan tahun 2015 adalah 3313 orang (61,32%) dari seluruh jumlah penyuluh atau bimbingan keagamaan di Kabupaten Sambas (3849)orang . Target kinerja pada tahun 2015 adalah (45%) maka capaian kinerja pada tahun 2015 melampaui target.

c. Peningkatan bantuan untuk perizinan dan sertifikasi tanah wakaf

Kegiatan Peningkatan bantuan izin dan sertifikasi tanah wakaf, setiap tahunnya dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Sambas, namun data tersebut dapat diinput sebagai pelayanan masyarakat Kab. Sambas, setiap tahunnya ada peningkatan karena merupakan program rutin di Kementerian Agama Kab. Sambas. Capaian Kinerja Peningkat Bantuan untuk Perizinan dan Sertifikasi Tanah wakaf, capaian sampai dengan tahun 2015 sebanyak 398 lokasi ( 49,6%) dari seluruh lokasi tanah wakaf yang diajukan untuk disertifikatkan 784 lokasi. Sampai dengan tahun 2015 target kinerja yang akan dicapai adalah 60%, maka capaian kinerja pada tahun 2015 belum tercapai.

d. Peningkatan Pelayanan Haji

Capaian Kinerja Peningkatan pelayanan ibadah Haji, pada tahun 2015 sebanyak 227 jema'ah (96,6%) dari kuota pada tahun itu (235 Jema'ah). Realisasi Pelayanan ibadah haji pada tahun 2015 sebanyak 7 tidak berangkat dikarenakan (sakit, dan belum dapat memenuhi persyaratan keberangkatan), kegiatan Peningkatan Pelayanan Jema'ah Haji dapat melampaui target tahun 2015 (95%).

e. Pembinaan dan Pengembangan lembaga – lembaga pembina agama

Capaian Kinerja Pengembangan lembaga - lembaga pembina agama, peningkatan Peran serta kelembagaan pada kegiatan keagamaan di Kabupaten Sambas dan pemberian bantuan kepada lembaga tersebut , pada tahun 2015 pembinaan hanya diberikan pada 9 Lembaga (25,7%), target Pembinaan / pemberian bantuan pada tahun 2015 adalah 33 lembaga dengan demikian kinerja kegiatanPembinaan dan Pengembangan Lembaga Pembina Agama belum mencapai target.



### **3. VISI SAMBAS MANDIRI**

Pencapaian pelaksanaan program prioritas pembangunan Kabupaten Sambas Pada tahun 2015 secara umum banyak difokuskan pada 4 Program Aksi daerah yaitu pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan pertanian dan ketahanan pangan, peningkatan ekonomi kerakyatan dan investasi serta peningkatan kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan. Indikator kinerja daerah yang ada meliputi :

#### **1) Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Dasar**

Ketersediaan infrastruktur yang memadai merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan merupakan aspek penting untuk meningkatkan produktivitas sektor produksi. Ketersediaan sektor transportasi, ketersediaan sarana perumahan dan permukiman seperti air minum dan sanitasi secara luas dan merata, serta pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat.

- a. Aspek pelayanan umum untuk urusan pekerjaan umum, beberapa indikator seperti : proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik serta proporsi panjang jaringan jalan desa dalam kondisi baik dapat dilihat peningkatannya. Pada tahun 2015 proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik mencapai 46,64% meningkat 3,88% dari tahun 2014 sebesar 42,76%. Proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik tahun 2015 telah mencapai target RPJMD tahun berkenaan (persentase capaian 104,48%). Untuk proporsi panjang jaringan jalan desa dalam kondisi baik tahun 2015 sebesar 43,95%, meningkat sebesar 3,48% dari tahun 2014 yang sebesar 43,95%, demikian pula proporsi panjang jaringan jalan desa dalam kondisi baik telah mencapai target RPJMD tahun berkenaan (persentase capaian 106,73%).
- b. Aspek pelayanan umum urusan perumahan indikator kinerja yang diukur adalah: rumah tangga pengguna air bersih; rumah tangga bersanitasi; lingkungan pemukiman kumuh dan rumah layak huni. Tahun 2015 rumah tangga pengguna air bersih sebesar 51,98% menurun 0,47% dari tahun 2014 sebesar 52,45%, akan tetapi telah mencapai target RPJMD tahun berkenaan (persentase capaian 160,43% dari target 32,40%). Rumah tangga bersanitasi tahun 2015 sebesar 46,97% menurun 0,04% dari tahun 2014 sebesar 47,01% akan tetapi tetap mencapai target RPJMD tahun berkenaan (persentase capaian 115,43% dari target 40,69%). Pada tahun 2015 lingkungan pemukiman kumuh sebesar 12,90% menurun 1,95% dari tahun 2014 sebesar 14,85% telah mencapai target RPJMD tahun berkenaan (persentase capaian 29,59% dari target 43,60 % , indikator ini berupa limit maksimal, sehingga apabila realisasi dibawah target maka status capaian adalah sudah tercapai). Untuk rumah layak

huni pada tahun 2015 sebesar 72,45%, angka ini naik sebesar 0,28% dari tahun 2014 sebesar 72,17% rumah yang layak huni. Indikator kinerja pada urusan perumahan ini perlu kerja keras/ belum mencapai target dari RPJMD untuk tahun keempat/2014 (target 87,89%).

- c. Aspek pelayanan umum urusan pengairan indikator kinerja yang diukur adalah: rasio jaringan irigasi rawa; panjang jaringan irigasi rawa dalam kondisi baik (primer, sekunder, tersier); jumlah bangunan air dalam kondisi baik; dan panjang tanggul dalam kondisi baik. Pada tahun 2015 rasio jaringan irigasi rawa sebesar 38,71% meningkat 3,12% dari tahun 2014 yang sebesar 35,59% dan telah mencapai target RPJMD tahun berkenaan (persentase capaian 122,19%). Panjang jaringan irigasi rawa dalam kondisi baik (primer, sekunder, tersier) tahun 2015 sebesar 77,51%. Angka ini meningkat 14,9% dari tahun 2014 sebesar 62,61% telah mencapai target RPJMD tahun berkenaan (persentase capaian 128,48%). Jumlah bangunan air dalam kondisi baik tahun 2015 sebesar 72,21% meningkat jumlahnya sebesar 15,60% dari tahun 2014 sebesar 55,61%. Jumlah bangunan air dalam kondisi baik pada tahun 2015 telah mencapai target RPJMD tahun berkenaan (persentase capaian 106,47%). Panjang tanggul dalam kondisi baik pada tahun 2015 sebesar 71,60% meningkat sebesar 47,75% dari tahun 2014 sebesar 23,85% dan telah mencapai target RPJMD tahun berkenaan.

Berkaitan dengan pelaksanaan infrastruktur dasar tersebut, untuk tahun-tahun ke depan perlu penegasan penanganan kegiatan untuk pembangunan maupun pemeliharaan/rehabilitasi infrastruktur. Keterbatasan sumber pendanaan untuk pembangunan infrastruktur beberapa tahun terakhir ini menjadi masalah pemerintah khususnya pemerintah daerah. Pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kemampuan pendanaan pemerintah, baik pemerintah pusat melalui APBN maupun pemerintah daerah melalui APBD. Untuk itu perlu adanya sinkronisasi penanganan program dan kegiatan yang pendanaannya dari APBN maupun APBD Provinsi dan APBD kabupaten.

## **2) Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi**

Upaya percepatan pertumbuhan ekonomi daerah mengalami peningkatan sebesar 0,23%, Tahun 2015 pertumbuhan ekonomi sebesar 5,06% (proyeksi) meningkat dari tahun 2014 sebesar 4,83% akan tetapi belum mencapai target RPJMD tahun berkenaan (persentase capaian 74,30%), hal ini disebabkan karena menurunnya kontribusi/ distribusi dua sektor dari tiga sektor utama perekonomian daerah yaitu sektor pertanian dan sektor industri pengolahan (sektor pertanian tahun 2015 sebesar 44,93% menurun 0,19% dari tahun 2014 sebesar 45,12%; sektor industri pengolahan tahun 2015 sebesar 8,97%



menurun 0,02% dari tahun 2014 sebesar 8,99%). Kemudian sektor Listrik, Gas dan Air bersih serta sektor Keuangan, Sewa dan Jasa juga konstan serta ada yang mengalami penurunan (sehingga tidak mencapai target tahun berkenaan).

- Inflasi menjadi salah satu indikator untuk melihat stabilitas ekonomi suatu daerah, karena dapat menggambarkan naik turunnya harga. Pada tahun 2015 diproyeksikan capaiannya sebesar 5,36% menurun dibandingkan dengan tahun 2013 yaitu sebesar 6,96% (membaik). Keadaan ekonomi suatu daerah dikatakan makin stabil ditunjukkan oleh perkembangan laju inflasi yang kecil/rendah.

Besarnya PDRB perkapita merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Seiring meningkatnya PDRB, PDRB perkapita juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 PDRB perkapita (harga berlaku) sebesar Rp. 18,44 juta di proyeksikan mengalami peningkatan di tahun 2015 menjadi Rp. 19,78 juta atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 1,34 juta. Untuk lebih meningkatkan pendapatan perkapita, maka laju pertumbuhan ekonomi harus ditingkatkan dan sebaliknya laju pertumbuhan penduduk perlu untuk dikendalikan, karena pada dasarnya laju pertumbuhan penduduk yang cepat akan berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi terutama sekali terhadap perkembangan pendapatan regional. Pembangunan ekonomi terutama sekali terhadap perkembangan pendapatan regional.

- Menyadari terbatasnya anggaran pemerintah untuk kegiatan pembangunan, pemerintah daerah berusaha mendorong pihak swasta untuk meningkatkan kegiatan penanaman modal di Kabupaten Sambas. Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal baik untuk swasta domestik (PMDN) maupun asing (PMA). Hal ini dilakukan untuk mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal guna mendorong pengembangan ekonomi potensial, meningkatkan lapangan kerja dan penguatan daya saing perekonomian.

Selanjutnya dalam hal penanaman modal yang dilakukan pihak swasta di Kabupaten Sambas, khususnya terkait dengan investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA), beberapa tahun terakhir ini secara keseluruhan realisasi investasi swasta di Kabupaten Sambas belum optimal sebagaimana yang diharapkan. Upaya peningkatan investasi masih berhadapan dengan berbagai persoalan diantaranya terbatasnya ketersediaan infrastruktur, belum optimalnya informasi penanaman modal daerah serta terbatasnya profil investasi komoditi unggulan daerah.

### **3) Peningkatan Pertanian dan Ketahanan Pangan**

Beberapa capaian guna mengukur peningkatan dibidang Pertanian dan Ketahanan Pangan yaitu diantaranya berupa Tanaman Pangan dengan Produktivitas Padi pada tahun 2015 sebesar 28,22 kw/ha menurun sebesar 5,07 kw/ha dari tahun 2014 sebesar 33,29 kw/ha, kondisi ini belum tercapai dari target RPJMD pada tahun berkenaan (persentase capaian 81,80%). Produktivitas Kedelai pada tahun 2015 sebesar 18,47 kw/ha meningkat sebesar 2,35 kw/ha dari tahun 2014 sebesar 16,12 kw/ha, kondisi ini tercapai dari target RPJMD pada tahun berkenaan (persentase capaian 153,92%). Produktivitas Jagung pada tahun 2015 sebesar 18,17 kw/ha meningkat sebesar 0,06 kw/ha dari tahun 2014 sebesar 18,11 kw/ha, kondisi ini belum tercapai dari target RPJMD pada tahun berkenaan (persentase capaian 72,68%).

Untuk Peternakan, Jumlah Kambing pada tahun 2015 sebanyak 24.935 ekor berkurang sebanyak 602 ekor dari tahun 2014 sebanyak 25.537 ekor, akan kondisi ini tercapai dari target RPJMD pada tahun berkenaan (persentase capaian 131,33%). Jumlah Sapi pada tahun 2015 sebanyak 11.096 ekor bertambah sebanyak 73 ekor dari tahun 2014 sebanyak 11.023 ekor, kondisi ini belum tercapai dari target RPJMD pada tahun berkenaan (persentase capaian 92,47%). Jumlah Ayam Pedaging pada tahun 2015 sebanyak 416.129 ekor bertambah sebanyak 193.746 ekor dari tahun 2014 sebanyak 222.383 ekor, kondisi ini telah tercapai dari target RPJMD pada tahun berkenaan (persentase capaian 101,49%). Jumlah itik pada tahun 2015 sebanyak 266.131 ekor berkurang sebanyak 7.607 ekor dari tahun 2014 sebanyak 273.738 ekor, akan tetapi kondisi ini masih lebih tinggi dari target RPJMD pada tahun berkenaan (persentase capaian 144,64%).

Untuk ketersediaan dan Cadangan Pangan, pada indikator Ketersediaan Energi dan Protein perkapita pada tahun 2015 sebesar 77% meningkat dari tahun 2014 dengan capaian sebesar 74%, akan tetapi kondisi ini belum mencapai dari target RPJMD pada tahun berkenaan (persentase capaian 95,06%). Ketersediaan pangan strategis sangat diandalkan dalam membentuk ketahanan pangan. Permintaan pangan strategis yang cenderung terus meningkat harus didukung dengan berbagai kebijakan seperti ketersediaan lahan, bibit dan pupuk yang memadai untuk dapat memproduksi pangan tersebut sesuai dengan permintaan. Kurangnya pasokan sehingga permintaan pangan strategis tidak terpenuhi dapat mengakibatkan kenaikan harga yang bisa menggaggu ketahanan pangan daerah. Pada tahun 2015, total ketersediaan energy per kapita per hari mengalami peningkatan yaitu dari 2.707 KKal menjadi 2.836 KKal, demikian pula ketersediaan protein menurun dari 80.75 gram menjadi



71,12 gram. Dari hasil tersebut, menunjukkan bahwa tingkat ketersediaan energi dan protein sudah melebihi anjuran angka kecukupan Energi (AKE) 2.200 KKal/Ka/hari dan angka kecukupan protein 57 gram/kap/hari. Capaian ketersediaan energi dan protein per kapita dipersentasekan sebesar 77%. Untuk indikator Penguatan Cadangan Pangan pada tahun 2015 sebesar 54,2% meningkat dari tahun 2014 dengan capaian sebesar 25%, akan tetapi kondisi ini masih belum mencapai target RPJMD pada tahun berkenaan (persentase capaian 95,09%). Capaian penguatan cadangan pangan tahun 2015 sebesar 32,5 ton beras atau setara dengan 54,2% dari target rpjmd sebesar 34 ton atau setara dengan 57%. Secara kuantitas, capaian ini mengalami peningkatan dibanding tahun lalu, dimana pada tahun 2014 jumlah rill cadangan pangan pemerintah kabupaten mengalami penambahan sebesar 2,5 ton, namun pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 5 ton beras. Kondisi rill ketersediaan cadangan pangan pemerintah kabupaten secara keseluruhan sampai pada tahun 2015 sebesar 14,5 ton beras yang disimpan di Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM). Capaian ini mengalami penurunan kuantitas dibanding tahun lalu, karena adanya distribusi cadangan pangan pemerintah kabupaten ke lokasi rawan pangan. Target cadangan pangan ini bersumber dari dana APBD. Pada tahun 2015, ada penambahan cadangan pangan pemerintah kabupaten sebanyak 5 ton beras. Sampai pada akhir tahun 2015 telah didistribusikan beras sebanyak 18 ton beras masing-masing didistribusikan di desa temajak kecamatan paloh (2014), kecamatan jawai selatan (2015), dan kecamatan pemangkat (2015).

Di Kabupaten Sambas, selain terdapat cadangan pemerintah kabupaten juga terdapat lumbung pangan masyarakat yang pembangunannya melalui DAK/DAU dan pengisian oleh Dana Dekon Propinsi. Pada tahun 2015, terdapat 11 lumbung yang mendapatkan bantuan pengisian lumbung dengan besaran 3 ton beras setiap lumbung yang digunakan sebagai cadangan pangan masyarakat apabila terjadi bencana khususnya di wilayah sekitar lumbung desa.

#### **4) Peningkatan Kesempatan Kerja dan Penanggulangan Kemiskinan**

Beberapa capaian guna mengukur peningkatan dibidang Kesempatan Kerja dan Penanggulangan Kemiskinan yaitu diantaranya berupa Pencari Kerja yang ditempatkan pada tahun 2015 sebesar 94,60% meningkat sebesar 14,37% dari tahun 2014 sebesar 80,23%, dan telah mencapai dari target RPJMD pada tahun berkenaan sebesar 104,42%. Dibandingkan dengan target pencapaian SPM (Standar Pelayanan Minimal) Bidang Ketenagakerjaan, angka pencapaian pencari kerja yang ditempatkan 94,60% telah melampui target SPM yang

ditetapkan Kementerian Ketenagakerjaan R.I sebesar 40 persen, atau telah melebihi target sebesar 54,60%.

Angka Sengketa Pengusaha - Pekerja pertahun pada tahun 2015 sebesar 4,50% meningkat sebesar 1,02% dari tahun 2014 sebesar 3,48%, akan tetapi kondisi ini tercapai dari target RPJMD pada tahun berkenaan sebesar 7,50%, Berdasarkan data olahan Kemenaker RI TPAK Tahun 2015 sebesar 73,54% menurun dari tahun 2014 sebesar 3.02% dari angka 76,56%. TPAK Tahun 2015 juga belum mencapai target RPJMD sebesar 78,70% atau lebih rendah 5,16%. Salah satu faktor yang menyebabkan menurunnya TPAK adalah meningkatnya jumlah bukan angkatan kerja pada tahun 2015.

Keselamatan dan Perlindungan Pekerja pertahun pada tahun 2015 sebesar 40,54% meningkat cukup signifikan sebesar 34,45% dari tahun 2014 sebesar 6,09%, kondisi ini telah tercapai dari target RPJMD pada tahun berkenaan sebesar 101,35%.

Untuk Penanggulangan Kemiskinan diwakili dengan Persentase penduduk diatas garis kemiskinan berdasarkan proyeksi pada tahun 2015 sebesar 90,66% meningkat dari tahun 2014 sebesar 90,00%, kondisi ini belum tercapai dari target RPJMD pada tahun berkenaan sebesar 92,89%, akan tetapi persentase penduduk miskin semakin menurun dibandingkan tahun sebelumnya walaupun belum terlalu menggembirakan.

#### **5) Peningkatan Kemampuan Pengelolaan SDA yang Berwawasan Lingkungan Hidup**

Untuk pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan hidup dapat diwakili dengan telah dilakukannya penegakan hukum dibidang lingkungan oleh instansi terkait, dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup bersinergi dengan semua stakeholder. Kemudian telah dilakukan cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL dengan ditunjukkan pada tahun 2015 sebanyak 75 perusahaan/ badan usaha yang sudah memiliki Dokumen Lingkungan AMDAL.

#### **6) Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh**

Hingga tahun 2015, Rencana pemerintah daerah untuk pengembangan wilayah starategis dan cepat tumbuh melalui pendekatan pembangunan kawasan telah berjalan cukup baik meski belum optimal. Beberapa kawasan seperti Kawasan perbatasan, kawasan minapolitan serta kawasan kebun raya telah mengalami kemajuan yang cukup berarti.

##### **a) Kawasan Perbatasan**

Pada tahun 2015, upaya pemerintah daerah Kabupaten Sambas dalam mengembangkan wilayah perbatasan di kecamatan Paloh dan Kecamatan



Sajingan Besar, antara lain dalam bentuk pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan infrastruktur perdesaan, pembangunan pertanian dan bantuan sosial daerah perbatasan Upaya pengembangan wilayah perbatasan ini dibiayai melalui APBD, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan APBN.

b) Kawasan Minapolitan

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah daerah guna pembangunan dan pengembangan kawasan minapolitan di kecamatan Jawai Selatan (luas sebesar 248,3 Ha di desa Jawai Laut dan 200 Ha di desa Jelu Air). Sedangkan potensi lahan pengembangan terletak di Kecamatan Jawai tepatnya pada kawasan tambak rakyat di desa Sarang Burung dan Sarang Burung Usrat seluas 120 Ha, Sarang Burung Nilam 80 Ha dan desa Sarang Burung Danau 1.100 Ha.

c) Kawasan Kebun Raya Sambas

Pada tahun 2015, Kebun Raya Sambas (KRS) memasuki tahun ke-7 masa pembangunan sebagai salah satu kebun raya daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sambas. Kebun Raya Sambas merupakan salah satu kebun raya yang berada di bawah Pemerintah Daerah, yaitu Kabupaten Sambas yang memiliki keinginan dan komitmen untuk membangun kebun raya. Komitmen tersebut dapat dilihat melalui terbitnya PERDA pembangunan Kebun Raya Sambas pada Desember 2015 ini setelah proses pembuatan yang dilakukan dalam waktu yang sangat panjang. Selama proses perencanaan dan pembangunan berlangsung, KRS yang berada di bawah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sambas juga banyak mendapat bantuan, monitoring dan arahan dari PKT-Kebun Raya (Pusat Konservasi Tumbuhan- Kebun Raya), selain mendapat bantuan dan dukungan dari PEMDA Kabupaten Sambas tentunya.

Kebun Raya Sambas memasuki tahun kedua pendampingan pembangunan kebun raya daerah oleh PTT PKT-Kebun Raya Bogor, setelah sebelumnya tahun 2013 mendapat pendampingan serupa. Fokus pendampingan pembangunan Kebun Raya Sambas oleh PTT PKT-Kebun Raya Bogor tahun 2015 pada pembuatan vak beserta peta kebun, pemeliharaan koleksi, *updating* data registrasi, inspeksi kebun, pembenahan rumah paranet, pembuatan taman sederhana dan penanaman tanaman hias.

Hingga awal Desember 2015, jumlah pekerja di KRS sebanyak 6 orang, yang terdiri dari 4 orang PNS dan 2 orang honorer. Di tahun ini,

KRS mendapatkan 1 kali detasering dan 1 kali monitoring dari Kebun Raya Bogor. Pegawai KRS juga berkesempatan mengikuti diklat teknis dan diklat manajemen di Kebun Raya Bogor selama 3 hari.

Dengan adanya kegiatan pendampingan pembangunan Kebun Raya Daerah, diharapkan Kebun Raya Sambas dapat diarahkan untuk menjalankan beberapa fungsi Kebun Raya seperti fungsi Konservasi dan Penelitian. Selain itu pihak pengelola juga diharapkan dapat makin bersemangat dalam mempercepat dan memperjuangkan pembangunan Kebun Raya Sambas yang memiliki target *launching* pada tahun 2019.

#### **4. VISI SAMBAS MADANI**

##### **1. Peningkatan Reformasi Birokrasi (Tata Kelola Pemerintahan)**

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (tata kelola pemerintahan) dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik ini perlu mengedepankan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, efektif, efisien, menjunjung tinggi supremasi hukum, demokratisasi, transparansi dan membuka partisipasi masyarakat. Pelaksanaan prinsip-prinsip ini ditujukan untuk menjamin kelancaran, keserasian dan keterpaduan tugas serta fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pencapaian pelaksanaan program yang telah dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Sambas diantaranya melaksanakan Analisis Jabatan, membuat Raperda pelayanan publik, membuat SOP SKPD, melaksanakan BLUD pada seluruh Puskesmas se Kabupaten Sambas dan pelaksanaan BLUD pada RSUD Sambas dan RSUD Pemangkat serta pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) di 19 Kantor Camat seKabupaten Sambas.

Kemajuan lain yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Sambas pada Reformasi Birokrasi khususnya penguatan pengawasan, pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Sambas telah melaksanakan Pembangunan Zona Integritas. Pencanangan Pembangunan zona integritas diawali dengan Pencanangan atau pernyataan komitmen dari Bupati bahwa telah siap untuk membangun zona integritas. Hal ini telah dilaksanakan secara kolektif seluruh Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat di Kantor Gubernur Kalbar pada tanggal 14 April 2015 yang disaksikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Ketua Ombudsman Perwakilan Kalimantan Barat

Sesuai dengan rencana pada *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2015-2019, pada tahun 2015 akan dibangun zona integritas menuju WBK/WBBM pada 4 (empat) SKPD yaitu Sekretariat Daerah,



Inspektorat, BAPPEDA dan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT). Pencanangan 4 SKPD tersebut sebagai zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2015 oleh Bupati Sambas yang diwakili oleh Bapak Wakil Bupati Sambas, DR.Pabali Musa, M.Ag.

Selain itu salah satu sasaran yang menjadi agenda Reformasi Birokrasi yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Target yang ingin dicapai adalah : (a) meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau); (b) meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional; (c) meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Unsur-unsur yang dinilai sebagai pelaksanaan Reformasi Birokrasi antara lain : Standar pelayanan, budaya pelayanan prima, pengelolaan pengaduan, penilaian kepuasan terhadap pelayanan, pemanfaatan teknologi informasi. Seluruh unsur penilaian Reformasi Birokrasi tersebut menjadi tugas SKPD yang telah dijalankan selama tahun 2015.

## **2. Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan dan Demokrasi**

Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan diantaranya ditunjukkan dengan telah diPerdakannya dokumen perencanaan RPJPD, RPJMD dan di Perkadakannya RKPD Kab. Sambas, serta dapat pula ditunjukkan dengan prosentase konsistensi penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD, tahun 2015 sebesar 98,66 % meningkat sebesar 2,80% dari tahun 2014 sebesar 95,86%. Dengan realisasi capaian terhadap target tahun berkenaan sebesar 147,25%.

## **3. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan daerah dapat ditunjukkan dengan ditetapkannya APBD tahun 2015 yang tepat waktu, Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHPD) tepat waktu, serta meningkatnya kualitas opini BPK dengan penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

## **4. Peningkatan Kesadaran Hukum**

Dapat ditunjukkan dengan telah dilakukannya peningkatan penegakan PERDA tahun 2015 sebesar 81,33 % meningkat sebesar 9,09% dari tahun 2014 sebesar 72,24%, akan tetapi belum mencapai target indikator kinerja tahun berkenaan, dengan realisasi capaian sebesar 96,72%.

Meningkatnya budaya kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat, ditunjukkan pada tahun 2015 sebesar 82,21 % meningkat sebesar 8,43% dari tahun 2014 sebesar

73,78% akan tetapi belum mencapai target indikator kinerja tahun berkenaan, dengan realisasi capaian sebesar 96,72%.

#### **4. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban**

Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) tahun 2015 sebesar 85,02 % meningkat sebesar 3,37% dari tahun 2014 sebesar 81,65% dan telah mencapai target indikator kinerja tahun berkenaan, dengan realisasi capaian sebesar 100%.

Meningkatnya kerjasama dan koordinasi antar Pemda dan kepolisian dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban semakin meningkat, begitu pula dengan semakin meningkatnya kesadaran swakarsa masyarakat untuk menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban.

## **2.2. Permasalahan Pembangunan Daerah**

### **A. Urusan Wajib**

#### **1. Urusan Pendidikan**

Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan keseluruhan program dan kegiatan urusan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas tahun 2015 adalah sebagai berikut :

- 1) Data yang belum ter-update sepenuhnya (Tidak Relevan dengan keadaan terkini);
- 2) Meningkatnya Kasus Kenakalan Remaja;
- 3) Rendahnya Kompetensi Guru dan belum meratanya jumlah guru dengan sekolah yang ada di Kabupaten Sambas yang menyebabkan pemanfaatan guru belum sepenuhnya optimal;
- 4) Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha di bidang Pendidikan masih rendah;
- 5) Kurang Berimbangnya Porsi Pendanaan Kegiatan Fisik dan Non Fisik Guna Mendukung Peningkatan Mutu Pendidikan di Kabupaten Sambas.

#### **2. Urusan Kesehatan**

Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan keseluruhan program dan kegiatan urusan kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas tahun 2015 adalah sebagai berikut :

- 1) Terbatasnya jumlah sarana dan prasarana serta tenaga medis di Kabupaten Sambas mengakibatkan pelayanan kesehatan belum optimal;
- 2) Kerjasama lintas sektoral yang belum maksimal, terlihat masing-masing sektor masih memperlihatkan perannya sendiri-sendiri, sedangkan pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan belum menjadi suatu program kerja bersama;



- 3) Banyaknya data yang diperlukan tidak dapat diperoleh dan tingkat validitas data yang belum akurat;
- 4) Adanya kesenjangan-kesenjangan dari beberapa kegiatan (seperti adanya drop out), hal itu menunjukkan adanya kesempatan yang hilang (*lost opportunity*) dan berarti masalah mutu pelayanan masih kurang;
- 5) Masih kurang pemberdayaan masyarakat dalam membudidayakan perilaku hidup bersih dan sehat.

### 3. Urusan Lingkungan Hidup

Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan keseluruhan program dan kegiatan urusan Lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas tahun 2015 adalah sebagai berikut :

- 1) Masih kurangnya koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- 2) Masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung pemantauan pencemaran lingkungan;
- 3) Masih lemahnya penegakan hukum bagi pencemar lingkungan (*law enforcement* belum optimal);
- 4) Program dan Pengelolaan lingkungan masih berjalan secara parsial;
- 5) Belum tersedianya SDM Aparatur yang memiliki spesialisasi khusus, untuk mendukung pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup (belum adanya Analis Kimia dan sebagainya);
- 6) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam aspek kelestarian lingkungan.

### 4. Urusan Pekerjaan Umum

Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan keseluruhan program dan kegiatan urusan Pekerjaan Umum Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

- 1) Kualitas dan Kuantitas ketersediaan infrastruktur yang masih terbatas;
- 2) Kesulitan Aksesibilitas antar lokasi;
- 3) Keterlambatan penyelesaian pekerjaan fisik yang disebabkan karena faktor alam yang tidak dapat di hindari diantaranya kondisi lapangan dan geografis wilayah serta iklim/cuaca dengan curah hujan yang relative tinggi yang mengakibatkan genangan air;
- 4) Cakupan Pelayanan air bersih perpipaan serta sanitasi lingkungan yang belum merata;
- 5) Ketersediaan Sumber Daya Energi dan Kelistrikan yang masih terbatas dan tidak merata.

#### 5. Urusan Penataan Ruang

Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan keseluruhan program dan kegiatan urusan Penataan Ruang Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

- 1) Dalam penataan ruang seluruh sektor mempunyai peran yang strategis, koordinasi antar sektor sangat diperlukan yang dilaksanakan melalui Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Sambas, terutama yang terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK);
- 2) Perda RTRW Kabupaten Sambas Tahun 2015 -2035 Nomor 17 Tahun 2015 dikeluarkan pada 31 Desember 2015;
- 3) Setelah Perda RTRW Kabupaten Sambas diterbitkan maka dapat disusun segera produk rencana tata ruang turunannya yaitu Rencana Detail Tata Ruang beserta Peraturan Zonasi, Rencana Tata Bangunan Lingkungan, maupun Rencana Strategis Lainnya;
- 4) Kabupaten Sambas memiliki Sembilan Belas (19) Ibukota Kecamatan (IKK). Menurut ketentuan setiap IKK wajib memiliki RDTR beserta Peraturan Zonasi. Namun hanya terdapat Tujuh IKK yang memiliki RDTR, Empat IKK yang memiliki RDTR tetapi telah habis masa berlakunya sehingga perlu direvisi, dan terdapat delapan IKK yang masih belum pernah memiliki RDTR ataupun Dokumen perencanaan lainnya.

#### 6. Urusan Perencanaan Pembangunan

Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan keseluruhan program dan kegiatan urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

- 1) Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam RPJMD, Renstra, maupun RKPd dalam merencanakan kegiatan;
- 2) Adanya kesenjangan antara kemampuan anggaran pemerintah daerah dan banyaknya rencana kegiatan urgen yang diusulkan untuk dilaksanakan;
- 3) Belum terintegrasinya program dan kegiatan pada masing – masing SKPD pada perencanaan pembangunan yang bersifat lintas sektoral sehingga perencanaan masih bersifat parsial.

#### 7. Urusan Perumahan

Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan keseluruhan program dan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Keciptakarya di wilayah Kabupaten Sambas pada tahun 2015, dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Wilayah kabupaten Sambas yang cukup luas memerlukan perencanaan teknis kegiatan yang dapat mengakomodir kegiatan agar dapat berjalan sesuai dengan rencana;



- 2) Kurangnya tenaga teknis lapangan yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan untuk memonitor kegiatan yang tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Sambas;
- 3) Keterbatasan anggaran daerah dalam mengimplementasikan dan pemerataan seluruh rencana kegiatan pembangunan sarana dan prasarana keciptakaryaan.

8. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Hambatan atau Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2015 dikemukakan sebagai berikut :

- 1) Dalam menyusun Program Kerja Belum di dukung oleh data yang akurat dan informasi serta kelemahan dalam memahami peraturan perundang-undangan sebagai aturan pelaksanaan;
- 2) Belum terkoordinasinya program dan kegiatan baik di dalam lingkungan sendiri maupun dengan pihak luar sehingga dalam pencapaian tujuan dan sasaran masih bersipat parsial;
- 3) Belum meratanya ketersediaan sarana dan prasarana olahraga yang layak dan sesuai standar;
- 4) Keterlibatan Peran serta pemuda yang masih rendah dalam kegiatan pembangunan Daerah.

9. Urusan Penanaman Modal

Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan keseluruhan program dan kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sambas pada tahun 2015, dapat dikemukakan sebagai berikut :

- 1) Terbatasnya jumlah Sumber Daya Aparatur yang mempunyai keahlian di bidang teknis (keahlian IT);
- 2) Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung proses pelayanan perizinan dan non perizinan;
- 3) Terbatasnya sarana mobilitas untuk melaksanakan kegiatan di lapangan;
- 4) Terbatasnya kemampuan sistem/perangkat lunak guna menunjang kelancaran kegiatan sosialisasi pelayanan perizinan kepada masyarakat;
- 5) Masih lemahnya dukungan dinas/instansi di Kabupaten Sambas dalam proses Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu.

10. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Permasalahan yang dihadapi urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam melaksanakan kegiatan pada tahun 2015 dikemukakan sebagai berikut :

- 1) Keterbatasan bahan baku sehingga proses produksi terkendala;
- 2) Tingginya ongkos produksi seperti listrik dan BBM;

- 3) Infrastruktur yang kurang mendukung sehingga menyebabkan akses ke IKM kurang lancar;
- 4) Kurangnya keterampilan dalam diversifikasi produk dan penggunaan teknologi tepat guna;
- 5) Umumnya usaha yang ada masih bersifat konvensional/sampingan;
- 6) Masih ada bangunan pasar yang tidak layak untuk ditempati dan terdapat di beberapa Kecamatan yang belum memiliki pasar;
- 7) Luasnya wilayah pengawasan barang dan Jasa Kabupaten Sambas yang sangat luas;
- 8) Seringkali di lapangan bahwa terdapat beberapa pedagang yang masih tidak menempati pasar pemda. Umumnya mereka merupakan pedagang baru yang baru memulai usaha, belum merasakan pasang surut berjualan, sehingga seringkali ditemukan berjualan dan kadang tidak berjualan. Ditambah permasalahan lainnya antara pedagang makanan yang baru memulai usaha dengan yang sudah lama berjualan, seperti pada kasus persaingan pelanggan, rasa dan harga.

#### 11. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Permasalahan yang dihadapi urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dalam melaksanakan kegiatan pada tahun 2015 dikemukakan sebagai berikut :

- 1) Minimnya peralatan dan perlengkapan sarana/prasarana, gedung/ruangan Kerja;
- 2) Revisi Rincian Kertas Kerja Satker mengenai jumlah volume pengadaan blangko dan Formulir Pencatatan Sipil pada kegiatan Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan;
- 3) Revisi Rincian Kertas Kerja Satker pada kegiatan Pelayanan KTP Elektronik dan Dokumen Kependudukan Lainnya mengenai honor output kegiatan semula Tim Pelayanan KTP Elektronik berubah menjadi Tim Pelayanan Administrasi Kependudukan;

#### 12. Urusan Ketenaga Kerjaan

Permasalahan yang dihadapi urusan Ketenaga Kerjaan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2015 dikemukakan sebagai berikut :

- 1) Sarana dan prasarana yang belum memadai;
- 2) Keterbatasan sumberdaya manusia serta Kesulitan Aksesibilitas antar lokasi kegiatan;
- 3) Rendahnya kualitas dan daya saing tenaga kerja lokal.



### 13. Urusan Ketahanan Pangan

Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan keseluruhan program dan kegiatan urusan ketahanan pangan pada tahun 2015, dapat dikemukakan sebagai berikut :

- 1) Kerjasama lintas sektoral yang belum terpadu, terlihat masing-masing sektor masih memperlihatkan perannya sendiri-sendiri, sedangkan pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan belum menjadi suatu program kerja bersama;
- 2) Kurangnya sumber daya manusia disetiap jenjang administrasi yang memiliki kemampuan dan profesionalisme dalam rangka menentukan strategi (program, kegiatan dan kebijakan);
- 3) Banyaknya data yang diperlukan tidak dapat diperoleh dan tingkat validitas data yang belum akurat;
- 4) Adanya kesenjangan-kesenjangan dari beberapa kegiatan (seperti adanya drop out), hal itu menunjukkan adanya kesempatan yang hilang (lost opportunity);
- 5) Masih kurangnya pemberdayaan masyarakat dalam mendapatkan pelatihan dan pengolahan hasil.

### 14. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan yang dihadapi urusan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan kegiatan pada tahun 2015 dikemukakan sebagai berikut :

- 1) Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan perempuan ;
- 2) Tingginya kasus kekerasan dan trafficking terhadap perempuan dan anak ;
- 3) Rendahnya tingkat partisipasi ekonomi perempuan ;
- 4) Sulitnya memonitor korban yang disebabkan oleh kasus TKW illegal ;
- 5) Pergaulan bebas para remaja yang mengarah pada perilaku negative
- 6) Tingginya angka perkawinan usia dini (dibawah 20 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki) ;
- 7) Tingginya angka perceraian usia dini ;
- 8) Terjadinya tindak kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak ;
- 9) Terdapatnya pengguna zat adiktif oleh kalangan anak.

### 15. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Permasalahan yang dihadapi urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2015 dikemukakan sebagai berikut :

- 1) Masih tingginya angka kelahiran ;
- 2) Balai penyuluhan KB belum dimanfaatkan secara optimal ;
- 3) Belum optimalnya penggunaan Alat Bantu Pengambil Keputusan (ABPK) dan KIE KIT dalam kegiatan konseling KB ;

- 4) Masih rendahnya pemahaman PUS Muda akan manfaat KB secara luas sebagai alat pengatur kelahiran ;
- 5) Rendahnya peserta KB Jangka Panjang (MKJP) dan rendahnya kesertaan pria dalam ber KB ;
- 6) Tingkat pengetahuan masyarakat tentang KESPRO relatif masih rendah;
- 7) Jumlah tenaga kader yang terlatih masih sangat sedikit;
- 8) Intensitas pelaksanaan KIE melalui media massa masih rendah;
- 9) Pemanfaatan momentum strategis sebagai media penggerak belum terlaksana secara maksimal;
- 10) Masih kurangnya pelatihan dan pembinaan kader;
- 11) Rendahnya peranserta keluarga dalam keanggotaan kelompok bina-bina.

#### 16. Urusan Perhubungan

- 1) Masalah/Kendala yang dihadapi dalam hal Tugas Pokok dan Fungsi adalah masih kurang tepatnya struktur organisasi yang ada sekarang dengan kondisi di wilayah kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas;
- 2) Selain itu dalam melaksanakan tugas sehari-hari adalah minimnya peralatan dan perlengkapan sarana / prasarana, gedung/ruangan kerja, sumber daya manusia yang kurang baik kualitas maupun kuantitasnya dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika serta terbatasnya dana yang tersedia.

#### 17. Urusan Komunikasi dan Informatika

Permasalahan yang dihadapi urusan Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan kegiatan pada tahun 2015 dikemukakan sebagai berikut :

- 1) Adanya tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas yang tidak maksimal yaitu pengelolaan TV Daerah dikarenakan keberadaan TV Daerah sendiri masih belum formal dan tidak mempunyai payung hukum;
- 2) Keterbatasan SDM bidang komunikasi dan informatika serta kurangnya anggaran juga menjadi masalah dan kendala dalam pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika di Kabupaten Sambas;
- 3) Belum meratanya sarana dan prasarana telekomunikasi di Kabupaten Sambas.

#### 18. Urusan Pertanahan

- 1) Perlu adanya sosialisasi terhadap Peraturan Perundang-undangan Pertanahan serta aturan terkait Kewenangan pemberian izin membuka tanah (lahan) guna menghindari sengketa tanah yang dapat memicu konflik di masyarakat;
- 2) Tanah yang ditawarkan oleh pemilik tanah melebihi/jauh di atas standar harga



yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sambas dan Penilaian Tim Appraisal/Lembaga Independent Penaksir Harga Ganti Rugi Tanah (Jasa Konsultasi Penaksiran Harga Tanah untuk Pengadaan tanah bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas).

19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Secara umum kegiatan dapat dilaksanakan, walaupun masih dirasakan adanya hambatan dalam pelaksanaan tugas, antara lain :

- 1) Keterbatasan SDM dan personil apabila dibandingkan dengan volume pekerjaan yang semakin meningkat;
- 2) Kegiatan yang dilaksanakan belum bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat karena luasnya cakupan wilayah binaan;
- 3) Masih banyak masyarakat yang belum memahami program Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sambas.

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Terkait dengan asistensi pengkajian Rancangan Peraturan Desa, permasalahan utama yang dihadapi dalam kegiatan ini adalah masih banyaknya aparat desa yang belum memahami benar tata cara pembentukan Peraturan Desa, dan masih belum optimalnya peran Kecamatan dalam melakukan pembinaan menyangkut materi produk hukum desa.

21. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan keseluruhan program dan kegiatan di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tahun 2015, dapat dikemukakan sebagai berikut :

- 1) Kurangnya data pendukung dalam rangka penyelenggaraan pembinaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan;
- 2) Keterbatasan SDM dan sarana pendukung.

22. Urusan Sosial

Pada sektor Sosial, ada beberapa permasalahan yang dihadapi seperti :

- 1) Belum maksimalnya bantuan yang disalurkan akibat banyaknya permohonan bantuan dari masyarakat dan bantuan kepada penyandang cacat;
- 2) Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang melaksanakan urusan sosial masih kurang, baik secara kualitas maupun kuantitas.

23. Urusan Kebudayaan

Dalam menyusun Program Kerja Belum di dukung oleh data yang akurat dan informasi serta kelemahan dalam memahami peraturan perundang-undangan sebagai aturan pelaksanaan, belum terkoordinasinya program dan kegiatan baik di

dalam lingkungan sendiri maupun dengan pihak luar sehingga dalam pencapaian tujuan dan sasaran masih bersifat parsial.

#### 24. Urusan Statistik

- 1) Data merupakan hal yang paling penting dalam proses perencanaan, penganggaran, dan evaluasi namun masih ada SKPD yang belum optimal mengelola data dan beberapa masih terdefragmentasi sehingga apabila data tersebut diperlukan dengan cepat menjadi terkendala atau terhambat;
- 2) Penyampaian data-data oleh beberapa SKPD tidak sesuai dengan jadwal permintaan yang telah ditentukan, sehingga menjadi kendala dalam pengembangan data dan informasi statistik.

#### 25. Urusan Kearsipan

Permasalahan yang dihadapi didalam melaksanakan keseluruhan program dan kegiatan pada tahun 2015, dapat dikemukakan sebagai berikut :

- 1) Dalam rangka penyusunan penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan-urusan diatas, kekurangan data dan informasi serta kelemahan didalam memahami peraturan perundang-undangan sebagai aturan pelaksanaan;
- 2) Kurangnya data pendukung dalam rangka penyiapan bahan pembinaan dan perumusan kebijakan;
- 3) Kurangnya Personil di lingkungan SKPD Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Sambas, sehingga masing-masing personil mempunyai beban kerja yang lebih besar dalam upaya mencapai sasaran program dan kegiatan yang ditargetkan.

#### 26. Urusan Perpustakaan

Permasalahan yang dihadapi urusan Perpustakaan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2015 dikemukakan sebagai berikut :

- 1) Tidak adanya gedung kantor, depo arsip dan ruang baca perpustakaan yang representatif beserta sarana perlengkapannya seperti :
- 2) Meubeler kantor;
- 3) Lemari tahan api;
- 4) Perangkat komputer;
- 5) Belum tersedianya SDM kearsipan dan perpustakaan yang berkompeten (Arsiparis dan pustakawan) untuk pengelolaan arsip dan perpustakaan;
- 6) Rendahnya tingkat kunjungan ke perpustakaan daerah mengindikasikan rendahnya minat baca masyarakat pada umumnya.



## B. Urusan Pilihan

### 1. Urusan Pertanian

Permasalahan yang dihadapi urusan pertanian ialah sebagai berikut:

- 1) Belum optimalnya sinergitas dan koordinasi antar instansi;
- 2) Belum optimalnya penggunaan teknologi dalam sistem budidaya tanaman pangan (penggunaan benih unggul bermutu, pupuk, pengaturan jadwal tanam dan penggunaan jarak tanam);
- 3) Indeks pertanaman (IP) masih belum optimal;
- 4) Adanya serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
- 5) Adanya dampak perubahan iklim (Kekeringan/banjir).

### 2. Urusan Kelautan dan Perikanan

Permasalahan yang dihadapi urusan kelautan dan perikanan ialah sebagai berikut:

- 1) Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya ikan;
- 2) Kurangnya sarana dan prasarana infrastruktur;
- 3) Kurangnya peningkatan teknologi, inovasi dan promosi pengolahan hasil perikanan;
- 4) Belum optimalnya sistem informasi pasar dan regulasi yang ada;
- 5) Keindahan alam pesisir Sambas belum dikelola dengan baik;
- 6) Belum adanya kawasan konservasi sebagai tempat Bank Ikan dan pelestarian hewan yang dilindungi.

### 3. Urusan Pariwisata

Permasalahan yang dihadapi urusan pariwisata ialah sebagai berikut:

- 1) Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata daerah Kabupaten Sambas;
- 2) Terbatasnya ketersediaan infrastruktur atau sarana dan prasarana pendukung kepariwisataan;
- 3) Belum optimalnya sinergitas lintas sektoral di bidang kepariwisataan;
- 4) Lemahnya promosi objek wisata serta belum tersedianya kalender event destinasi wisata di kabupaten sambas.

### 4. Urusan Kehutanan

Permasalahan yang dihadapi urusan kehutanan ialah sebagai berikut:

- 1) Luasnya lahan kritis yang harus direhabilitasi sesuai kawasan peruntukannya;
- 2) Tingginya intensitas kejadian kebakaran hutan dan lahan khususnya di musim kemarau;
- 3) Kurangnya kepedulian masyarakat/ kelompok masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan;



- 4) Belum tersedianya data potensi sumber daya hutan yang dapat menggambarkan kondisi kawasan hutan saat ini yang berguna untuk perencanaan penanganan kawasan hutan atau lahan kritis;
- 5) Masih adanya kejadian tindak kejahatan di bidang kehutanan.

5. Urusan Perdagangan

Permasalahan yang dihadapi urusan perdagangan ialah sebagai berikut:

- 1) Kurangnya kualitas dan kuantitas sarana perdagangan khususnya pasar;
- 2) Lemahnya penanganan pasca panen bagi petani;
- 3) Lemahnya daya saing dan diversifikasi produk;
- 4) Kurangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri;
- 5) Masih banyaknya barang dan kegiatan illegal trading yang dilakukan pelaku usaha;
- 6) Banyaknya pengaduan konsumen yang tidak dapat diselesaikan akibat belum terbentuknya BPSK Kab. Sambas.

6. Urusan Perindustrian

Permasalahan yang dihadapi urusan perindustrian ialah sebagai berikut:

- 1) Belum optimalnya pemanfaatan potensi lokal dan pola pikir pelaku IKM yang masih sederhana;
- 2) Kurangnya penerapan dan penggunaan teknologi tepat guna;
- 3) Kurangnya promosi produk daerah;
- 4) Kurangnya sinkronisasi dan koordinasi program secara bersama antar instansi terkait dalam hal potensi sumber daya industri daerah yang akan dibina berkelanjutan;
- 5) Tersebarnya IKM usaha yang sejenis disatu wilayah.



## BAB III

### RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

#### 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

##### 3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2015 dan Perkiraan Tahun 2017

Pertumbuhan ekonomi tahun 2015 diproyeksikan capaiannya sebesar 4,93% dari target RPJMD 6,81%. Meskipun target pertumbuhan ekonomi tidak tercapai namun secara sektoral, semua sektor ekonomi mengalami pertumbuhan positif meskipun hampir semua pertumbuhannya mengalami perlambatan dari tahun sebelumnya kecuali sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; dan Jasa Perusahaan yang pertumbuhannya lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan tertinggi pada sektor pertambangan dan galian (8,49%), diikuti sektor Jasa Keuangan dan Asuransi (7,87%) dan sektor Konstruksi (7,79%).

Untuk tahun 2017, Pertumbuhan ekonomi diprediksi melambat dari tahun sebelumnya. Semua sektor mengalami perlambatan dari tahun 2016, meskipun semua sektor mengalami penurunan dari tahun 2016 namun pertumbuhannya positif.

Untuk lebih jelasnya, pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sambas (%) berdasarkan sektor-sektor ekonomi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.1.1  
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sambas (%)

Lapangan Usaha	2013*)	2014**)	2015p)	2016p)	2017p)
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	6,31	3,36	4,61	4,13	3,97
2. Pertambangan dan Penggalian	10,55	14,09	8,49	8,91	8,18
3. Industri Pengolahan	4,64	4,60	3,99	3,99	3,84
4. Pengadaan Listrik dan Gas	3,01	9,61	3,11	4,71	4,50
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,37	5,69	3,51	3,43	3,32
6. Konstruksi	13,06	13,12	7,79	8,65	7,96
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,51	4,04	5,86	4,90	4,67
8. Transportasi dan Pergudangan	4,52	5,14	5,17	4,71	4,50
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,60	6,13	4,99	4,94	4,71
10. Informasi dan Komunikasi	8,47	9,30	6,91	7,01	6,55
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	14,53	14,29	7,87	9,20	8,43
12. Real Estat	5,41	6,66	5,54	5,38	5,11
13. Jasa Perusahaan	5,98	4,72	5,38	4,85	4,62
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-4,28	6,84	-3,90	-0,40	-0,40
15. Jasa Pendidikan	5,27	5,56	4,77	4,68	4,47
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,09	4,99	4,65	4,31	4,13
17. Jasa Lainnya	1,42	4,09	2,58	2,73	2,65
<b>Pertumbuhan PDRB ADHK 2000</b>	<b>6,18</b>	<b>5,42</b>	<b>4,93</b>	<b>4,85</b>	<b>4,62</b>

Sumber : Tabel Pokok Kabupaten Sambas 2015

Keterangan : \*) angka sementara \*\*)angka sangat sementara  
p) proyeksi Bappeda Kab Sambas, Februari 2016

Secara sektoral, struktur ekonomi Kabupaten Sambas masih didominasi oleh empat sektor ekonomi utama, diantaranya sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (34,72%), diikuti oleh sektor industri pengolahan (16,06%), perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (17,99%) dan sektor Industri Pengolahan (12,72%).

Tabel III.1.2  
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Sambas Tahun 2014-2017

No	Indikator Makro	Tahun 2014 **)	Tahun 2015 <sup>p)</sup>	Tahun 2016 <sup>p)</sup>	Tahun 2017 <sup>p)</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1</b>	PDRB				
	- Harga Berlaku (Jutaan Rp)	13.219.423,46	14.215.113,74	15.372.818,28	16.526.090,62
	- Harga Konstan (Jutaan Rp)	10.719.066,93	11.248.046,65	11.793.267,44	12.338.488,22
<b>2</b>	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	5,42	4,93	4,85	4,62
<b>3</b>	Tingkat Inflasi (%)	6,10	4,01	4,41	4,23
<b>4</b>	Struktur PDRB				
	- Pendekatan Produksi				
	- Pendekatan Sektoral				
<b>5</b>	Produktivitas Sektoral				
<b>6</b>	Struktur PDRB Pendekatan Pengeluaran				
<b>7</b>	Besaran ICOR				
<b>8</b>	Jumlah Penduduk Miskin	49.260			
<b>9</b>	Tingkat Pengangguran (%)	2,83			
<b>10</b>	Disparitas Pendapatan Regional :				
	- Pendapatan Per Kapita				
	- Atas Dasar Harga Berlaku	25.427.493,78	27.173.949,75	29.199.711,62	31.225.473,50
	- Atas Dasar Harga Konstan	20.618.070,72	21.440.134,82	22.297.456,48	23.154.778,15
	- Kemampuan Investasi				
	- Besaran Indeks Gini (Gini Ratio Indeks)				
	- Besaran IPM (Indeks Pembangunan Masyarakat)	63,28			
<b>11</b>	Besaran Ratio dan Perbandingan-perbandingan :				
	- Pajak Daerah terhadap PDRB				
	- Biaya Pendidikan, kesehatan, penelitian dan sebagainya terhadap PDRB				
	- Perbandingan penerimaan Pemerintah Daerah (PAD)				
	- Dana Perimbangan terhadap PDRB				
	- Struktur Pembiayaan Daerah				

Sumber : Tabel Pokok Kabupaten Sambas 2015

Keterangan : \*\*)angka sangat sementara p) proyeksi Bappeda Kab Sambas, Februari 2016

### 3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah tahun 2017 dan Tahun 2018

Adapun tantangan kondisi perekonomian pada Tahun 2017–2018 antara lain adalah :

1. Fluktuasi nilai tukar rupiah dikhawatirkan berdampak signifikan terhadap permintaan internasional terhadap beberapa komoditi penduduk lokal seperti sawit, karet dan lain-lain.



2. Ketersediaan listrik dan air bersih diprediksi masih belum memadai dikarenakan terbatasnya kapasitas yang terpasang baik dari pihak PLN maupun PDAM sehingga menjadi hambatan investor untuk masuk ke Kabupaten Sambas.
3. Dengan sudah diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tanggal 31 Desember 2015, itu berarti para pekerja atau produk-produk asal negara-negara Asia Tenggara bebas keluar masuk Indonesia.
4. Pada sektor pertanian tantangan yang dihadapi adalah ancaman bahaya banjir, kekeringan yang berakibat gagal panen serta menyempitnya lahan-lahan pertanian menjadi pemukiman penduduk
5. Belum optimalnya pelayanan pada masyarakat terhadap sektor kesehatan, pendidikan dan ekonomi.
6. Kemiskinan dan pengangguran
7. Masuknya produk – produk luar negeri melalui Border Aruk yang memiliki daya saing tinggi, sehingga mengancam produk daerah jika tidak memiliki daya saing.

Secara umum, upaya yang dilakukan agar pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan tentunya harus didukung oleh beberapa faktor, diantaranya :

1. Penguatan sektor-sektor ekonomi yang berbasis pada stimulan ekonomi yang didukung infrastruktur penunjang.
2. Perlunya pengembangan produk lokal yang memiliki daya saing.
3. Kabupaten Sambas sebagai kabupaten perbatasan harus siap menghadapi MEA dengan memperbaiki kualitas produk lokal dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia serta menyediakan dan meningkatkan kualitas infrastruktur yang akan mempengaruhi kelancaran arus barang dan jasa.
4. Penyederhanaan dan transparansi prosedur perijinan serta meningkatkan ketersediaan infrastruktur pendukung seperti listrik, jalan dan pelabuhan untuk menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif,
5. Menciptakan dan mengembangkan secara optimal sentra-sentra ekonomi berbasis spesialisasi sektoral dan kewilayahan.
6. Peningkatan produksi padi melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian
7. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung faktor-faktor produksi.
8. Kemudahan pemberian modal kepada UMKM sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan perkapita.
9. Meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta
10. Penciptaan lapangan kerja dengan memperbesar investasi padat karya
11. Meningkatkan dan memperluas pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu dan rentan.

12. Peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu diarahkan untuk menciptakan lulusan yang lebih berkualitas dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja agar dapat bersaing dengan di pasar internasional.

Berdasarkan kajian analisis lingkungan internal yaitu unsur kekuatan dan kelemahan serta analisis lingkungan eksternal yaitu unsur peluang dan ancaman, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel III.1.3  
Analisis Kondisi Lingkungan Internal dan Eksternal Kabupaten Sambas  
(Analisis SWOT)

	Lingkungan Internal		Lingkungan Eksternal	
	<b>STRENGTH (S)</b> Kekuatan	<b>WEAKNESS (W)</b> Kelemahan	<b>OPPORTUNITIES (O)</b> Peluang	<b>THREATH (T)</b> Ancaman
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Memiliki potensi sumber daya alam yang besar.	Terbatasnya infrastruktur penunjang	Kebijakan Pemerintah Provinsi yang menempatkan Kabupaten Sambas sebagai kawasan prioritas pembangunan pertanian dan kelautan di Kalimantan Barat	Menyempitnya lahan-lahan pertanian berganti dengan pemukiman penduduk.
2.	Telah memiliki dokumen perencanaan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah)	Pengembangan kawasan strategis yang kurang optimal	Kabupaten Sambas merupakan daerah perbatasan	Akses dari daerah perbatasan ke ibu kota kabupaten yang masih belum lancar menyebabkan penduduk perbatasan lebih memilih berbelanja di negara tetangga.
3.	Memiliki kawasan perbatasan yang sudah diresmikan 1 Januari 2011 sebagai pintu resmi (PPLB Aruk)	Produk Dalam Negeri memiliki daya saing yang rendah	Pasar bebas, kuatnya permintaan terhadap produk <i>home industry</i> membuka peluang pasar bagi produk-produk unggulan Kabupaten Sambas	Era pasar bebas menyebabkan persaingan yang ketat sehingga dapat mengancam produk-produk lokal yang umumnya masih memiliki daya saing yang rendah
4.	Penduduk yang relatif homogen sehingga potensial menjadi basis pembangunan sosial-ekonomi masyarakat	Belum selesainya batas-batas wilayah dan kejelasan status aset Kabupaten menyebabkan terhambatnya proses pembangunan yang berdampak pada belum optimalnya	Posisi geografis Kabupaten Sambas pada lintasan jalur ekonomi Utara Kalimantan Barat	Investor cenderung ke daerah maju yang lebih siap menangkap peluang investasi



Lingkungan Internal		Lingkungan Eksternal	
STRENGTH (S) Kekuatan	WEAKNESS (W) Kelemahan	OPPORTUNITIES (O) Peluang	THREAT (T) Ancaman
	pelayanan pemerintah daerah		
5. Kabupaten Sambas sebagai Kabupaten pesisir	Masih banyak nelayan yang menggunakan alat tangkap tradisional sehingga hasil tangkapan tidak maksimal	Potensi sumberdaya ikan yang melimpah	Masuknya kapal-kapal nelayan asing di perairan Indonesia yang memiliki alat lebih canggih dari nelayan lokal.
6. Mempunyai potensi budaya dan sejarah sebagai kesultanan	Kurang optimalnya promosi pariwisata	Perkembangan ekonomi dan pembangunan Kabupaten tetangga (Singkawang dan Bengkayang) membuka peluang untuk pemasaran produk-produk unggulan Kabupaten Sambas	Banyaknya komoditas pertanian maupun produk UKM/IKM sejenis yang dihasilkan daerah lain menyebabkan persaingan yang ketat

Adapun yang menjadi prospek ekonomi Kabupaten Sambas Tahun 2017 antara lain sebagai berikut :

- a. Konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap dan ekspor-impor diharapkan akan mengalami peningkatan yang signifikan;
- b. Penyederhanaan peraturan dan perijinan akan mendorong investasi;
- c. Sektor pertanian diprediksi meningkat pada tahun 2017 seiring dengan upaya khusus melalui program dan kegiatan ketahanan pangan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan pemerintah daerah;
- d. Percepatan pembangunan infrastruktur mendorong lancarnya keluar masuk barang dan jasa;
- e. Dengan meningkatnya akses dan kualitas pendidikan masyarakat diharapkan akan menghasilkan SDM yang berkualitas;
- f. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan akan meningkatkan IPM Kabupaten Sambas.
- g. Investasi Pemerintah maupun swasta dan masyarakat diharapkan ada kecenderungan meningkat pula, sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan perkapita;
- h. Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran terbuka.
- i. Dengan dimulainya MEA pada tanggal 31 Desember 2015, akan terjadi aliran bebas barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil sehingga dapat berdampak positif terhadap perekonomian Kabupaten Sambas jika diikuti dengan peningkatan daya saing dan sumber daya manusia.

### 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

#### 3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku pendanaan penyelenggaraan pemerintahan telah diatur sesuai dengan kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan.

Penyelenggaraan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan kewenangan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau ditugaskan kepada Pemerintah Daerah dan/atau Desa atau sebutan lainnya dalam rangka Tugas Pembantuan. Adapun ringkasan APBD adalah sebagai berikut :

**Tabel. 3.2.1**  
**Ringkasan APBD Tahun 2014 s/d proyeksi Tahun 2017**

Uraian	Tahun 2014	Tahun 2015	APBD 2016	RKPD 2017
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.171.654.527.001,58</b>	<b>1.284.452.405.746,46</b>	<b>1.583.663.654.608,49</b>	<b>2.299.717.082.183,38</b>
Pendapatan Asli Daerah	51.621.949.730,03	89.018.125.313,46	91.780.685.752,66	100.051.130.941,68
Dana Perimbangan	901.386.063.687,00	936.489.789.079,00	1.138.182.541.000,00	2.018.455.753.742,60
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	218.646.513.584,55	258.944.491.354,00	353.700.427.855,83	181.210.197.499,10
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1.224.647.320.135,13</b>	<b>1.325.813.587.051,59</b>	<b>1.628.399.538.064,54</b>	<b>1.028.363.074.629,11</b>
Belanja Tidak Langsung	710.987.156.855,79	817.420.203.451,55	944.117.959.649,42	1.028.363.074.629,11
Belanja Langsung	513.660.163.279,34	508.393.383.600,04	684.281.578.415,12	
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>52.992.793.133,55</b>	<b>41.361.181.295,13</b>	<b>44.735.883.456,05</b>	<b>(32.787.768.020,05)</b>
Penerimaan Pembiayaan Daerah	110.295.314.903,55	79.949.014.225,00	97.235.883.456,05	48.448.115.436,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	57.302.521.770,00	38.587.832.929,87	52.500.000.000,00	81.235.883.456,05

Sumber: Bagian Keuangan Setda Kab Sambas, Mei 2016

Dana Desentralisasi adalah dana yang berasal dari APBD Provinsi/Kab/Kota sebagai konsekuensi atas penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan sendiri dalam sistem NKRI. Dalam RKPD Kab/Kota memuat perkiraan bagi hasil pemerintah Kab/Kota kepada Pemerintah Desa, dan besaran bantuan keuangan pemerintah Kab/Kota kepada pemerintah



desa. Berikut adalah dana desentralisasi APBD Kabupaten Sambas tahun 2014, 2015,2016 dan proyeksi tahun 2017.

**Tabel 3.2.2**  
**Dana Desentralisasi Kabupaten Sambas**  
**Tahun 2014 s/d proyeksi Tahun 2017**

Uraian	Tahun 2014	Tahun 2015	APBD 2016	RKPD 2017
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	1.389.148.182,80	1.577.992.500,00	1.552.341.428,00	2.440.954.581,87
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	30.619.552.033,14	113.006.524.536,90	212.673.471.100,00	233.986.603.191,36

Dana dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari adanya pelimpahan wewenang dari Pemerintah (Kementerian/Lembaga) kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah, yang dananya bersumber dari APBN, dengan demikian maka analisis dan perkiraan sumber dana dekonsentrasi hanya dilakukan dalam rangka penyusunan RKPD Provinsi.

Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari penugasan Pemerintah (Kementerian/Lembaga) kepada Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) dan/atau Desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan, yang dananya bersumber dari APBN.

### 3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

#### 3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah pada tahun 2017 mengarah pada penguatan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.

Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun 2017 antara lain :

- a. Meningkatkan pendapatan daerah melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
- b. Meningkatkan koordinasi yang lebih intensif dengan unit-unit kerja pengelola pendapatan baik instansi pemerintah daerah, provinsi, dan kementerian/lembaga pemerintah pusat.
- c. Memaksimalkan pengawasan dan pengendalian terhadap penerimaan daerah sebagai upaya menciptakan tertib administrasi penyetoran dan pelaporan penerimaan daerah dalam rangka mewujudkan transparansi pengelolaan penerimaan daerah.
- d. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung penerimaan daerah sebagai upaya peningkatan kinerja dalam rangka peningkatan penerimaan daerah.
- e. Mewujudkan aparatur yang berkualitas dan professional untuk meningkatkan penerimaan daerah.

- f. Meningkatkan sarana dan prasarana publik dibidang pendapatan daerah dalam rangka membangun partisipasi aktif masyarakat dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak/wajib retribusi daerah.

**Tabel 3.2.3**  
**Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan**  
**Kabupaten Sambas**  
**Tahun 2014 s.d Proyeksi Tahun 2017**

Uraian	Tahun 2014	Tahun 2015	APBD 2016	RKPD 2017
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.171.654.527.001,58</b>	<b>1.284.452.405.746,46</b>	<b>1.583.663.654.608,49</b>	<b>2.299.717.082.183,38</b>
Pendapatan Asli Daerah	51.621.949.730,03	89.018.125.313,46	91.780.685.752,66	100.051.130.941,68
Hasil Pajak Daerah	9.944.996.828,00	11.886.500.000,00	13.640.328.591,00	17.443.523.616,25
Hasil Retribusi Daerah	3.946.485.000,00	3.893.425.000,00	4.533.822.000,00	4.934.600.000,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.040.164.303,70	4.200.000.000,00	2.872.113.015,76	4.215.295.061,48
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	34.690.303.598,33	69.038.200.313,46	70.734.422.145,90	73.457.712.263,95
Dana Perimbangan	901.386.063.687,00	936.489.789.079,00	1.138.182.541.000,00	2.018.455.753.742,60
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	29.240.753.687,00	38.844.469.079,00	37.424.452.000,00	30.034.121.750,00
Dana Alokasi Umum	763.059.840.000,00	793.128.760.000,00	882.308.489.000,00	981.479.963.163,60
Dana Alokasi Khusus	109.085.470.000,00	104.516.560.000,00	218.449.600.000,00	1.006.941.668.829,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	218.646.513.584,55	258.944.491.354,00	353.700.427.855,83	181.210.197.499,10
Pendapatan Hibah	0,00	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	24.543.243.564,00	44.339.359.950,00	50.139.033.214,73	49.077.387.158,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	161.869.364.000,00	213.045.403.629,00	302.013.779.000,00	131.835.194.700,00
Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya	31.905.400.000,00	0,00	0,00	,00
Bagi Hasil Sumbangan Pihak III Propinsi	328.506.020,55	309.727.775,00	297.615.641,10	297.615.641,10

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kab. Sambas, Mei 2016



Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan tahun sebelumnya, serta perkiraan masing-masing potensi jenis Pendapatan Asli Daerah.

Proyeksi Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, DAU dan DAK adalah nilai proyeksi yang didasarkan sesuai dengan alokasi sementara Peraturan Menteri Keuangan terakhir dengan memperhatikan realisasi penerimaan dua tahun sebelumnya ketika Peraturan Menteri Keuangan yang dimaksudkan belum ditetapkan. Khusus untuk Dana Perimbangan sektor Dana Alokasi Umum (DAU) diasumsikan naik sebesar 11,24% dari Tahun 2016 hal ini didasarkan atas :

- Asumsi dasar pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2017 sebesar 7,1% dengan tingkat inflasi 4,5%.
- Perkembangan persentase alokasi penerimaan dana transfer diperkirakan meningkat dari Tahun 2016 mengingat Kabupaten Sambas merupakan daerah perbatasan dan daerah tertinggal yang menjadi prioritas pembangunan nasional.
- Penambahan Daerah Otonomi Baru Tahun 2017 yang mempengaruhi alokasi penerimaan untuk setiap daerah.

Proyeksi Lain-lain pendapatan daerah yang sah diperhitungkan memperhatikan potensi penerimaan yang akan dicapai sebelum ditetapkannya Peraturan terkait.

### 3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan umum belanja daerah Kabupaten Sambas mengacu pada prioritas program dan kegiatan. Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif setiap SKPD.

Arah Kebijakan belanja langsung mencakup :

- a. Upaya peningkatan infrastruktur dasar dengan sasaran utama untuk menunjang sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan dan investasi.
- b. Upaya Reformasi Birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik.
- c. Kebijakan pembangunan daerah, strategi dan prioritas pembangunan daerah yang disusun secara terintegrasi dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang akan dilaksanakan di daerah.
- d. Belanja yang diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan yang menjadi tanggung jawabnya

Sedangkan Belanja tidak langsung dialokasikan sebagai berikut :

- a. pegawai dialokasikan secara cermat dan tepat

- b. Belanja Hibah dan Bansos sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.
- c. Belanja bagi hasil kepada Desa, guna memperkuat kapasitas fiskal Desa.
- d. Belanja Bankeu dari daerah dan/atau pusat, untuk pemerataan dan/atau peningkatan pembangunan yang mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten Sambas.
- e. Belanja tidak terduga dalam rangka antisipasi terjadinya kejadian luar biasa dan bencana.

Adapun hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan belanja daerah tahun 2017 berkaitan dengan belanja langsung dan belanja tidak langsung diproyeksikan sebagai berikut:

**Tabel 3.2.4**  
**Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah**  
**menurut Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung**  
**Tahun 2014 s.d Proyeksi Tahun 2017 Kabupaten Sambas**

Uraian	Tahun 2014	Tahun 2015	APBD 2016	RKPD 2017
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1.224.647.320.135,13</b>	<b>1.325.813.587.051,59</b>	<b>1.628.399.538.064,54</b>	<b>2.266.929.314.163,33</b>
Belanja Tidak Langsung	710.987.156.855,79	817.420.203.451,55	944.117.959.649,42	1.028.363.074.629,11
Belanja Pegawai	663.374.243.288,49	693.555.686.414,65	720.112.147.121,42	776.763.516.855,88
Belanja Bunga	2.219.395.943,36	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
Belanja Subsidi	-	-	-	-
Belanja Hibah	8.538.625.000,00	4.280.000.000,00	4.780.000.000,00	9.172.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial	941.875.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	3.000.000.000,00
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	1.389.148.182,80	1.577.992.500,00	1.552.341.428,00	2.440.954.581,87
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	30.619.552.033,14	113.006.524.536,90	212.673.471.100,00	233.986.603.191,36
Belanja Tidak Terduga	3.904.317.408,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Belanja Langsung	513.660.163.279,34	508.393.383.600,04	684.281.578.415,12	1.238.566.239.534,22
Belanja Pegawai	34.428.365.917,00	60.571.709.280,83	58.154.158.204,46	
Belanja Barang dan Jasa	177.374.797.721,34	220.628.027.370,24	271.696.707.014,07	
Belanja Modal	301.856.999.641,00	227.193.646.948,97	354.430.713.196,59	

Sumber: Bagian Keuangan Setda Kab Sambas, Mei 2016



### 3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah terbagi ke dalam dua komponen yaitu Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

#### a. Penerimaan Pembiayaan

- Sisa lebih anggaran tahun sebelumnya (Silpa) pada tahun 2015 belum dapat dijadikan pendapatan.

#### b. Pengeluaran pembiayaan

- Pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal (investasi), dialokasikan jika terjadi surplus anggaran.
- Jika terjadi surplus anggaran akan diupayakan dengan pemanfaatan pembayaran pinjaman daerah atau bentuk pinjaman lainnya untuk membiayai program/kegiatan strategis.

**Tabel 3.2.5**  
**Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah**  
**Tahun 2014 s.d Proyeksi Tahun 2017 Kabupaten Sambas**

Uraian	Tahun 2014	Tahun 2015	APBD 2016	RKPD 2017
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>52.992.793.133,55</b>	<b>41.361.181.295,13</b>	<b>44.735.883.456,05</b>	<b>(32.787.768.020,05)</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	61.707.481.973,68	37.449.014.225,00	26.000.000.000,00	48.448.115.436,00
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	48.587.832.929,87	42.500.000.000,00	71.235.883.456,05	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-
Penerimaan piutang daerah	-	-	-	-
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>110.295.314.903,55</b>	<b>79.949.014.225,00</b>	<b>97.235.883.456,05</b>	<b>48.448.115.436,00</b>
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.556.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
Pembayaran Pokok Utang	51.746.521.770,00	28.587.832.929,87	42.500.000.000,00	71.235.883.456,05
Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
Pembayaran kegiatan belanja	-	-	-	-
<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>57.302.521.770,00</b>	<b>38.587.832.929,87</b>	<b>52.500.000.000,00</b>	<b>81.235.883.456,05</b>

## **BAB IV**

### **PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH**

#### **A. Tujuan dan Sasaran Pembangunan**

Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Sambas Tahun 2017 didasarkan pada arah kebijakan yang tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2005-2025 periode ketiga, yaitu :

1. Percepatan peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia  
Prioritas kegiatan ini diarahkan pada percepatan peningkatan kualitas sektor pendidikan, kesehatan dan percepatan kualitas keterampilan ketenagakerjaan, serta kualitas keagamaan/religius.
2. Percepatan Penguatan Ekonomi Kerakyatan, Industri, Perdagangan, Investasi dan Teknologi Pendukung  
Prioritas kegiatan ini diarahkan pada percepatan penguatan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, UMKM, pertambangan dan perdagangan terhadap hasil kegiatan yang belum dicapai secara optimal pada periode sebelumnya, serta percepatan pelaksanaan regulasi dan deregulasi investasi dan percepatan pembangunan teknologi pendukung.
3. Percepatan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Penunjang  
Prioritas kegiatan ini diarahkan pada percepatan pelaksanaan peningkatan kualitas sektor pekerjaan umum kebinamargaan dan keciptakaryaan, sektor perhubungan, energi dan telekomunikasi khususnya terhadap sektor-sektor terkait yang belum mencapai hasil yang optimal pada periode sebelumnya.
4. Percepatan Pengembangan Kawasan Strategis dan Kawasan Cepat Tumbuh  
Prioritas kegiatan ini diarahkan pada percepatan pengembangan kawasan-kawasan strategis dan kawasan cepat tumbuh terutama terhadap kawasan yang sudah dilakukan pembangunan pada periode sebelumnya.
5. Percepatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup  
Diprioritaskan pada pembangunan yang berkelanjutan terhadap pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang semakin baik melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dengan menguatkannya partisipasi aktif masyarakat serta peningkatan kualitas produksi yang ramah lingkungan.
6. Penguatan Pemerintahan yang baik dan Kerjasama Pemerintah Daerah  
Prioritas kegiatan ini diarahkan pada percepatan penguatan pemerintahan yang baik, percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik dalam rangka reformasi birokrasi serta percepatan dalam rangka peningkatan kualitas kerjasama antara Pemda dengan instansi pemerintah lain



## B. Prioritas Pembangunan

Adapun prioritas program pembangunan pada tahun 2017 masih secara konsisten diarahkan pada peningkatan infrastruktur serta upaya peningkatan IPM .

Perbaikan derajat ekonomi masyarakat yang telah dilakukan sebelumnya akan semakin efektif meningkatkan akses masyarakat akan pelayanan yang berkualitas pada pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan penanggulangan kemiskinan.

Penilaian terhadap peningkatan kemampuan/kapasitas otonomi daerah tercermin pada percepatan pengelolaan potensi daerah dan peningkatan kemampuan tata kelola pemerintahan melalui pengembangan SDM aparatur, perbaikan kualitas perencanaan pembangunan, peningkatan jasa publik (pendidikan, kesehatan, jaminan sosial), peningkatan pengelolaan keuangan daerah secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, serta didukung oleh semakin meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat, guna menjamin rasa aman dan nyaman dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Tahapan prioritas pembangunan daerah pada Tahun 2017 berdasarkan urusan Pemerintah adalah sebagai berikut :

No	Urusan	Nama Program	SKPD Yang Melaksanakan
1.	PENDIDIKAN	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	DINAS PENDIDIKAN
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	DINAS PENDIDIKAN
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	DINAS PENDIDIKAN
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	DINAS PENDIDIKAN
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	DINAS PENDIDIKAN
		Program Penyusunan Rencana Kerja SKPD	DINAS PENDIDIKAN
		Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	DINAS PENDIDIKAN
		Program Pendidikan Anak Usia Dini	DINAS PENDIDIKAN
		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	DINAS PENDIDIKAN
		Program Pendidikan Menengah	DINAS PENDIDIKAN
		Program Pendidikan Non Formal	DINAS PENDIDIKAN
		Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	DINAS PENDIDIKAN
		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
		Program Pendidikan Anak Usia Dini	KTR.CAMAT SELAKAU
		Program Pendidikan Anak Usia Dini	KTR.CAMAT PEMANGKAT
		Program Pendidikan Anak Usia Dini	KTR.CAMAT JAWAI
		Program Pendidikan Anak Usia Dini	KTR.CAMAT SAMBAS
		Program Pendidikan Anak Usia Dini	KTR.CAMAT SEJANGKUNG
		Program Pendidikan Menengah	KTR.CAMAT SEJANGKUNG

No	Urusan	Nama Program	SKPD Yang Melaksanakan
2.	KESEHATAN	Program Pendidikan Anak Usia Dini	KTR.CAMAT TELUK KERAMAT
		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	KTR.CAMAT PALOH
		Program Pendidikan Anak Usia Dini	KTR.CAMAT SAJINGAN BESAR
		Program Pendidikan Anak Usia Dini	KTR.CAMAT GALING
		Program Pendidikan Anak Usia Dini	KTR.CAMAT TEKARANG
		Program Pendidikan Anak Usia Dini	KTR.CAMAT SEMPARUK
		Program Pendidikan Menengah	KTR.CAMAT SAJAD
		Program Pendidikan Anak Usia Dini	KTR.CAMAT TANGARAN
		Program Pendidikan Anak Usia Dini	KTR.CAMAT SELAKAU TIMUR
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	DINAS KESEHATAN
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	DINAS KESEHATAN
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	DINAS KESEHATAN
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	DINAS KESEHATAN
		Program Penyusunan Rencana Kerja SKPD	DINAS KESEHATAN
		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	DINAS KESEHATAN
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	DINAS KESEHATAN
		Program Pengawasan Obat dan Makanan	DINAS KESEHATAN
		Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	DINAS KESEHATAN
		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	DINAS KESEHATAN
		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	DINAS KESEHATAN
		Program Pengembangan Lingkungan Sehat	DINAS KESEHATAN
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	DINAS KESEHATAN
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	DINAS KESEHATAN
		Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	DINAS KESEHATAN
		Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	DINAS KESEHATAN
		Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	DINAS KESEHATAN
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	DINAS KESEHATAN		
Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	DINAS KESEHATAN		
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	DINAS KESEHATAN		
Program Kesehatan Reproduksi Remaja	DINAS KESEHATAN		



No	Urusan	Nama Program	SKPD Yang Melaksanakan
		Program Jaminan Pembiayaan Kesehatan	DINAS KESEHATAN
		Program Peningkatan Informasi Kesehatan, Evaluasi Program dan Pelaporan	DINAS KESEHATAN
		Program Peningkatan Kesehatan Ibu Hamil	DINAS KESEHATAN
		Program Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit AFP	DINAS KESEHATAN
		Program Peningkatan Status Gizi Balita	DINAS KESEHATAN
		Program Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit DBD	DINAS KESEHATAN
		Program Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit TB Paru	DINAS KESEHATAN
		Program Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Filaria	DINAS KESEHATAN
		Program Peningkatan pelayanan dan Penanggulangan KLB	DINAS KESEHATAN
		Program Peningkatan Kesehatan Anak Sekolah	DINAS KESEHATAN
		Pengadaan Alat Kesehatan	DINAS KESEHATAN
		Program Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit HIV/AIDS	DINAS KESEHATAN
		Program Pencegahan, Pengendalian & Pemberantasan Penyakit Pneumonia	DINAS KESEHATAN
		Program Pencegahan, Pengendalian & Pemberantasan Penyakit Malaria	DINAS KESEHATAN
		Program Survelance Penyakit Tidak Menular (TPM)	DINAS KESEHATAN
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	DINAS KESEHATAN
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	RSUD SAMBAS
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	RSUD SAMBAS
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	RSUD SAMBAS
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	RSUD SAMBAS
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	RSUD SAMBAS
		Program Penyusunan Rencana Kerja SKPD	RSUD SAMBAS
		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	RSUD SAMBAS
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	RSUD SAMBAS
		Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	RSUD SAMBAS
		Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	RSUD SAMBAS

No	Urusan	Nama Program	SKPD Yang Melaksanakan
		Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	RSUD SAMBAS
		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah	RSUD SAMBAS
		Program Peningkatan Informasi Kesehatan, Evaluasi Program dan Pelaporan	RSUD SAMBAS
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	RSUD PEMANGKAT
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	RSUD PEMANGKAT
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	RSUD PEMANGKAT
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	RSUD PEMANGKAT
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	RSUD PEMANGKAT
		Program Penyusunan Rencana Kerja SKPD	RSUD PEMANGKAT
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	RSUD PEMANGKAT
		Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	RSUD PEMANGKAT
		Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	RSUD PEMANGKAT
		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah	RSUD PEMANGKAT
		Program Pengembangan Lingkungan Sehat	SEKRETARIAT DAERAH
		Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	SEKRETARIAT DAERAH
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	KTR.CAMAT SELAKAU
		Program Peningkatan Kesehatan Anak Sekolah	KTR.CAMAT SELAKAU
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	KTR.CAMAT PEMANGKAT
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	KTR.CAMAT JAWAI
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	KTR.CAMAT TEBAS
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	KTR.CAMAT SAMBAS
		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	KTR.CAMAT SAMBAS
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	KTR.CAMAT SEJANGKUNG
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	KTR.CAMAT TELUK KERAMAT
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	KTR.CAMAT PALOH
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	KTR.CAMAT SAJINGAN BESAR



No	Urusan	Nama Program	SKPD Yang Melaksanakan
3.	PEKERJAAN UMUM	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	KTR.CAMAT SAJINGAN BESAR
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	KTR.CAMAT GALING
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	KTR.CAMAT SUBAH
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	KTR.CAMAT TEKARANG
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	KTR.CAMAT SEMPARUK
		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	KTR.CAMAT SEMPARUK
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	KTR.CAMAT SEBAWI
		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	KTR.CAMAT SEBAWI
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	KTR.CAMAT SAJAD
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	KTR.CAMAT SAJAD
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	KTR.CAMAT JAWAI SELATAN
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	KTR.CAMAT TANGARAN
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	KTR.CAMAT SELAKAU TIMUR
		Program Peningkatan Kesehatan Anak Sekolah	KTR.CAMAT SELAKAU TIMUR
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	KTR.CAMAT SALATIGA
		Program Kesehatan Reproduksi Remaja	KTR.CAMAT SALATIGA
		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	BPMPD
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	DINAS PU BM PESDM
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	DINAS PU BM PESDM
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	DINAS PU BM PESDM
		Program Penyusunan Rencana Kerja SKPD	DINAS PU BM PESDM
		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	DINAS PU BM PESDM
		Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	DINAS PU BM PESDM
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	DINAS PU BM PESDM
		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	DINAS PU BM PESDM
		Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku	DINAS PU BM PESDM
		Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	DINAS PU BM PESDM
		Program Pengendalian Banjir	DINAS PU BM PESDM
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	DINAS PU CK, TATA RUANG DAN PERUMAHAN
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	DINAS PU CK, TATA RUANG DAN PERUMAHAN

No	Urusan	Nama Program	SKPD Yang Melaksanakan
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	DINAS PU CK, TATA RUANG DAN PERUMAHAN
		Program Penyusunan Rencana Kerja SKPD	DINAS PU CK, TATA RUANG DAN PERUMAHAN
		Penataan Peraturan Perundang-undangan	DINAS PU CK, TATA RUANG DAN PERUMAHAN
		Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	DINAS PU CK, TATA RUANG DAN PERUMAHAN
		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	DINAS PU CK, TATA RUANG DAN PERUMAHAN
		Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	DINAS PU CK, TATA RUANG DAN PERUMAHAN
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	DINAS PU CK, TATA RUANG DAN PERUMAHAN
		Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	DINAS PU CK, TATA RUANG DAN PERUMAHAN
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	DINAS PU CK, TATA RUANG DAN PERUMAHAN
		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	SEKRETARIAT DAERAH
4.	PERUMAHAN	Program Pengembangan Perumahan	DINAS PU CK, TATA RUANG DAN PERUMAHAN
5.	PENATAAN RUANG	Program Perencanaan Tata Ruang	DINAS PU CK, TATA RUANG DAN PERUMAHAN
6.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Program Perencanaan Tata Ruang	BAPPEDA
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	BAPPEDA
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	BAPPEDA
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	BAPPEDA
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	BAPPEDA
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	BAPPEDA
		Program Penyusunan Rencana Kerja SKPD	BAPPEDA
		Program Pengembangan Data/Informasi	BAPPEDA
		Program Kerjasama Pembangunan	BAPPEDA
		Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	BAPPEDA
		Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	BAPPEDA
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPPEDA
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPPEDA
		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	BAPPEDA
		Program Perencanaan Sosial Budaya	BAPPEDA



No	Urusan	Nama Program	SKPD Yang Melaksanakan
		Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	BAPPEDA
		Program Penelitian , Pengembangan, dan Rekayasa	BAPPEDA
		Program Pengembangan Data/Informasi	BPPKB
		Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	SEKRETARIAT DAERAH
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	SEKRETARIAT DAERAH
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	SEKRETARIAT DAERAH
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	KTR.CAMAT SELAKAU
		Program Pengembangan Data/Informasi	KTR.CAMAT PEMANGKAT
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	KTR.CAMAT PEMANGKAT
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	KTR.CAMAT JAWAI
		Program Pengembangan Data/Informasi	KTR.CAMAT TEBAS
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	KTR.CAMAT TEBAS
		Program Pengembangan Data/Informasi	KTR.CAMAT SAMBAS
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	KTR.CAMAT SAMBAS
		Program Pengembangan Data/Informasi	KTR.CAMAT SEJANGKUNG
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	KTR.CAMAT SEJANGKUNG
		Program Pengembangan Data/Informasi	KTR.CAMAT TELUK KERAMAT
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	KTR.CAMAT TELUK KERAMAT
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	KTR.CAMAT PALOH
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	KTR.CAMAT SAJINGAN BESAR
		Program Pengembangan Data/Informasi	KTR.CAMAT GALING
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	KTR.CAMAT GALING
		Program Pengembangan Data/Informasi	KTR.CAMAT SUBAH
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	KTR.CAMAT SUBAH
		Program Pengembangan Data/Informasi	KTR.CAMAT TEKARANG
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	KTR.CAMAT TEKARANG
		Program Pengembangan Data/Informasi	KTR.CAMAT SEMPARUK
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	KTR.CAMAT SEMPARUK
		Program Pengembangan Data/Informasi	KTR.CAMAT SEBAWI
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	KTR.CAMAT SEBAWI
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	KTR.CAMAT SAJAD

No	Urusan	Nama Program	SKPD Yang Melaksanakan
7.	PERHUBUNGAN	Program Pengembangan Data/Informasi	KTR.CAMAT JAWAI SELATAN
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	KTR.CAMAT JAWAI SELATAN
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	KTR.CAMAT TANGARAN
		Program Pengembangan Data/Informasi	KTR.CAMAT SELAKAU TIMUR
		Program Pengembangan Data/Informasi	KTR.CAMAT SALATIGA
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	KTR.CAMAT SALATIGA
		Program Pengembangan Data/Informasi	BPMPD
		Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	BPMPD
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	DISHUB, KOMINFO
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	DISHUB, KOMINFO
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	DISHUB, KOMINFO
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	DISHUB, KOMINFO
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	DISHUB, KOMINFO
		Program Penyusunan Rencana Kerja SKPD	DISHUB, KOMINFO
		Penataan Peraturan Perundang-undangan	DISHUB, KOMINFO
		Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan	DISHUB, KOMINFO
		Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ	DISHUB, KOMINFO
		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	DISHUB, KOMINFO
		8.	LINGKUNGAN HIDUP
Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas	DISHUB, KOMINFO		
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	DISHUB, KOMINFO		
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	DINAS PU CK, TATA RUANG DAN PERUMAHAN		
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	DINAS PU CK, TATA RUANG DAN PERUMAHAN		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	BADAN LINGKUNGAN HIDUP		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	BADAN LINGKUNGAN HIDUP		
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	BADAN LINGKUNGAN HIDUP		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	BADAN LINGKUNGAN HIDUP		
Program Penyusunan Rencana Kerja SKPD	BADAN LINGKUNGAN HIDUP		



No	Urusan	Nama Program	SKPD Yang Melaksanakan
9.	PERTANAHAN	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	BADAN LINGKUNGAN HIDUP
		Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam	BADAN LINGKUNGAN HIDUP
10.	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	SEKRETARIAT DAERAH
		Program Penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	SEKRETARIAT DAERAH
11.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	KTR.CAMAT SEBAWI
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	DINAS DUKCAPIL
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	DINAS DUKCAPIL
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	DINAS DUKCAPIL
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	DINAS DUKCAPIL
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	DINAS DUKCAPIL
		Program Penyusunan Rencana Kerja SKPD	DINAS DUKCAPIL
		Penataan Peraturan Perundang-undangan	DINAS DUKCAPIL
		Program Penataan Administrasi Kependudukan	DINAS DUKCAPIL
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	BPPKB
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	BPPKB
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	BPPKB
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	BPPKB
		Program Penyusunan Rencana Kerja SKPD	BPPKB
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan	BPPKB		
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	BPPKB		
Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan	BPPKB		
Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	BPPKB		
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	BPPKB		

No	Urusan	Nama Program	SKPD Yang Melaksanakan
12.	KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA	Program Keluarga Berencana	BPPKB
		Program Kesehatan Reproduksi Remaja	BPPKB
		Program Pelayanan Kontrasepsi	BPPKB
		Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi Dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Di Masyarakat	BPPKB
		Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	BPPKB
		Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU	BPPKB
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	BPPKB
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	DINAS SOSNAKERTRANS
13.	SOSIAL	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	DINAS SOSNAKERTRANS
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	DINAS SOSNAKERTRANS
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	DINAS SOSNAKERTRANS
		Program Penyusunan Rencana Kerja SKPD	DINAS SOSNAKERTRANS
		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	DINAS SOSNAKERTRANS
		Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	DINAS SOSNAKERTRANS
		Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma	DINAS SOSNAKERTRANS
		Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo	DINAS SOSNAKERTRANS
		Program Pemberdayaan Kelembagaan Dan Kesejahteraan Sosial	DINAS SOSNAKERTRANS
		Program Pengelolaan Areal Pemakaman	DINAS SOSNAKERTRANS
		Peningkatan penanggulangan bencana	DINAS SOSNAKERTRANS
		Program Pemberdayaan Kelembagaan Dan Kesejahteraan Sosial	SEKRETARIAT DAERAH
		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	KTR.CAMAT SELAKAU
		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	KTR.CAMAT PEMANGKAT
		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	KTR.CAMAT JAWAI



No	Urusan	Nama Program	SKPD Yang Melaksanakan
		Peningkatan penanggulangan bencana Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	KTR.CAMAT JAWAI KTR.CAMAT TEBAS
		Peningkatan penanggulangan bencana Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	KTR.CAMAT TEBAS KTR.CAMAT SAMBAS
		Peningkatan penanggulangan bencana Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	KTR.CAMAT SAMBAS KTR.CAMAT SEJANGKUNG
		Peningkatan penanggulangan bencana Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	KTR.CAMAT SEJANGKUNG KTR.CAMAT TELUK KERAMAT
		Peningkatan penanggulangan bencana Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	KTR.CAMAT TELUK KERAMAT KTR.CAMAT PALOH
		Peningkatan penanggulangan bencana Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	KTR.CAMAT PALOH KTR.CAMAT SAJINGAN BESAR
		Program Pemberdayaan Kelembagaan Dan Kesejahteraan Sosial	KTR.CAMAT SAJINGAN BESAR
		Peningkatan penanggulangan bencana Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	KTR.CAMAT SAJINGAN BESAR KTR.CAMAT GALING
		Peningkatan penanggulangan bencana Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	KTR.CAMAT GALING KTR.CAMAT SUBAH
		Peningkatan penanggulangan bencana Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	KTR.CAMAT TEKARANG
		Peningkatan penanggulangan bencana Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	KTR.CAMAT TEKARANG KTR.CAMAT SEMPARUK

No	Urusan	Nama Program	SKPD Yang Melaksanakan
14.	TENAGA KERJA	Peningkatan penanggulangan bencana Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	KTR.CAMAT SEMPARUK KTR.CAMAT SEBAWI
		Program Pemberdayaan Kelembagaan Dan Kesejahteraan Sosial Peningkatan penanggulangan bencana	KTR.CAMAT SEBAWI KTR.CAMAT SEBAWI
		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	KTR.CAMAT SAJAD
		Peningkatan penanggulangan bencana Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	KTR.CAMAT SAJAD KTR.CAMAT JAWAI SELATAN
		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	KTR.CAMAT TANGARAN
		Peningkatan penanggulangan bencana Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	KTR.CAMAT TANGARAN KTR.CAMAT SELAKAU TIMUR
		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	KTR.CAMAT SALATIGA
		Program Pemberdayaan Kelembagaan Dan Kesejahteraan Sosial Peningkatan penanggulangan bencana	KTR.CAMAT SALATIGA KTR.CAMAT SALATIGA
		Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja	DINAS SOSNAKERTRANS
		Program Peningkatan Kesempatan Kerja	DINAS SOSNAKERTRANS
		Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	DINAS SOSNAKERTRANS
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	DINAS KUMINDAG
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Penyusunan Rencana Kerja SKPD	DINAS KUMINDAG DINAS KUMINDAG DINAS KUMINDAG DINAS KUMINDAG DINAS KUMINDAG



No	Urusan	Nama Program	SKPD Yang Melaksanakan
16.	PENANAMAN MODAL	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	DINAS KUMINDAG
		Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	DINAS KUMINDAG
		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	DINAS KUMINDAG
		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	DINAS KUMINDAG
		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	SEKRETARIAT DAERAH
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	BMPPT
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	BMPPT
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	BMPPT
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	BMPPT
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	BMPPT
		Program Penyusunan Rencana Kerja SKPD	BMPPT
		Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi	BMPPT
		Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi	BMPPT
		Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi	SEKRETARIAT DAERAH
17.	KEBUDAYAAN	Program Pengembangan Nilai Budaya	DINAS PORABUDPAR
		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	DINAS PORABUDPAR
18.	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	DINAS PORABUDPAR
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	DINAS PORABUDPAR
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	DINAS PORABUDPAR
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	DINAS PORABUDPAR
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	DINAS PORABUDPAR
		Program Penyusunan Rencana Kerja SKPD	DINAS PORABUDPAR
		Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	DINAS PORABUDPAR
		Program peningkatan peran serta kepemudaan	DINAS PORABUDPAR
		Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	DINAS PORABUDPAR
		Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	DINAS PORABUDPAR

No	Urusan	Nama Program	SKPD Yang Melaksanakan
		Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	DINAS PORABUDPAR
		Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	DINAS PORABUDPAR
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	DINAS PORABUDPAR
		Reformasi Birokrasi	DINAS PORABUDPAR
		Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	SEKRETARIAT DAERAH
		Program peningkatan peran serta kepemudaan	KTR.CAMAT SELAKAU
		Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	KTR.CAMAT SELAKAU
		Program peningkatan peran serta kepemudaan	KTR.CAMAT PEMANGKAT
		Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	KTR.CAMAT PEMANGKAT
		Program peningkatan peran serta kepemudaan	KTR.CAMAT JAWAI
		Program peningkatan peran serta kepemudaan	KTR.CAMAT TEBAS
		Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	KTR.CAMAT TEBAS
		Program peningkatan peran serta kepemudaan	KTR.CAMAT SAMBAS
		Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	KTR.CAMAT SAMBAS
		Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	KTR.CAMAT SAMBAS
		Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	KTR.CAMAT SEJANGKUNG
		Program peningkatan peran serta kepemudaan	KTR.CAMAT TELUK KERAMAT
		Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	KTR.CAMAT TELUK KERAMAT
		Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	KTR.CAMAT TELUK KERAMAT
		Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	KTR.CAMAT PALOH
		Program peningkatan peran serta kepemudaan	KTR.CAMAT SAJINGAN BESAR
		Program peningkatan peran serta kepemudaan	KTR.CAMAT GALING
		Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	KTR.CAMAT SUBAH
		Program peningkatan peran serta kepemudaan	KTR.CAMAT TEKARANG
		Program peningkatan peran serta kepemudaan	KTR.CAMAT SEMPARUK
		Program peningkatan peran serta kepemudaan	KTR.CAMAT SEBAWI
		Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	KTR.CAMAT SEBAWI



No	Urusan	Nama Program	SKPD Yang Melaksanakan
19.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	KTR.CAMAT SEBAWI
		Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	KTR.CAMAT SAJAD
		Program peningkatan peran serta kepemudaan	KTR.CAMAT JAWAI SELATAN
		Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	KTR.CAMAT TANGARAN
		Program peningkatan peran serta kepemudaan	KTR.CAMAT SELAKAU TIMUR
		Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	KTR.CAMAT SELAKAU TIMUR
		Program peningkatan peran serta kepemudaan	KTR.CAMAT SALATIGA
		Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	KTR.CAMAT SALATIGA
		Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	KTR.CAMAT SALATIGA
		Program pengembangan wawasan kebangsaan	BAPPEDA
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	KANTOR KESBANG LINMAS
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	KANTOR KESBANG LINMAS
		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	KANTOR KESBANG LINMAS
		Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	KANTOR KESBANG LINMAS
		Program pengembangan wawasan kebangsaan	KANTOR KESBANG LINMAS
		Program pendidikan politik masyarakat	KANTOR KESBANG LINMAS
		Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam	KANTOR KESBANG LINMAS
		Program Bina Manunggal TNI Dan Rakyat	KANTOR KESBANG LINMAS
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	KANTOR SATPOL PP
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	KANTOR SATPOL PP
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	KANTOR SATPOL PP
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	KANTOR SATPOL PP
		Program Penyusunan Rencana Kerja SKPD	KANTOR SATPOL PP
		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	KANTOR SATPOL PP
		Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	KANTOR SATPOL PP
		Program peningkatan kesadaran dan budaya hukum masyarakat	KANTOR SATPOL PP

No	Urusan	Nama Program	SKPD Yang Melaksanakan
		Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	SEKRETARIAT DAERAH
		Program pengembangan wawasan kebangsaan	SEKRETARIAT DAERAH
		Program pengembangan wawasan kebangsaan	KTR.CAMAT SELAKAU
		Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam	KTR.CAMAT SELAKAU
		Program pengembangan wawasan kebangsaan	KTR.CAMAT PEMANGKAT
		Program pengembangan wawasan kebangsaan	KTR.CAMAT JAWAI
		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	KTR.CAMAT TEBAS
		Program pengembangan wawasan kebangsaan	KTR.CAMAT TEBAS
		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	KTR.CAMAT SAMBAS
		Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	KTR.CAMAT SAMBAS
		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	KTR.CAMAT SEJANGKUNG
		Program pengembangan wawasan kebangsaan	KTR.CAMAT SEJANGKUNG
		Program pengembangan wawasan kebangsaan	KTR.CAMAT TELUK KERAMAT
		Program pengembangan wawasan kebangsaan	KTR.CAMAT PALOH
		Program pengembangan wawasan kebangsaan	KTR.CAMAT SAJINGAN BESAR
		Program pengembangan wawasan kebangsaan	KTR.CAMAT GALING
		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	KTR.CAMAT SUBAH
		Program pengembangan wawasan kebangsaan	KTR.CAMAT SUBAH
		Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam	KTR.CAMAT SUBAH
		Program pengembangan wawasan kebangsaan	KTR.CAMAT TEKARANG
		Program pengembangan wawasan kebangsaan	KTR.CAMAT SEMPARUK
		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	KTR.CAMAT SEBAWI
		Program Pemeliharaan Ketahanan Bangsa dan Nasionalisme	KTR.CAMAT SEBAWI
		Program pengembangan wawasan kebangsaan	KTR.CAMAT SAJAD
		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	KTR.CAMAT JAWAI SELATAN
		Program pengembangan wawasan kebangsaan	KTR.CAMAT JAWAI SELATAN
		Program pengembangan wawasan kebangsaan	KTR.CAMAT TANGARAN



No	Urusan	Nama Program	SKPD Yang Melaksanakan
20.	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH	Program pengembangan wawasan kebangsaan Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam Program pengembangan wawasan kebangsaan	KTR.CAMAT SELAKAU TIMUR KTR.CAMAT SELAKAU TIMUR KTR.CAMAT SALATIGA
		Program Reformasi Birokrasi	DINAS PU CK, TATA RUANG DAN PERUMAHAN
		Program Reformasi Birokrasi	BAPPEDA
		Program Reformasi Birokrasi	KANTOR SATPOL PP
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	SEKRETARIAT DAERAH
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	SEKRETARIAT DAERAH
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	SEKRETARIAT DAERAH
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	SEKRETARIAT DAERAH
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	SEKRETARIAT DAERAH
		Program Penyusunan Rencana Kerja SKPD	SEKRETARIAT DAERAH
		Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH
		Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	SEKRETARIAT DAERAH
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	SEKRETARIAT DAERAH
		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	SEKRETARIAT DAERAH
		Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	SEKRETARIAT DAERAH
		Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	SEKRETARIAT DAERAH
		Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	SEKRETARIAT DAERAH
		Program Penataan Daerah Otonomi Baru	SEKRETARIAT DAERAH
		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	SEKRETARIAT DAERAH
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	SEKRETARIAT DAERAH
Program Pelayanan Administrasi Terpadu	SEKRETARIAT DAERAH		

No	Urusan	Nama Program	SKPD Yang Melaksanakan
		Program Reformasi Birokrasi	SEKRETARIAT DAERAH
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	SEKRETARIAT DPRD
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	SEKRETARIAT DPRD
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	SEKRETARIAT DPRD
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	SEKRETARIAT DPRD
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	SEKRETARIAT DPRD
		Program Penyusunan Rencana Kerja SKPD	SEKRETARIAT DPRD
		Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	SEKRETARIAT DPRD
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	SEKRETARIAT DPRD
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	DISPENDA
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	DISPENDA
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	DISPENDA
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	DISPENDA
		Program Penyusunan Rencana Kerja SKPD	DISPENDA
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	DISPENDA
		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	DISPENDA
		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	DISPENDA
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan PBB	DISPENDA
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		Program Penyusunan Rencana Kerja SKPD	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



No	Urusan	Nama Program	SKPD Yang Melaksanakan
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	INSPEKTORAT KABUPATEN
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	INSPEKTORAT KABUPATEN
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	INSPEKTORAT KABUPATEN
		Program Penyusunan Rencana Kerja SKPD	INSPEKTORAT KABUPATEN
		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	INSPEKTORAT KABUPATEN
		Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	INSPEKTORAT KABUPATEN
		Program Reformasi Birokrasi	INSPEKTORAT KABUPATEN
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	KTR.CAMAT SELAKAU
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	KTR.CAMAT SELAKAU
		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	KTR.CAMAT SELAKAU
		Program Penataan Daerah Otonomi Baru	KTR.CAMAT SELAKAU
		Program Pelayanan Administrasi Terpadu	KTR.CAMAT SELAKAU
		Program Reformasi Birokrasi	KTR.CAMAT SELAKAU
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	KTR.CAMAT PEMANGKAT
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	KTR.CAMAT PEMANGKAT
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	KTR.CAMAT PEMANGKAT
		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	KTR.CAMAT PEMANGKAT
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	KTR.CAMAT PEMANGKAT
		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	KTR.CAMAT PEMANGKAT
		Program Lomba Desa Tingkat Kecamatan	KTR.CAMAT PEMANGKAT
		Program Pelayanan Administrasi Terpadu	KTR.CAMAT PEMANGKAT
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	KTR.CAMAT JAWAI
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	KTR.CAMAT JAWAI
		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	KTR.CAMAT JAWAI
		Program Pelayanan Administrasi Terpadu	KTR.CAMAT JAWAI
		Program Reformasi Birokrasi	KTR.CAMAT JAWAI
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	KTR.CAMAT TEBAS
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	KTR.CAMAT TEBAS

No	Urusan	Nama Program	SKPD Yang Melaksanakan
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	KTR.CAMAT TEBAS
		Program Penyusunan Rencana Kerja SKPD	KTR.CAMAT TEBAS
		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	KTR.CAMAT TEBAS
		Program Penataan Daerah Otonomi Baru	KTR.CAMAT TEBAS
		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	KTR.CAMAT TEBAS
		Program Pelayanan Administrasi Terpadu	KTR.CAMAT TEBAS
		Program Reformasi Birokrasi	KTR.CAMAT TEBAS
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	KTR.CAMAT SAMBAS
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	KTR.CAMAT SAMBAS
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	KTR.CAMAT SAMBAS
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	KTR.CAMAT SAMBAS
		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	KTR.CAMAT SAMBAS
		Program Penataan Daerah Otonomi Baru	KTR.CAMAT SAMBAS
		Program Pelayanan Administrasi Terpadu	KTR.CAMAT SAMBAS
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	KTR.CAMAT SEJANGKUNG
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	KTR.CAMAT SEJANGKUNG
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	KTR.CAMAT SEJANGKUNG
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	KTR.CAMAT SEJANGKUNG
		Program Penyusunan Rencana Kerja SKPD	KTR.CAMAT SEJANGKUNG
		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	KTR.CAMAT SEJANGKUNG
		Program Penataan Daerah Otonomi Baru	KTR.CAMAT SEJANGKUNG
		Program Lomba Desa Tingkat Kecamatan	KTR.CAMAT SEJANGKUNG
		Program Pelayanan Administrasi Terpadu	KTR.CAMAT SEJANGKUNG
		Program Reformasi Birokrasi	KTR.CAMAT SEJANGKUNG
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	KTR.CAMAT TELUK KERAMAT
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	KTR.CAMAT TELUK KERAMAT
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	KTR.CAMAT TELUK KERAMAT
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	KTR.CAMAT TELUK KERAMAT
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	KTR.CAMAT TELUK KERAMAT
		Program Penyusunan Rencana Kerja SKPD	KTR.CAMAT TELUK KERAMAT



No	Urusan	Nama Program	SKPD Yang Melaksanakan
		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	KTR.CAMAT TELUK KERAMAT
		Program Pelayanan Administrasi Terpadu	KTR.CAMAT TELUK KERAMAT
		Program Reformasi Birokrasi	KTR.CAMAT TELUK KERAMAT
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	KTR.CAMAT PALOH
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	KTR.CAMAT PALOH
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	KTR.CAMAT PALOH
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	KTR.CAMAT PALOH
		Program Penyusunan Rencana Kerja SKPD	KTR.CAMAT PALOH
		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	KTR.CAMAT PALOH
		Program Lomba Desa Tingkat Kecamatan	KTR.CAMAT PALOH
		Program Pelayanan Administrasi Terpadu	KTR.CAMAT PALOH
		Program Reformasi Birokrasi	KTR.CAMAT PALOH
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	KTR.CAMAT SAJINGAN BESAR
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	KTR.CAMAT SAJINGAN BESAR
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	KTR.CAMAT SAJINGAN BESAR
		Program Penyusunan Rencana Kerja SKPD	KTR.CAMAT SAJINGAN BESAR
		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	KTR.CAMAT SAJINGAN BESAR
		Program Penataan Daerah Otonomi Baru	KTR.CAMAT SAJINGAN BESAR
		Program Lomba Desa Tingkat Kecamatan	KTR.CAMAT SAJINGAN BESAR
		Program Pelayanan Administrasi Terpadu	KTR.CAMAT SAJINGAN BESAR
		Program Reformasi Birokrasi	KTR.CAMAT SAJINGAN BESAR
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	KTR.CAMAT GALING
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	KTR.CAMAT GALING
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	KTR.CAMAT GALING
		Program Penyusunan Rencana Kerja SKPD	KTR.CAMAT GALING
		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	KTR.CAMAT GALING
		Program Penataan Daerah Otonomi Baru	KTR.CAMAT GALING

No	Urusan	Nama Program	SKPD Yang Melaksanakan
		Program Pelayanan Administrasi Terpadu	KTR.CAMAT GALING
		Program Reformasi Birokrasi	KTR.CAMAT GALING
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	KTR.CAMAT SUBAH
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	KTR.CAMAT SUBAH
		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	KTR.CAMAT SUBAH
		Program Penataan Daerah Otonomi Baru	KTR.CAMAT SUBAH
		Program Lomba Desa Tingkat Kecamatan	KTR.CAMAT SUBAH
		Program Pelayanan Administrasi Terpadu	KTR.CAMAT SUBAH
		Program Reformasi Birokrasi	KTR.CAMAT SUBAH
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	KTR.CAMAT TEKARANG
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	KTR.CAMAT TEKARANG
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	KTR.CAMAT TEKARANG
		Program Penyusunan Rencana Kerja SKPD	KTR.CAMAT TEKARANG
		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	KTR.CAMAT TEKARANG
		Program Pelayanan Administrasi Terpadu	KTR.CAMAT TEKARANG
		Program Reformasi Birokrasi	KTR.CAMAT TEKARANG
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	KTR.CAMAT SEMPARUK
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	KTR.CAMAT SEMPARUK
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	KTR.CAMAT SEMPARUK
		Program Penyusunan Rencana Kerja SKPD	KTR.CAMAT SEMPARUK
		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	KTR.CAMAT SEMPARUK
		Program Pelayanan Administrasi Terpadu	KTR.CAMAT SEMPARUK
		Program Reformasi Birokrasi	KTR.CAMAT SEMPARUK
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	KTR.CAMAT SEBAWI
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	KTR.CAMAT SEBAWI
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	KTR.CAMAT SEBAWI
		Program Penyusunan Rencana Kerja SKPD	KTR.CAMAT SEBAWI
		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	KTR.CAMAT SEBAWI
		Program Pelayanan Administrasi Terpadu	KTR.CAMAT SEBAWI
		Program Reformasi Birokrasi	KTR.CAMAT SEBAWI



No	Urusan	Nama Program	SKPD Yang Melaksanakan
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	KTR.CAMAT SAJAD
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	KTR.CAMAT SAJAD
		Program Penyusunan Rencana Kerja SKPD	KTR.CAMAT SAJAD
		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	KTR.CAMAT SAJAD
		Program Pelayanan Administrasi Terpadu	KTR.CAMAT SAJAD
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	KTR.CAMAT JAWAI SELATAN
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	KTR.CAMAT JAWAI SELATAN
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	KTR.CAMAT JAWAI SELATAN
		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	KTR.CAMAT JAWAI SELATAN
		Program Lomba Desa Tingkat Kecamatan	KTR.CAMAT JAWAI SELATAN
		Program Pelayanan Administrasi Terpadu	KTR.CAMAT JAWAI SELATAN
		Program Reformasi Birokrasi	KTR.CAMAT JAWAI SELATAN
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	KTR.CAMAT TANGARAN
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	KTR.CAMAT TANGARAN
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	KTR.CAMAT TANGARAN
		Program Penyusunan Rencana Kerja SKPD	KTR.CAMAT TANGARAN
		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	KTR.CAMAT TANGARAN
		Program Penataan Daerah Otonomi Baru	KTR.CAMAT TANGARAN
		Program Lomba Desa Tingkat Kecamatan	KTR.CAMAT TANGARAN
		Program Pelayanan Administrasi Terpadu	KTR.CAMAT TANGARAN
		Program Reformasi Birokrasi	KTR.CAMAT TANGARAN
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	KTR.CAMAT SELAKAU TIMUR
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	KTR.CAMAT SELAKAU TIMUR
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	KTR.CAMAT SELAKAU TIMUR
		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	KTR.CAMAT SELAKAU TIMUR
		Program Pelayanan Administrasi Terpadu	KTR.CAMAT SELAKAU TIMUR
		Program Reformasi Birokrasi	KTR.CAMAT SELAKAU TIMUR
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	KTR.CAMAT SALATIGA
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	KTR.CAMAT SALATIGA
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	KTR.CAMAT SALATIGA

No	Urusan	Nama Program	SKPD Yang Melaksanakan
22.	KETAHANAN PANGAN	Program Penyusunan Rencana Kerja SKPD	KTR.CAMAT SALATIGA
		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	KTR.CAMAT SALATIGA
		Program Pelayanan Administrasi Terpadu	KTR.CAMAT SALATIGA
		Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	SEKRETARIAT DAERAH
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	BKP4K
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	BKP4K
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	BKP4K
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	BKP4K
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	BKP4K
		Program Penyusunan Rencana Kerja SKPD	BKP4K
		Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	BKP4K
		Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	BKP4K
		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	BKP4K
		Program Pemberdayaan Kelompok Tani	BKP4K
23.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan lapangan	BKP4K
		Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	BKP4K
		Program Pengembangan dan Penyebaran Informasi Teknologi Pertanian	BKP4K
		Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Kehutanan	BKP4K
		Program penerapan teknologi pertanian/perkebunan dan perikanan	BKP4K
		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	SEKRETARIAT DAERAH
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	KTR.CAMAT SELAKAU
		Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	KTR.CAMAT SELAKAU
		Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	KTR.CAMAT PEMANGKAT
		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	KTR.CAMAT JAWAI
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	KTR.CAMAT JAWAI
		Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	KTR.CAMAT JAWAI
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	KTR.CAMAT TEBAS



No	Urusan	Nama Program	SKPD Yang Melaksanakan
		Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	KTR.CAMAT TEBAS
		Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	KTR.CAMAT SAMBAS
		Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	KTR.CAMAT SEJANGKUNG
		Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	KTR.CAMAT TELUK KERAMAT
		Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	KTR.CAMAT PALOH
		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	KTR.CAMAT SAJINGAN BESAR
		Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	KTR.CAMAT SAJINGAN BESAR
		Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	KTR.CAMAT GALING
		Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	KTR.CAMAT SUBAH
		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	KTR.CAMAT TEKARANG
		Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	KTR.CAMAT TEKARANG
		Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	KTR.CAMAT SEMPARUK
		Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	KTR.CAMAT SEBAWI
		Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	KTR.CAMAT SAJAD
		Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	KTR.CAMAT JAWAI SELATAN
		Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	KTR.CAMAT TANGARAN
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	KTR.CAMAT SELAKAU TIMUR
		Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	KTR.CAMAT SELAKAU TIMUR
		Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	KTR.CAMAT SALATIGA
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	BPMPD
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	BPMPD
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	BPMPD
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	BPMPD
		Program Penyusunan Rencana Kerja SKPD	BPMPD
		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	BPMPD
		Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	BPMPD

No	Urusan	Nama Program	SKPD Yang Melaksanakan
24.	STATISTIK	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	BMPD
		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	BMPD
25.	KEARSIPAN	Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	BMPD
		Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	BAPPEDA
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	KANTOR ARPUSDA
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	KANTOR ARPUSDA
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	KANTOR ARPUSDA
		Program Penyusunan Rencana Kerja SKPD	KANTOR ARPUSDA
		Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	KANTOR ARPUSDA
		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	KANTOR ARPUSDA
		Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip	KANTOR ARPUSDA
		26.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	DISHUB, KOMINFO		
Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	DISHUB, KOMINFO		
Program Pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika	DISHUB, KOMINFO		
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	SEKRETARIAT DAERAH		
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	KTR.CAMAT SAJINGAN BESAR		
27.	PERPUSTAKAAN	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	KANTOR ARPUSDA
		Program Pemerataan Informasi dan Pengetahuan	KANTOR ARPUSDA
		Program Pemasyarakatan perpustakaan dan budaya baca	KANTOR ARPUSDA
28.	PERTANIAN	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	SEKRETARIAT DAERAH
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
		Program Penyusunan Rencana Kerja SKPD	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
		Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN



No	Urusan	Nama Program	SKPD Yang Melaksanakan
29.	KEHUTANAN	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
		Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
		Program Pencegahan dan Penganggulangan Penyakit Ternak	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
		Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Dan Prasarana	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	DINAS HUTBUN
		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	DINAS HUTBUN
		Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	DINAS HUTBUN
		Program Peningkatan Produksi Produktifitas Dan Mutu Tanaman Perkebunan	DINAS HUTBUN
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	DINAS HUTBUN
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	DINAS HUTBUN
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	DINAS HUTBUN
		Program Penyusunan Rencana Kerja SKPD	DINAS HUTBUN
		Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	DINAS HUTBUN
30.	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	DINAS HUTBUN
		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	DINAS HUTBUN
		Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	DINAS HUTBUN
		Program Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan	DINAS HUTBUN
		Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	DINAS PU BM PESDM
31.	PARIWISATA	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Kelistrikan	DINAS PU BM PESDM
		Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan	SEKRETARIAT DAERAH
		Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Kelistrikan	SEKRETARIAT DAERAH
		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	DINAS PORABUDPAR
		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	DINAS PORABUDPAR
		Program Pengembangan Kemitraan	DINAS PORABUDPAR

No	Urusan	Nama Program	SKPD Yang Melaksanakan
32.	KELAUTAN DAN PERIKANAN	<p>Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut</p> <p>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</p> <p>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</p> <p>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</p> <p>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</p> <p>Program Penyusunan Rencana Kerja SKPD</p> <p>Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir</p> <p>Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut</p> <p>Program Pengembangan Budidaya Perikanan</p> <p>Program Pengembangan Perikanan Tangkap</p> <p>Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan</p> <p>Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan</p> <p>Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar</p> <p>Program Minapolitan</p> <p>Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap</p> <p>Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya</p> <p>Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengolahan Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan</p> <p>Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Ekonomi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</p>	<p>SEKRETARIAT DAERAH</p> <p>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</p> <p>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</p> <p>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</p> <p>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</p> <p>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</p> <p>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</p> <p>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</p> <p>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</p> <p>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</p> <p>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</p> <p>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</p> <p>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</p> <p>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</p> <p>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</p> <p>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</p> <p>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</p> <p>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</p> <p>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</p> <p>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</p> <p>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</p>
33.	PERDAGANGAN	<p>Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan</p> <p>Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor</p> <p>Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri</p> <p>Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan</p> <p>Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan</p>	<p>DINAS KUMINDAG</p> <p>DINAS KUMINDAG</p> <p>DINAS KUMINDAG</p> <p>DINAS KUMINDAG</p> <p>SEKRETARIAT DAERAH</p>
34.	PERINDUSTRIAN	<p>Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi</p>	<p>DINAS KUMINDAG</p>



No	Urusan	Nama Program	SKPD Yang Melaksanakan
35.	TRANSMIGRASI	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program Penataan Struktur Industri Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	DINAS KUMINDAG DINAS KUMINDAG BPMPD DINAS SOSNAKERTRANS